

E-ISSN 3047-9487

P-ISSN 2302-8327

VOLUME 16 NOMOR 2

JULI 2026

JURNAL ANATESA

KAJIAN PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN



DITERBITKAN OLEH :

**Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)
Muhammadiyah Aceh Barat Daya**

TENTANG JURNAL ANATESA

Antase: Kajian Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan merupakan publikasi akademis yang menyajikan tulisan-tulisan ilmiah yang mendalam dan terkini dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Jurnal ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi yang ingin berkontribusi dalam pengembangan pemahaman terhadap isu-isu kritis dalam ketiga ranah tersebut.

Journal Title : Anatesa: Kajian Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Initials : Anatesa
Frequency : Januari dan Juli
P-ISSN : 2302-8327
E-ISSN : 3047-9487
Chief Editor : T. Fachrul Razie
DOI Prefix : -
Publisher : Non-Sinta
Acreditation : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Aceh Barat
Daya

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
TENTANG JURNAL ANATESA	ii
DAFTAR ISI.....	iii
STRATEGI MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KASI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP KEPUASAN GURU MADRASAH DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	1
FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM: LANDASAN KONSEPTUAL DALAM PEMBENTUKAN INSAN KAMIL DI ERA MODERN	9
PENERAPAN MODEL CASE BASED LEARNING DAN GAMIFICATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA GENERASI Z DI MAN BULUNGAN.....	22
KONSEP PEMASARAN PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA.....	33
PERKEMBANGAN MORAL DAN SPIRITUAL PESERTA DIDIK	49
PERNIKAHAN JARAK JAUH DI ERA DIGITAL	57
PERANAN SISTEM INFORMASI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH BARAT DAYA	72
PERAN EDUKATIF ‘AISYAH R.A. SEBAGAI SUMBER ILMU PADA MASA KENABIAN: KAJIAN HISTORIS.....	79
TEORI BELAJAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM: KAJIAN KONSEPTUAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN.	84
DINAMIKA PERUBAHAN KURIKULUM DAN TANTANGAN GURU PAI DALAM MENYESUAIKAN PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI 1 SUSOH.....	94
KONSEP SISTEM PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DALAM MENINGKATKAN LIFE SKILL SANTRI.....	108
DESAIN PENELITIAN SURVEI DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN: KONSEP, KARAKTERISTIK, DAN IMPLEMENTASI.....	119

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KASI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP KEPUASAN GURU MADRASAH DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Musbir

STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya

musbir@stitmuabdya.ac.id

Abstrak

Pelayanan administrasi yang cepat, akurat, dan berkualitas merupakan kewajiban Aparatur Sipil Negara dalam memenuhi kepuasan pemangku kepentingan, termasuk guru madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Islam dalam meningkatkan pelayanan administrasi Pendidikan Islam bidang madrasah, serta mekanisme pelayanan administrasi yang diterapkan pada Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap kepuasan guru madrasah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri atas Kasi Pendidikan Islam, staf Pendidikan Islam, dan guru madrasah yang dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kasi Pendidikan Islam telah menjalankan perannya dengan baik sebagai leader melalui pengambilan keputusan secara musyawarah, sebagai motivator melalui keteladanan kedisiplinan, dan sebagai inovator melalui pengembangan aplikasi E-Siasat untuk pelayanan sertifikasi guru secara daring; (2) mekanisme pelayanan administrasi telah dilaksanakan melalui empat aspek, yaitu transparansi informasi, kemudahan akses melalui grup WhatsApp, kepastian waktu penyelesaian tugas, dan penerapan etika pelayanan yang ramah dan sopan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana prasarana serta keterlambatan penyelesaian berkas ketika pejabat berwenang tidak berada di tempat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sarana prasarana dan pengembangan sistem pelayanan daring secara berkelanjutan guna meningkatkan kepuasan guru madrasah.

Kata kunci: Strategi Pelayanan, Administrasi Pendidikan Islam, Kepuasan Guru

Pelayanan publik merupakan bentuk layanan barang maupun jasa yang menjadi tanggung jawab instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pelayanan memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya kualitas dan kelancaran organisasi, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk bertindak cepat dan akurat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan yang baik terbukti berkontribusi signifikan terhadap kepuasan penerima layanan (Sonani & Yulia, 2021).

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya Seksi Pendidikan Islam (Pendis), merupakan salah satu unit yang bertanggung jawab memberikan pelayanan administrasi kepada guru madrasah. Guru madrasah sebagai pemangku kepentingan tetap pada seksi tersebut berhak memperoleh pelayanan yang santun, profesional, dan berkepastian waktu. Namun, hasil observasi awal menunjukkan adanya kejanggalan dalam pelayanan kepengurusan berkas administrasi, di antaranya sebagian guru madrasah belum dilayani secara maksimal dan masih ditemukan tutur kata yang kurang santun dari petugas. Kondisi ini menuntut perhatian khusus dari Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Islam selaku pemimpin unit, karena kualitas kepemimpinan dan strategi pelayanan yang diterapkan sangat menentukan tingkat kepuasan guru madrasah (Sellang, Jamaluddin, dkk., 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sari (2023) pada Dinas Pendidikan Kota Kediri menemukan bahwa sebagian guru belum puas dengan pelayanan administrasi ketenagaan, sementara penelitian Wahyuni (2020) di SMAN 1 Rambatan menunjukkan pengaruh kualitas layanan tenaga administrasi yang masih rendah terhadap kepuasan kerja guru. Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas kepuasan guru terhadap pelayanan administrasi, namun berbeda dari segi lokasi, konteks kelembagaan, serta pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan mengangkat konteks pelayanan administrasi

Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama, dengan menyoroti secara khusus peran kepemimpinan Kasi sebagai unsur strategis dalam peningkatan pelayanan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran Kasi Pendidikan Islam dalam meningkatkan pelayanan administrasi Pendidikan Islam bidang madrasah, dan (2) mengetahui mekanisme pelayanan administrasi yang diterapkan pada Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan kepuasan guru madrasah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*), yang memusatkan perhatian secara intensif pada satu objek untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah (Moleong, 2006). Penelitian dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya pada Seksi Pendidikan Islam.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan bahwa subjek dianggap paling mengetahui dan menguasai permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016). Subjek penelitian meliputi Kasi Pendidikan Islam, staf Pendidikan Islam bidang madrasah, dan guru madrasah sebagai informan pendukung.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi terhadap kegiatan pelayanan yang berlangsung, wawancara terstruktur dengan pedoman wawancara terhadap Kasi, staf, dan guru madrasah, serta dokumentasi berupa arsip dan data kelembagaan. Instrumen pendukung yang digunakan berupa kamera dan alat perekam suara. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data dengan merangkum dan memfokuskan pada hal-hal pokok, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap temuan penelitian (Moleong, 2006).

HASIL

Berdasarkan data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini memperoleh dua temuan utama, yaitu peran Kasi

Pendidikan Islam dan mekanisme pelayanan administrasi pada Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya.

Peran Kasi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi

Kasi Pendidikan Islam berperan sebagai leader yang mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama staf. Informan menjelaskan bahwa Kasi selalu mengayomi staf dan menerapkan gaya kepemimpinan kekeluargaan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin seksi. Selain sebagai leader, Kasi juga berperan sebagai motivator dengan memberi arahan dan keteladanan kedisiplinan, baik kepada staf pendis maupun guru madrasah, melalui pertemuan rutin setiap bulan dan kunjungan langsung ke madrasah setiap enam bulan sekali. Peran ketiga adalah sebagai inovator, ditandai dengan diluncurkannya aplikasi E-Siasat pada Juli 2023 yang memungkinkan guru madrasah mengurus berkas sertifikasi tanpa harus datang langsung ke kantor. Ringkasan peran tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Peran Kasi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi

No	Peran	Bentuk Pelaksanaan
1	Leader	Memimpin Seksi Pendidikan Islam dengan gaya kepemimpinan kekeluargaan; pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah bersama staf.
2	Motivator	Memberikan arahan dan keteladanan kedisiplinan waktu kepada staf pendis maupun guru madrasah melalui rapat/sharing bulanan dan kunjungan ke madrasah setiap enam bulan.
3	Inovator	Mengembangkan aplikasi E-Siasat sejak Juli 2023 untuk mempermudah pengurusan berkas sertifikasi guru madrasah secara daring.

Mekanisme Pelayanan Administrasi pada Seksi Pendidikan Islam

Mekanisme pelayanan administrasi pada Seksi Pendidikan Islam dilaksanakan melalui empat aspek utama. Pertama, transparansi informasi mengenai kepangkatan, keuangan, dan hal administratif lain yang disampaikan secara terbuka kepada guru madrasah, meskipun pada sebagian kasus informasi

disampaikan secara berjenjang melalui kepala madrasah. Kedua, kemudahan akses melalui grup WhatsApp yang digunakan sebagai media koordinasi dan konsultasi.

Ketiga, kepastian waktu penyelesaian tugas melalui penetapan timeline, meskipun keterlambatan tetap terjadi terutama ketika Kasi atau Kepala Kantor sedang bertugas di luar kantor. Keempat, etika pelayanan yang ditunjukkan melalui sikap ramah, sopan, dan profesional staf pendis. Guru madrasah juga menyampaikan bahwa pelayanan secara daring melalui aplikasi sertifikasi telah memudahkan proses pengurusan berkas, meskipun sebagian guru dengan usia lebih lanjut masih menghadapi kendala penguasaan teknologi dan jaringan internet. Selain itu, sarana dan prasarana ruang pelayanan yang masih terbatas menyebabkan guru madrasah kerap harus menunggu berdiri saat proses pengurusan berlangsung. Ringkasan mekanisme pelayanan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Mekanisme Pelayanan Administrasi pada Seksi Pendidikan Islam

No	Mekanisme	Bentuk Pelaksanaan
1	Transparansi	Informasi mengenai kenaikan pangkat, keuangan, dan administrasi lain disampaikan secara terbuka sesuai petunjuk teknis.
2	Kemudahan akses	Penyediaan grup WhatsApp sebagai media komunikasi dan konsultasi antara staf pendis dan guru madrasah.
3	Kepastian waktu	Penetapan timeline penyelesaian tugas, meskipun sesekali terkendala saat pejabat berwenang tidak berada di tempat.
4	Etika pelayanan	Penerapan sikap ramah, sopan, dan profesional oleh staf pendis dalam melayani guru madrasah.

PEMBAHASAN

Peran Kasi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kasi Pendidikan Islam telah menjalankan tiga peran kepemimpinan sekaligus, yaitu leader, motivator, dan inovator, sebagaimana peran kepemimpinan dalam administrasi pendidikan yang menekankan pentingnya pemimpin unit dalam menggerakkan dan mengoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan pelayanan (Hadijaya, 2012). Peran sebagai leader yang mengedepankan musyawarah sejalan dengan

prinsip administrasi publik yang partisipatif, di mana keputusan diambil secara kolektif untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di antara staf (Mulyadi, Gedeona, dkk., 2016). Peran sebagai motivator dan inovator memperkuat temuan ini, sebab keteladanan kedisiplinan dan pengembangan aplikasi E-Siasat menunjukkan adanya upaya strategis untuk menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan zaman, sejalan dengan konsep strategi sebagai penerapan tujuan jangka panjang organisasi melalui alokasi sumber daya yang tepat (Chaniago, 2014).

Mekanisme Pelayanan Administrasi dan Kepuasan Guru Madrasah

Keempat aspek mekanisme pelayanan yang ditemukan, yaitu transparansi, kemudahan akses, kepastian waktu, dan etika pelayanan, sejalan dengan prinsip standar pelayanan publik yang menekankan kesederhanaan, akuntabilitas, dan keterbukaan sebagai syarat pelayanan berkualitas (Suprpto, 2019). Transparansi informasi dan kemudahan akses melalui grup WhatsApp menunjukkan adaptasi pelayanan konvensional ke arah pelayanan yang lebih partisipatif, sedangkan penerapan etika pelayanan yang ramah dan sopan berkontribusi langsung terhadap kepuasan guru madrasah, sebagaimana kepuasan diartikan sebagai kesesuaian antara kinerja layanan yang diterima dengan harapan penerima layanan (Rohaeni & Marwa, 2018).

Meskipun demikian, kendala keterlambatan penyelesaian berkas saat pejabat berwenang tidak berada di tempat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kesenjangan literasi digital pada sebagian guru menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan belum sepenuhnya optimal. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Wahyuni (2020) yang juga menemukan pengaruh kualitas layanan administrasi yang masih perlu ditingkatkan terhadap kepuasan kerja guru, sekaligus melengkapi temuan Sari (2023) dengan menunjukkan bahwa kepuasan guru tidak hanya ditentukan oleh sistem pelayanan, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan unit pelayanan itu sendiri. Dengan demikian, penguatan sarana prasarana serta pendampingan literasi digital bagi guru madrasah menjadi aspek penting yang perlu ditindaklanjuti untuk menyempurnakan mekanisme pelayanan yang telah berjalan baik ini

KESIMPULAN

Peran Kasi Pendidikan Islam dalam meningkatkan pelayanan administrasi Pendidikan Islam bidang madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya telah berjalan dengan baik melalui tiga peran kepemimpinan, yaitu leader yang mengedepankan musyawarah, motivator yang memberi keteladanan kedisiplinan, dan inovator yang mengembangkan aplikasi E-Siasat untuk pelayanan sertifikasi guru secara daring.

Mekanisme pelayanan administrasi pada Seksi Pendidikan Islam telah memenuhi prosedur pelayanan yang baik melalui empat aspek, yaitu transparansi informasi, kemudahan akses melalui grup WhatsApp, kepastian waktu penyelesaian tugas, dan etika pelayanan yang ramah dan sopan. Kendala yang masih dihadapi berupa keterbatasan sarana prasarana dan keterlambatan penyelesaian berkas ketika pejabat berwenang tidak berada di tempat perlu menjadi perhatian bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya guna meningkatkan kepuasan guru madrasah secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pengaruh literasi digital guru madrasah terhadap efektivitas pelayanan administrasi berbasis daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, S. A. 2014. Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 82.
- Hadijaya, Y. 2012. *Administrasi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Indrasari, M. 2019. *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*. Surabaya: Unitomo Press.
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D., Gedeona, H. T., dkk. 2016. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rohaeni, H., & Marwa, N. 2018. Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ecodemica*, 2(2), 314.
- Sari, A. 2023. *Kepuasan Guru terhadap Pelayanan Administrasi pada Dinas Pendidikan Kota Kediri*. Skripsi.

Sellang, K., Jamaluddin, dkk. 2019. *Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Dimensi, Konsep, Indikator, dan Implementasi)*.

Sonani, N., & Yulia, A. 2021. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Bagian Pelayanan Administrasi Kependudukan. *14*(7).

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suprpto, H. 2019. Analisis Strategi Pemasaran dalam Menghadapi Persaingan antar Jasa Penginapan di Kota Lamongan. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, *4*(3), 1050.

Wahyuni, S. 2020. *Pengaruh Kualitas Layanan Tenaga Administrasi terhadap Kepuasan Kerja Guru di SMAN 1 Rambatan*. Skripsi.

FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM: LANDASAN KONSEPTUAL DALAM PEMBENTUKAN INSAN KAMIL DI ERA MODERN

Zainal Abidin, Gherya Rahima²

STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya

zain.usm.82@gmail.com¹, Gheryarahima897@gmail.com²

Abstrak

Filsafat pendidikan Islam merupakan landasan konseptual yang menentukan arah, tujuan, dan nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep filsafat pendidikan Islam yang meliputi pengertian, sumber, tujuan, prinsip-prinsip dasar, peran pendidik, serta implementasinya dalam pendidikan modern. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, ijtihad, dan pemikiran para ulama serta berorientasi pada pembentukan *insan kamil* melalui pengembangan aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial secara seimbang. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan filsafat pendidikan Islam tetap relevan sebagai landasan pengembangan pendidikan dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman.

Kata kunci: Filsafat Pendidikan Islam, Insan Kamil, Pendidikan Islam.

Abstract

Islamic educational philosophy constitutes the conceptual foundation that determines the direction, objectives, and fundamental values of Islamic education. This article aims to analyze the concept of Islamic educational philosophy, including its definition, sources, objectives, fundamental principles, the role of educators, and its implementation in modern education. This study employed a library research method using a descriptive qualitative approach through content analysis of relevant literature. The findings indicate that Islamic educational philosophy is grounded in the Qur'an, Hadith, ijtihad, and the thoughts of Muslim scholars, with the ultimate goal of developing insan kamil (the complete human being) through the balanced development of spiritual, intellectual, emotional, and social dimensions. These findings affirm that the application of Islamic educational philosophy remains highly relevant as a foundation for educational development in fostering knowledgeable, morally upright generations capable of addressing global challenges while preserving Islamic values.

Keywords: Islamic Educational Philosophy, Insan Kamil, Islamic Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan fundamental manusia yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas individu sekaligus peradaban suatu bangsa. Melalui pendidikan, manusia mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik potensi intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sehingga pendidikan tidak semata berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003).

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar proses pengajaran di ruang kelas. Tafsir (2018) menjelaskan bahwa pendidikan Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk membimbing manusia agar mampu mengembangkan seluruh potensinya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah (abd Allah) dan khalifah di muka bumi (khalifah fi al-ardh). Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan duniawi, tetapi juga pada kebahagiaan dan keselamatan hidup di akhirat.

Pentingnya pendidikan dalam Islam tampak jelas dari banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadis yang mendorong manusia untuk menuntut ilmu. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Surah Al-'Alaq ayat 1-5, diawali dengan perintah membaca (iqra'), yang menunjukkan bahwa Islam menempatkan ilmu pengetahuan dan aktivitas pendidikan pada posisi yang sangat tinggi. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kenyataan ini menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu sarana utama dalam membangun peradaban Islam yang maju dan bermartabat (Nata, 2017).

Untuk memahami hakikat, tujuan, dan arah pendidikan Islam secara mendalam, diperlukan kajian filosofis yang dikenal dengan filsafat pendidikan Islam. Nata (2017) menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan cabang ilmu yang membahas persoalan-persoalan mendasar mengenai pendidikan berdasarkan pandangan hidup Islam, mencakup hakikat manusia, tujuan pendidikan, peran pendidik dan peserta didik, metode pembelajaran, kurikulum, serta nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai landasan teoritis dan konseptual yang mengarahkan pelaksanaan pendidikan agar tetap selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis.

Keberadaan filsafat pendidikan Islam menjadi semakin penting mengingat pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pandangan hidup yang melandasinya. Langgulung (2003) menegaskan bahwa setiap sistem pendidikan memiliki tujuan dan orientasi yang berbeda sesuai dengan nilai dan filsafat yang dianutnya. Dalam pendidikan Islam, seluruh proses pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara ilmu pengetahuan dan akhlak, serta antara kehidupan dunia dan akhirat.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan moral, seperti menurunnya nilai-nilai etika, meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan generasi muda, penyalahgunaan teknologi, serta melemahnya nilai-nilai keagamaan. Kondisi tersebut menuntut agar pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mampu membentuk karakter dan moral peserta didik agar dapat memanfaatkan ilmu yang dimilikinya secara bertanggung jawab.

Perkembangan teknologi digital, arus globalisasi, dan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat telah membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Berbagai fenomena seperti menurunnya etika peserta didik, penyalahgunaan teknologi digital, rendahnya literasi moral, serta melemahnya internalisasi nilai-nilai keagamaan menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari pencapaian akademik semata. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya landasan

filosofis yang mampu mengintegrasikan pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan penguatan nilai-nilai spiritual secara seimbang sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan Islam.

Berbagai penelitian mengenai filsafat pendidikan Islam umumnya berfokus pada pembahasan konsep, sejarah perkembangan, maupun pemikiran para tokoh pendidikan Islam. Namun, kajian yang menganalisis relevansi filsafat pendidikan Islam sebagai landasan konseptual dalam menjawab tantangan pendidikan modern, khususnya dalam membentuk *insan kamil*, masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya kajian yang tidak hanya menguraikan konsep filsafat pendidikan Islam secara teoritis, tetapi juga menjelaskan relevansinya terhadap pengembangan pendidikan Islam di era globalisasi.

Filsafat pendidikan Islam menawarkan solusi atas persoalan tersebut melalui konsep pendidikan yang menyeluruh dan berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan Islam tidak memisahkan aspek intelektual dan spiritual, melainkan mengintegrasikan keduanya dalam satu kesatuan yang harmonis (Al-Attas, 1996). Melalui pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keimanan yang kuat, akhlak yang baik, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis konsep filsafat pendidikan Islam yang meliputi pengertian, sumber-sumber, tujuan, prinsip-prinsip dasar, peran pendidik, serta implementasinya dalam pendidikan modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan *insan kamil* serta menjadi landasan dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan pada era globalisasi tanpa mengesampingkan nilai-nilai keislaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep filsafat pendidikan Islam melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta buku-buku filsafat pendidikan Islam karya para ahli, dan data

sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen akademik yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, memilih, dan menginventarisasi berbagai literatur yang sesuai dengan fokus kajian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan konsep-konsep mengenai pengertian, sumber, tujuan, prinsip-prinsip dasar, peran pendidik, serta implementasi filsafat pendidikan Islam dalam pendidikan modern. Hasil analisis disajikan secara sistematis dan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi filsafat pendidikan Islam sebagai landasan konseptual dalam pembentukan *insan kamil* di era modern.

HASIL

A. Pengertian Filsafat Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan landasan konseptual yang mengarahkan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam tidak hanya membahas hakikat pendidikan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembinaan manusia secara utuh yang berorientasi pada pembentukan kepribadian beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* yang berarti cinta dan *sophia* yang berarti kebijaksanaan. Dalam konteks pendidikan Islam, filsafat dipahami sebagai upaya berpikir secara mendalam, sistematis, dan kritis untuk menemukan hakikat pendidikan berdasarkan pandangan hidup Islam. Perspektif ini menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensinya secara seimbang.

Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur, pendidikan Islam dipahami sebagai proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Kajian ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam mencakup pembahasan mengenai hakikat manusia, tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, serta hubungan antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai dasar

konseptual dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada keseimbangan aspek spiritual, intelektual, emosional, moral, dan sosial.

B. Sumber-Sumber Filsafat Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam memiliki empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijtihad, dan pemikiran para ulama. Keempat sumber tersebut saling melengkapi dalam membangun kerangka konseptual pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Al-Qur'an merupakan sumber utama yang menjadi landasan seluruh konsep pendidikan Islam. Berbagai ayat Al-Qur'an mendorong manusia untuk membaca, berpikir, menuntut ilmu, dan mengembangkan potensi dirinya. Perintah membaca dalam QS. Al-'Alaq ayat 1 menjadi dasar bahwa aktivitas pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber kedua yang memberikan penjelasan praktis mengenai proses pendidikan. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan keteladanan dalam pembentukan karakter dan akhlak. Selain itu, ijtihad para ulama berperan dalam mengembangkan konsep pendidikan Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa pemikiran para filosof muslim, seperti Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas, memberikan kontribusi besar dalam pengembangan filsafat pendidikan Islam, khususnya mengenai konsep adab, *ta'dib*, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembentukan kepribadian peserta didik.

C. Tujuan Filsafat Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan utama filsafat pendidikan Islam adalah membentuk *insan kamil*, yaitu manusia yang berkembang secara utuh pada aspek spiritual, intelektual, emosional, moral, dan sosial. Konsep ini menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan manusia yang mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi.

Berdasarkan analisis literatur, tujuan tersebut diwujudkan melalui pembentukan kepribadian *muslim* yang memiliki keimanan yang kuat, pengembangan seluruh potensi manusia secara seimbang, pembentukan akhlak mulia, kesiapan menghadapi kehidupan dunia dan akhirat, serta kemampuan memberikan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama.

Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi pendidikan Islam tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari tujuan pendidikan yang menyeluruh.

D. Prinsip-Prinsip Filsafat Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam dibangun atas lima prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, akhlak, kemanusiaan, dan tanggung jawab. Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip tauhid menempatkan keyakinan kepada Allah SWT sebagai landasan utama seluruh aktivitas pendidikan, sehingga setiap proses pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, prinsip keseimbangan menekankan pentingnya pengembangan seluruh potensi manusia secara harmonis, meliputi aspek spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Adapun prinsip akhlak menegaskan bahwa pembentukan akhlak mulia merupakan tujuan utama pendidikan Islam, sehingga peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip kemanusiaan menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kehormatan yang harus dihargai, sedangkan prinsip tanggung jawab menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab terhadap ilmu yang dimilikinya serta pemanfaatannya bagi kemaslahatan diri, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, kelima prinsip tersebut menjadi fondasi filosofis dalam mewujudkan pendidikan Islam yang

holistik, humanis, dan berorientasi pada pembentukan *insan kamil* (Nata, 2017; Ramayulis, 2015).

E. Peran Guru dalam Filsafat Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa guru memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam filsafat pendidikan Islam. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembina, pembimbing, dan teladan yang bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga oleh integritas moral, spiritual, dan keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang guru dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan analisis literatur, peran guru dalam pendidikan Islam mencakup lima fungsi utama, yaitu sebagai pendidik (*murabbi*), pengajar (*mu'allim*), pembimbing (*mursyid*), teladan (*uswah hasanah*), dan evaluator pembelajaran (Uhbiyati, 2013). Kelima fungsi tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki tanggung jawab yang komprehensif dalam mengembangkan potensi intelektual, spiritual, emosional, dan sosial peserta didik. Dengan demikian, guru dituntut memiliki kompetensi akademik, profesional, moral, spiritual, dan sosial yang memadai agar mampu mewujudkan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk *insan kamil* yang berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat.

F. Implementasi Filsafat Pendidikan Islam dalam Pendidikan Modern

Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi dinamika pendidikan modern. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi menuntut sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga mampu membentuk karakter dan moral peserta didik. Dalam konteks tersebut, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai landasan konseptual yang mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar tetap berpedoman pada nilai-nilai keislaman tanpa mengabaikan perkembangan zaman.

Berdasarkan analisis literatur, implementasi filsafat pendidikan Islam dalam pendidikan modern dapat dilakukan melalui integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama, sehingga dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama dapat diminimalkan. Selain itu, pendidikan karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran melalui penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga perlu diarahkan sebagai media pembelajaran yang inovatif, efektif, dan tetap berlandaskan pada etika serta nilai-nilai Islam.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi filsafat pendidikan Islam perlu diwujudkan melalui pembelajaran yang humanis dengan menghargai keberagaman, potensi, dan karakteristik setiap peserta didik. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tanpa mengabaikan pembinaan akhlak dan spiritualitas. Dengan demikian, penguatan nilai-nilai Islam dalam setiap proses pembelajaran menjadi faktor penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan modern secara bijaksana (Ramayulis, 2015; Tafsir, 2018).

PEMBAHASAN

Relevansi Filsafat Pendidikan Islam dalam Pembentukan *Insan Kamil*

Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam memiliki peran strategis sebagai landasan konseptual dalam membentuk *insan kamil*, yaitu manusia yang berkembang secara utuh pada aspek spiritual, intelektual, emosional, moral, dan sosial. Temuan ini mempertegas bahwa tujuan pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan tanggung jawab sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Pandangan tersebut sejalan dengan Langgulung (2003) yang menyatakan bahwa pendidikan Islam diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Selain itu, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sumber-sumber filsafat pendidikan Islam yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, ijtihad, serta pemikiran para ulama membentuk suatu kerangka konseptual yang komprehensif dalam

penyelenggaraan pendidikan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki karakter yang dinamis karena mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Pemikiran Al-Attas mengenai *ta'dib* juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan ilmu, tetapi juga oleh pembentukan adab sebagai fondasi kepribadian peserta didik.

Dalam konteks pendidikan modern, filsafat pendidikan Islam memiliki relevansi yang semakin kuat di tengah perkembangan teknologi digital dan globalisasi. Integrasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan karakter, dan nilai-nilai spiritual menjadi kebutuhan yang mendesak agar peserta didik mampu menghadapi perubahan sosial tanpa kehilangan identitas keislamannya. Oleh karena itu, implementasi filsafat pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari penguatan pendidikan karakter sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.

Meskipun demikian, implementasi filsafat pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam pembelajaran berbasis teknologi serta belum optimalnya kebijakan pendidikan dalam memperkuat pendidikan karakter. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari lembaga pendidikan, pendidik, pemerintah, dan masyarakat untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

KESIMPULAN

Filsafat pendidikan Islam merupakan landasan konseptual yang berfungsi mengarahkan tujuan, nilai, dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ajaran Al-Qur'an, Hadis, ijtihad, serta pemikiran para ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan *insan kamil* melalui pengembangan aspek spiritual, intelektual, emosional, moral, dan sosial secara seimbang. Dalam konteks pendidikan modern, filsafat pendidikan Islam tetap memiliki relevansi sebagai dasar pengembangan sistem pendidikan yang mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan penguatan nilai-nilai keislaman. Implementasinya memerlukan komitmen seluruh

pemangku kepentingan agar mampu menjawab tantangan global tanpa mengabaikan identitas dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi filsafat pendidikan Islam secara empiris pada berbagai jenjang dan lembaga pendidikan untuk memperkaya pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Arifin, H. M. (2014). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Langgulong, H. (2003). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Muhaimin. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2017). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ramayulis. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Tafsir, A. (2018). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Uhbiyati, N. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Azra, A. (2019). Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 123–138.
- Huda, M. (2021). Islamic Educational Philosophy and Character Education in the Digital Era. *Journal of Islamic Education Studies*, 9(1), 45–60.
- Suyudi, M. (2019). Upaya Transformasi Pendidikan Islam Berdasarkan Paradigma dan Filosofinya. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 11(1), 1–11.
- Tolchah, M. (2016). Pendidikan dan Faham Liberalisme. *At-Ta'dib: Journal of Pesantren Education*, 3(1).

Yasin, M., & Hasanah, U. (2022). Relevansi Filsafat Pendidikan Islam dalam Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 167–182.

PENERAPAN MODEL *CASE BASED LEARNING* DAN *GAMIFICATION* DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA GENERASI Z DI MAN BULUNGAN

Abdul Arif, Ratna Dwi Christyanti², Selfiana DG Baji³

^{1,2,3} Universitas Kaltara

abdularif050779@gmail.com¹ ; ratnadwichristyanti@gmail.com² ; selvibaji@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model *Case Based Learning* dan *gamification* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada siswa generasi Z di MAN Bulungan. Kedua model ini digunakan sebagai strategi pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *Case Based Learning* dan *gamification* mampu mengubah pembelajaran konvensional menjadi dinamis. Penerapan model ini memudahkan siswa memahami konsep ajaran Islam karena materi dihubungkan langsung dengan studi kasus nyata di masyarakat. Alhasil, suasana pembelajaran di kelas lebih interaktif dan menyenangkan. Dari segi efektivitas, kedua model ini saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran yang adaptif di era digital. Kajian akademik turut mendukung bahwa kombinasi kedua model tersebut secara signifikan meningkatkan keaktifan, pemahaman, kemampuan berpikir kritis, dan pengalaman nilai-nilai Islam siswa generasi Z.

Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Siswa, *Model Case Based Learning* dan *gamification*.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of Case Based Learning and gamification models in Islamic Religious Education (PAI) instruction for generation Z students at MAN Bulungan. These two models serve as instructional strategies to enhance student engagement and critical thinking skills. A descriptive qualitative method was employed, utilizing observation and documentation for data collection. The findings indicate that Case Based Learning and gamification successfully transform conventional instruction into a dynamic learning experience. Implementing these models facilitates students' understanding of Islamic concepts by directly linking the material to real world case studies. Consequently, the classroom learning atmosphere becomes more interactive and enjoyable. In terms of effectiveness, the two models complement each other to foster adaptive learning suited to the digital era. Academic literature further supports the conclusion that combining these models significantly improves engagement, comprehension, critical thinking skills, and the internalization of Islamic values among generation Z students.

Keywords: *Islamic Religious Education, Students, Case Based Learning and gamification models.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peran krusial dalam membentuk kesadaran spiritual, etis, dan eksistensial individu, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial dan kultural di era digital. Di tingkat Sekolah Menengah Atas (SLTA/SMK/MA), Pendidikan Agama Islam tidak lagi sekadar berfungsi sebagai transmisi ajaran normatif, melainkan sebagai kompas nilai yang menuntun generasi muda menuju kehidupan yang berkeadaban. Oleh karena itu, keberhasilan Pendidikan Agama Islam sangat bergantung pada bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui proses pembelajaran yang adaptif di sekolah.

Tantangan utama pembelajaran Pendidikan Agama Islam saat ini adalah pergeseran demografis siswa yang didominasi oleh generasi Z. Karakteristik generasi ini sangat lekat dengan literasi digital, aktivitas teknologi yang tinggi, serta kecenderungan menyerap informasi secara cepat dan visual. Karakteristik tersebut menuntut perubahan paradigma mengajar dari metode konvensional monoton menuju pendekatan yang lebih modern, interaktif, dan kolaboratif yang relevan dengan kebutuhan eksistensial mereka. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual yang dikombinasikan dengan literasi digital Islami mampu memperkuat fondasi spiritual siswa (Natsir, 2026). Secara operasional, penggunaan model *Case Based Learning* dan *gamification* terbukti efektif dalam mereduksi beban kognitif sekaligus meningkatkan keterlibatan interaktif siswa dalam memecahkan masalah moral keagamaan yang kompleks.

Dengan demikian, model pembelajaran model *Case Based Learning* dan *gamification* menjadi salah satu alternatif yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa MAN Bulungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model *Case Based Learning* dan *gamification* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam guna meningkatkan keterlibatan aktif, motivasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah keagamaan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada pengalaman dan pemaknaan subjek penelitian terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran model *Case Based Learning* dan *gamification*. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam penerapan pembelajaran berbasis studi kasus dan permainan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam berdasarkan kondisi nyata serta pengalaman langsung para pelaku pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan di MAN Bulungan dengan subjek siswa kelas X. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ramadhani, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) pada era modernitas dihadapkan pada persoalan kompleks yang menuntut solusi strategis. Salah satu isu krusial yang terus menjadi fokus diskusi para pemerhati pendidikan pada fenomena kemerosotan moralitas generasi muda. Sebagai bentuk respons terhadap tantangan tersebut, sistem pembelajaran di sekolah dikondisikan sebagai sebuah kombinasi terorganisasi yang mengintegrasikan unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur. Melalui interaksi sinergis antarunsur tersebut, Pendidikan Agama Islam diorientasikan untuk mengemban peran signifikan dalam mengembangkan karakter sekaligus kompetensi siswa generasi Z (Hakim, 2012).

Berangkat dari urgensi pengembangan karakter tersebut, integrasi teknologi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam mutakhir menjadi sebuah keniscayaan akademis guna menjawab tantangan era digital. Optimalisasi media digital yang dikombinasikan dengan metode inovatif seperti pendekatan kontekstual, penguatan literasi digital, dan pembelajaran kolaboratif secara empiris terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengajaran serta aksesibilitas sumber belajar bagi generasi Z.

Melalui aktualisasi metodologis yang menyeluruh, rekonstruksi pembelajaran Pendidikan Agama Islam diproyeksikan mampu mencapai relevansi tertingginya

dalam mencetak output pendidikan yang ideal. Implementasi strategi yang adaptif ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual dan kokoh secara spiritual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Pada akhirnya, rekonstruksi ini bermuara pada pembentukan karakter siswa yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Generasi Z

Generasi Z (lahir 1997–2012) merupakan *digital native* yang tumbuh dalam ekosistem teknologi informasi, media sosial, dan akses informasi instan. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, generasi ini menuntut pembelajaran interaktif, visual, kolaboratif, serta terintegrasi dengan teknologi digital. Secara psikologis dan akademis, mereka bercirikan sikap kritis terhadap otoritas, mandiri dalam belajar, dan mencari relevansi materi dengan realitas kehidupan serta spiritualitas personal (Makhmut, 2024). Untuk merespon karakteristik tersebut, guru dan pemangku kebijakan harus melakukan transformasi strategi pembelajaran. Implementasi kurikulum yang efektif bagi generasi Z wajib mengintegrasikan tujuh instrumen utama yaitu :

- 1) Penyampaian arahan yang jelas.
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh.
- 3) Penyajian materi secara cepat, ringkas, dan menarik.
- 4) Pemberian umpan balik yang cepat dan berkelanjutan.
- 5) Penyediaan ruang interaksi tatap muka.
- 6) Penghargaan terhadap komitmen eksternal siswa.
- 7) Penerimaan dan pengelolaan kegagalan sebagai proses belajar..

C. Penerapan Model *Case Based Learning* dan *Gamification* pada Siswa Generasi Z

Model *Case Based Learning* dan *gamification* merupakan gabungan dari dua pendekatan pembelajaran yang inovatif. Integritas kedua model ini mampu menciptakan pengalaman belajar yang mendalam. Berikut adalah rincian konsep dan penerapannya :

a. *Model Case Based Learning*

Model Case Based Learning (CBL) merupakan pendekatan konstruktivisme menggunakan narasi kasus nyata yang realistis untuk mengintegrasikan berbagai sumber informasi dalam konteks otentik. Model ini efektif meningkatkan keterlibatan aktif, kreativitas, penalaran, dan kemampuan berpikir kritis siswa tanpa terpaku pada hafalan (Polmed P4m, 2022). Karakteristik utama model *Case Based Learning* meliputi penggunaan instrumen kasus bernarasi, penyusunan daftar pertanyaan studi, diskusi dalam kelompok kecil, pelaksanaan diskusi kelas secara aktif, serta kegiatan tindak lanjut berupa evaluasi kebutuhan siswa secara individu maupun kelompok. Adapun kelebihan dari penerapan model *Case Based Learning* adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengembangkan kemampuan analitis.
2. Mampu mengaplikasi konteks atau teori ke dalam kenyataan di lapangan.
3. Kemandirian dalam mencari dan memecahkan tugas melalui pelatihan pemecahan masalah.
4. Meningkatkan rasa percaya diri, semangat dan kerja sama dalam kelompok serta kemampuan presentasi yang lebih baik.

b. *Model Gamification*

Penerapan *gamification* merupakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan pendidikan era digital bagi generasi Z yang berkarakteristik *digital natives*. Melalui integrasi elemen permainan seperti poin, lencana, dan papan peringkat, model ini terbukti mampu memicu motivasi intrinsik, memberikan umpan balik instan, serta mendukung pembelajaran terpersonalisasi (Makhmut, 2024). Implementasi praktisnya di kelas dapat dioptimalkan menggunakan platform digital seperti Quizizz, Kahoot, Canva, Miro, atau *Learning Management System* seperti Canvas (Nugroho, 2025).

Pada penelitian ini, penerapan model *Case Based Learning* dan *gamification* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi siswa MAN Bulungan bertujuan untuk mengemas materi keislaman menjadi lebih menyenangkan

tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritual dan moral. Langkah-langkah penerapan integrasi kedua model tersebut adalah sebagai berikut :

1. Guru menetapkan capaian pembelajaran, lalu memetakan materi keislaman yang akan dikemas menggunakan elemen permainan.
2. Guru memilih platform digital sebagai aplikasi edukasi interaktif yang mudah diakses untuk mendukung proses pembelajaran.
3. Guru menyajikan skenario aktual atau kasus nyata yang relevan dengan nilai-nilai Islam sebagai dasar pembelajaran berbasis kasus.
4. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok atau tim untuk menyelesaikan misi kasus tersebut sekaligus membangun kolaborasi antar siswa.
5. Guru memasukkan komponen permainan seperti tantangan, batas waktu, atau poin ke dalam aktivitas analisis kelompok.
6. Siswa mencari literatur, hukum fiqih, dan data realitas sosial di dalam kelompoknya untuk merumuskan solusi kasus yang tepat.
7. Siswa mendiskusikan berbagai perspektif dengan anggota timnya untuk menyusun langkah penyelesaian masalah secara logis.
8. Siswa mempresentasikan hasil analisis dan solusi kelompok, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan untuk memperdalam pemahaman konsep.
9. Guru memberikan penghargaan sebagai pengakuan atas capaian dan poin yang diraih siswa selama menyelesaikan misi.
10. Guru melakukan evaluasi akhir agar pemahaman konsep agama dapat diinternalisasi dengan baik oleh siswa, bukan sekadar menjadi permainan.

Kombinasi model *Case Based Learning* dan *gamification* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa MAN Bulungan secara signifikan memberikan hasil sebagai berikut :

1. Siswa terlatih menganalisis skenario dunia nyata yang kompleks, memecahkan masalah, dan berpikir kritis melalui resolusi studi kasus keagamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

2. Pendekatan ini memfasilitasi kemandirian belajar siswa serta meningkatkan kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi, berkreasi, dan kerja sama tim secara efektif.
3. Integrasi elemen kompetisi waktu nyata (*real-time competition*) dan pembelajaran yang variatif berhasil memicu keterlibatan aktif siswa, yang tercermin dari tingginya angka kepuasan belajar.
4. Model ini terbukti adaptif terhadap karakteristik siswa generasi Z yang membutuhkan tantangan, interaktivitas, dan umpan balik langsung dalam proses pembelajaran.
5. Paradigma belajar siswa mengalami transformasi positif, dari yang semula berbasis hafalan materi teks konvensional menjadi pemahaman konsep akademis yang substantif dan kontekstual.

Hasil pengamatan menunjukkan pihak sekolah mendukung penuh inovasi pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam melalui model *Case Based Learning* dan *gamification*. Sekolah memberikan kewenangan kepada guru untuk berinovasi, dengan catatan tetap selaras dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan nilai-nilai keislaman. Dukungan ini diimplementasikan melalui strategi pembelajaran kontekstual yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta karakteristik siswa generasi Z. Implementasi model *Case Based Learning* dan *gamification* terbukti efektif dalam mentransformasi perilaku siswa dari pasif menjadi lebih partisipatif. Untuk mengoptimalkan karakteristik generasi Z, pendidik memanfaatkan media digital interaktif, kuis visual, dan desain instrumen soal yang menarik guna meningkatkan interaktivitas kelas. *Case Based Learning* dan *gamification* bukan merupakan tujuan akhir, melainkan instrumen strategis untuk memperdalam pemahaman materi Pendidikan Agama Islam. Kedua model ini berhasil menciptakan ekosistem pembelajaran yang optimal bagi generasi Z melalui stimulasi tantangan (*challenge-based*), penyediaan umpan balik instan (*instant feedback*), dan penumbuhan motivasi kompetitif yang sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan model *Case Based Learning* dan *gamification* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam sangat efektif bagi siswa di MAN Bulungan. Pendekatan ini terbukti mampu mengubah pembelajaran konvensional menjadi lebih dinamis. Sesuai dengan karakteristik siswa generasi Z, penerapan model ini membuat konsep ajaran Islam lebih mudah dipahami karena materi dihubungkan langsung dengan studi kasus nyata di masyarakat. Selain itu, suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Dalam hal efektivitas, sinergi antara model *Case Based Learning* dan *gamification* menciptakan inovasi pembelajaran yang adaptif di era digital serta sangat disukai oleh generasi Z. Hal ini didukung oleh kajian akademik yang menunjukkan bahwa kedua model tersebut secara signifikan meningkatkan keaktifan, pemahaman, kemampuan berpikir kritis, dan pengalaman nilai-nilai Islam siswa generasi Z.

DAFTAR PUSTAKA

- Dayu, D. P. K., dkk. 2022. *Model Case Based Learning (Pada Implementasi Kurikulum Merdeka)*. Magetan : Ae Media Grafika.
- Polmed P4m. 2022. *Panduan Project Based Learning (PBL) & Case Based Learning (CBL)*. Medan : Pusat Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Medan.
- Makhmut, K. D. I., dkk. 2024. *Pembelajaran untuk Generasi Z*. Padang : Edelwais Publishing.
- Ababil, A. M. S. 2025. "Penerapan Gamifikasi dalam Pembelajaran Pendidikan Islam untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa". *Indonesian Journal on Education*, 1(4). <https://ijoed.org/index.php/ijoed/article/view/72/88>
- Sari Yunita., Koderi., Fitriani. 2026. "Efektivitas Gamifikasi dalam Pembelajaran PAI terhadap Motivasi Belajar Generasi Z : Systematic Literature Review". *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(2). <https://jurnalp4i.com/index.php/learning/article/view/9677/6545>

- Natsir, A. F. A. 2026. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Generasi Z". Jurnal Andi Djemma, 9(1). <https://doi.org/10.35914/4xszg49>
- Syamsidah. 2018. Buku Model *Problem Based Learning* (PBL). Yogyakarta : Deepublish.
- Sugiansyah, A. A., dkk. 2025. "Penerapan Model *Case Based Learning* untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Menengah". Jurnal Sindoro Cendikia Pendidikan, 15(11). <https://cibangsa.com/index.php/sindoro/article/view/4170/3585>
- Ramadhani, F. P., dkk. 2026. "Implementasi Pembelajaran Berbasis Gamifikasi pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta". Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Pendidikan dan Inovasi, 6(1). <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPI/article/view/2640/1774>
- Hakim, I. M. 2012. "Pendekatan Sistem Dalam Pembelajaran". Jurnal INSANIA, 17(2). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/insania/article/view/1498/1096>
- Nugroho, F., dkk. 2025. "Pemanfaatan Kahoot dan Quizizz sebagai Alat Media Pembelajaran Interaktif untuk Meningkatkan Kualitas Belajar di SMAN 1 Parittigi". Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, 3(1). <https://journal.arteei.or.id/index.php/Neptunus/article/view/725/975>

KONSEP PEMASARAN PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA

Arisman Juanda¹

¹STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya
arisman.juanda@yahoo.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran pendidikan yang diterapkan di MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya serta mengidentifikasi program-program pendidikan yang menjadi keunggulan madrasah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari kepala madrasah, guru, dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran pendidikan di MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, promosi dari mulut ke mulut (*word of mouth*), pemanfaatan media sosial Instagram, pembangunan *branding* sekolah, serta peningkatan kualitas pelayanan dan pembelajaran. Strategi tersebut berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan jumlah peserta didik yang mencapai 371 siswa. Program unggulan madrasah meliputi penerapan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Pengembangan Diri, program hafalan Al-Qur'an, doa, hadits, ayat pilihan, pembiasaan karakter, penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, serta program Tahfidz dengan target hafalan Juz 29 dan Juz 30 sebagai syarat kelulusan. Selain itu, tersedia berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi akademik dan nonakademik peserta didik. Program-program tersebut menjadi daya tarik utama dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya.

Kata Kunci : Pemasaran, Pendidikan, MI Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan bangsa yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Melalui pendidikan, suatu bangsa dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta menciptakan generasi yang memiliki kompetensi akademik, moral, dan sosial yang baik. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Perkembangan dunia pendidikan pada era globalisasi saat ini menunjukkan adanya persaingan yang semakin ketat antar lembaga pendidikan. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada lembaga pendidikan umum, tetapi juga pada lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah. Masyarakat saat ini memiliki banyak pilihan dalam menentukan lembaga pendidikan yang dianggap mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Akibatnya, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk mampu menunjukkan keunggulan dan kualitas yang dimilikinya agar memperoleh kepercayaan masyarakat.

Perubahan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan telah menyebabkan lembaga pendidikan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai lembaga sosial, melainkan juga sebagai lembaga jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, peserta didik dan orang tua diposisikan sebagai pengguna jasa pendidikan yang memiliki hak untuk memilih lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu menerapkan strategi yang tepat untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan membangun citra positif lembaganya kepada masyarakat.

Salah satu strategi yang dianggap penting dalam menghadapi persaingan tersebut adalah penerapan pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk memperkenalkan layanan pendidikan yang dimiliki kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh kepercayaan, meningkatkan jumlah peserta didik, serta membangun hubungan yang berkelanjutan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap lembaga pendidikan.

Konsep pemasaran pendidikan pada dasarnya berkembang dari teori pemasaran jasa yang menekankan pentingnya kepuasan pelanggan. Dalam dunia pendidikan, pelanggan tidak hanya peserta didik, tetapi juga orang tua, masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah peserta didik yang diterima, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan.

Ahmad Qurtubi (2025) menjelaskan bahwa pemasaran pendidikan memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam di tengah

dinamika kebutuhan masyarakat modern. Pemasaran pendidikan mencakup berbagai aspek seperti analisis pasar, strategi branding, komunikasi pemasaran, pelayanan pendidikan, serta penguatan identitas lembaga. Melalui penerapan strategi pemasaran yang tepat, lembaga pendidikan dapat meningkatkan daya saing tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi karakteristik utamanya.

Pentingnya pemasaran pendidikan semakin terlihat ketika jumlah lembaga pendidikan terus bertambah setiap tahunnya. Persaingan tidak lagi hanya terjadi pada aspek akademik, tetapi juga pada kualitas pelayanan, fasilitas, program unggulan, serta kemampuan lembaga dalam membangun citra positif di mata masyarakat. Kondisi ini menuntut setiap lembaga pendidikan untuk mampu memahami kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan layanan pendidikan yang diberikan dengan perkembangan zaman.

Dalam perspektif manajemen modern, pemasaran pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konsep segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Segmentasi dilakukan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran layanan pendidikan. Targeting dilakukan untuk menentukan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas pemasaran, sedangkan positioning dilakukan untuk membangun citra lembaga pendidikan agar memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya.

Selain itu, pemasaran pendidikan juga berkaitan erat dengan kualitas layanan pendidikan. Masyarakat saat ini tidak hanya mempertimbangkan biaya pendidikan dalam memilih sekolah, tetapi juga mempertimbangkan mutu pembelajaran, kualitas tenaga pendidik, fasilitas sekolah, prestasi peserta didik, serta program-program unggulan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang efektif harus didukung oleh kualitas layanan pendidikan yang baik.

Dalam praktiknya, keberhasilan pemasaran pendidikan tidak hanya bergantung pada kegiatan promosi semata. Lembaga pendidikan harus mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui kualitas pendidikan yang diberikan. Kepercayaan masyarakat merupakan aset yang sangat penting karena dapat memengaruhi keputusan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka.

Penelitian Ridwan dan Febriani (2024) menemukan bahwa strategi pemasaran jasa pendidikan yang efektif dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, pengembangan program unggulan, penguatan hubungan dengan masyarakat, serta peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan citra lembaga pendidikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Bagi lembaga pendidikan Islam, pemasaran pendidikan memiliki karakteristik tersendiri karena tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis dan peningkatan jumlah peserta didik, tetapi juga berorientasi pada dakwah dan penyebaran nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pemasaran harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, amanah, transparansi, dan pelayanan yang berkualitas.

Menurut Ahmad Qurtubi (2025), pemasaran pendidikan Islam harus dilaksanakan secara profesional dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai teologis dan etika Islam. Strategi branding, promosi, dan komunikasi pemasaran harus mampu mencerminkan identitas keislaman lembaga sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar Islam yang berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai lembaga pendidikan Islam, MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman.

Di tengah meningkatnya jumlah lembaga pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya menghadapi tantangan untuk tetap mempertahankan eksistensi dan meningkatkan daya saingnya. Kondisi tersebut menuntut madrasah untuk menerapkan strategi pemasaran pendidikan yang efektif agar mampu menarik minat masyarakat serta meningkatkan jumlah peserta didik setiap tahunnya.

Keberhasilan strategi pemasaran pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menawarkan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program-program unggulan yang dimiliki oleh suatu

lembaga pendidikan dapat menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan lembaga tersebut dari lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan yang inovatif dan berkualitas menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran pendidikan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang baru bagi lembaga pendidikan untuk melakukan pemasaran secara lebih luas. Media sosial, website, dan berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi yang efektif dalam memperkenalkan program-program pendidikan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pendidikan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan lembaga pendidikan dalam membangun citra positif di era digital saat ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep pemasaran pendidikan yang diterapkan oleh MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui strategi pemasaran yang digunakan oleh madrasah dalam menarik minat masyarakat serta mengidentifikasi berbagai program pendidikan yang menjadi keunggulan madrasah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pemasaran pendidikan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pengembangan bagi lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan daya saing dan kualitas layanan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai konsep pemasaran pendidikan yang diterapkan di MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara langsung dari sumber data sehingga dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai strategi pemasaran pendidikan serta program-program pendidikan yang menjadi unggulan madrasah.

Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti

berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sementara itu, Moleong (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Penelitian ini dilaksanakan di MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya yang beralamat di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakteristik dan strategi tersendiri dalam memasarkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, madrasah ini juga memiliki berbagai program pendidikan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pemasaran pendidikan di MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Adapun subjek penelitian meliputi Kepala Madrasah, guru, dan staf administrasi yang dianggap mengetahui dan memahami strategi pemasaran pendidikan yang diterapkan oleh madrasah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemasaran pendidikan di MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya, seperti kegiatan promosi, pelaksanaan program unggulan, pelayanan kepada masyarakat, serta aktivitas lain yang mendukung pemasaran pendidikan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah didirikan pada tanggal 06 Juni 2010, berdasarkan hasil rapat akhir Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan panitia Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Terletak di Jalan Pendidikan No. 32, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blang pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya . Sekolah ini terdaftar di bawah naungan

Kemendikdasmen dengan NPSN 69725273 menjadi satu-satunya MIS Unggul di daerah Aceh Barat Daya

Dengan visi mewujudkannya siswa yang berilmu, berakhlak mulia, mampu menghafal Juz ‘Amma, Ayat Pilihan, Do’a Pilihan, Hadits Pilihan dan mampu menguasai kata-kata dasar Bahasa Arab diharapkan lulusan MI Muhammadiyah Abdya bisa menciptakan siswa yang meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

1. Strategi Pemasaran Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Aceh Barat Daya

Strategi promosi sekolah di MI Muhammadiyah Abdya dilakukan untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat serta menarik minat calon peserta didik baru. Promosi dilakukan melalui penyebaran informasi secara langsung kepada masyarakat melalui mulut kemulut atau sosialisasi masyarakat, Promosi juga aktif dilakukan melalui sosial media mereka yaitu Instagram, kepala sekolah mengatakan dalam wawancara bahwa sebisa mungkin sekolah membangun branding di sosial media agar selalu bisa lebih unggul dimata masyarakat.

Selain itu, sekolah juga meningkatkan kualitas pelayanan dan pembelajaran agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sekolah. Dengan adanya strategi promosi yang baik, sekolah dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat.

Strategi pemasaran pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan program dan layanan pendidikan kepada masyarakat sehingga mampu menarik minat calon peserta didik serta membangun citra positif lembaga. Di tengah persaingan lembaga pendidikan yang semakin kompetitif, pemasaran pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemasaran pendidikan di MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, promosi dilakukan secara langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*). Strategi ini dinilai efektif karena informasi yang disampaikan berasal dari pengalaman dan penilaian masyarakat

terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat, sekolah dapat membangun hubungan yang lebih dekat sehingga informasi mengenai keberadaan dan keunggulan sekolah dapat tersebar secara luas.

Selain promosi secara langsung, MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya juga memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana pemasaran pendidikan. Media sosial digunakan untuk mempublikasikan berbagai kegiatan sekolah, program unggulan, prestasi peserta didik, serta aktivitas pembelajaran yang berlangsung di lingkungan sekolah. Kepala sekolah menyampaikan bahwa pihak sekolah berupaya membangun *branding* yang kuat melalui media sosial agar sekolah memiliki nilai lebih dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Sarohmad (2024) yang menyatakan bahwa media sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pemasaran pendidikan modern karena mampu memperluas jangkauan informasi, membangun citra lembaga, dan meningkatkan interaksi antara sekolah dengan masyarakat. Melalui media sosial, lembaga pendidikan dapat memperkenalkan identitas dan keunggulan sekolah secara lebih efektif kepada calon peserta didik maupun orang tua.

Upaya membangun *branding* yang dilakukan oleh MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya juga menunjukkan pentingnya citra lembaga dalam pemasaran pendidikan. Menurut Qurtubi (2025), *branding* pendidikan merupakan proses membangun identitas dan keunggulan lembaga agar memiliki posisi yang kuat di tengah persaingan pendidikan. Citra positif yang dibangun melalui publikasi kegiatan, prestasi, dan kualitas layanan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Selain promosi dan *branding*, MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya juga meningkatkan kualitas pelayanan dan pembelajaran sebagai bagian dari strategi pemasaran pendidikan. Sekolah berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik dan orang tua serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar masyarakat merasa puas terhadap layanan pendidikan yang diberikan. Strategi ini menunjukkan bahwa pemasaran pendidikan tidak hanya dilakukan melalui promosi, tetapi juga melalui peningkatan mutu pendidikan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sari dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pemasaran pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Lembaga yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas akan memperoleh kepercayaan masyarakat sehingga lebih mudah menarik minat calon peserta didik baru.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran pendidikan yang diterapkan oleh MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial Instagram, pembangunan *branding* sekolah, serta peningkatan kualitas pelayanan dan pembelajaran. Strategi tersebut menjadi upaya penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menarik minat calon peserta didik untuk memilih MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya sebagai lembaga pendidikan.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru di MI Muhammadiyah Abdy dilakukan setiap tahun ajaran baru dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti: mengambil formulir pendaftaran, minimal usia 6 tahun, menyerahkan berkas informasi calon siswa (Akta kelahiran, KK, pas foto serta ijazah bila ada).

Setelah penyerahan berkas dan formulir yang sudah diisi, pihak sekolah selanjutnya melakukan tes untuk calon siswa baru dan orang tua calon siswa baru, hal ini membuat sekolah mengetahui langsung minat siswa sendiri atau kemauan orang tua agar calon siswa bersekolah disana Adapun tes yang dilakukan adalah tes baca tulis, tes wawancara dan tes baca tulis Quran.

Tahun ini sudah ada lebih dari 100 orang calon siswa yang mendaftar akan tetapi karna tingginya minat yang mendaftar serta ruang kelas yang tidak mencukupi sekolah membatasi untuk kuota pertahun yaitu max 65 siswa dimana setiap angkatan dibagi dalam 2 atau 3 kelas yang ditentukan dengan maksimal 1 kelas berjumlah 28 siswa. Kepala Sekolah dalam wawancara mengatakan tidak ada sistem zonasi untuk saat ini karna banyaknya minat permintaan masuk calon siswa baru di sekolah tersebut bahkan ada beberapa siswa berasal dari daerah Babahrot.

3. Kesiswaan

Dalam wawancara yang dilakukan bersama kepala sekolah saat ini jumlah siswa di MI Muhammadiyah berjumlah 371 orang siswa yang terbagi dalam 6 angkatan dan terbagi lagi menjadi 2 hingga 3 kelas per angkatan. Dimana satu kelas memuat maksimal 28 orang siswa dan minimal 24 orang siswa. Untuk tahun ini ada 3 kelas dimana 2 ruang kelas diisi 26 siswa dan satu kelasnya diisi 27 siswa. Sedangkan untuk tahun lalu 2 kelas dan tahun yang akan datang berjumlah 3 kelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya, jumlah peserta didik saat ini mencapai 371 siswa yang tersebar pada enam tingkat kelas. Setiap tingkatan terdiri atas dua hingga tiga rombongan belajar. Adapun jumlah siswa dalam satu kelas berkisar antara 24 hingga 28 orang. Pada tahun ajaran berjalan, peserta didik baru dibagi ke dalam tiga kelas, dengan dua kelas masing-masing berjumlah 26 siswa dan satu kelas berjumlah 27 siswa. Sementara pada tahun sebelumnya hanya terdiri dari dua kelas, sedangkan pada tahun ajaran mendatang direncanakan kembali menjadi tiga kelas. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya.

Peningkatan jumlah peserta didik tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan strategi pemasaran pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan promosi, tetapi juga oleh kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Semakin banyak masyarakat yang memilih suatu lembaga pendidikan, maka semakin besar pula tanggung jawab sekolah untuk menjaga kualitas proses pembelajaran agar tetap efektif dan kondusif.

Jumlah peserta didik dalam setiap kelas yang berkisar antara 24 hingga 28 orang menunjukkan bahwa MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya telah menerapkan pengelolaan kelas yang relatif ideal. Jumlah siswa yang tidak terlalu banyak memungkinkan guru untuk memberikan perhatian yang lebih optimal kepada setiap peserta didik, baik dalam aspek akademik maupun pembinaan karakter. Selain itu, kondisi tersebut juga mendukung terciptanya interaksi yang lebih efektif antara guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas yang efektif sangat dipengaruhi oleh jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar. Jumlah siswa yang proporsional akan memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, melakukan pengawasan, memberikan bimbingan individual, serta menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Dengan demikian, kualitas pembelajaran dapat berjalan secara maksimal dan berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah maksimal 28 peserta didik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jumlah peserta didik di MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Kesesuaian ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga mutu pembelajaran sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh madrasah.

Dengan demikian, jumlah peserta didik yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta pengelolaan rombongan belajar yang sesuai dengan standar pendidikan menunjukkan bahwa MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya tidak hanya berhasil dalam menerapkan strategi pemasaran pendidikan, tetapi juga mampu menjaga kualitas layanan pembelajaran yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi masyarakat.

4. Program Pendidikan di MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya

MI Muhammadiyah Aceh Barat daya menggunakan 2 kurikulum pembelajaran sehingga lulusan MI Muhammadiyah ini lulus dengan 2 ijazah sekaligus, Kurikulum umum yaitu kurikulum merdeka dan kurikulum pengembangan diri, dimana kurikulum merdeka memuat mata pelajaran umum seperti MI pada umumnya. Adapun mata pelajaran yang digunakan adalah: Pendidikan Agama Islam (Aqidah Akhlak, Qur'an Hadits, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)), PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni budaya, PJOK, Bahasa Arab serta

muatan lokal seperti Bahasa Inggris, TIK dan kemuhammadiyah (ISMUBA=Islam keMUhammadiyah Bahasa Arab).

Kurikulum Pengembangan diri yaitu pilihan yang ditetapkan untuk seluruh kelas dalam pelaksanaannya setara dengan 2 jam pelajaran. Kurikulum ini memuat beberapa jenis pengembangan diri seperti:

- a. Hafalan Juz 'Amma (Surat-surat Pendek)
- b. Do'a-do'a Pilihan
- c. Hadits Pilihan
- d. Ayat Pilihan
- e. Pembiasaan diri.

Jenis pembiasaan diri yang telah ditetapkan terdiri dari: Pembiasaan Pengucapan Kalimat Tayyibah, Pembiasaan Kesopanan dan Ketaatan, Pembiasaan Kedisiplinan dan Tanggung Jawab, Pembiasaan Kebersihan dan Kerapian, Pembiasaan Kerajinan dan Kesungguhan, Pembiasaan Kejujuran dan Kemandirian, Pembiasaan Kepemimpinan dan Kerjasama.

Sedangkan untuk Program Pendukung Pendidikan, sekolah menyediakan beberapa program ekstrakurikuler yang dilakukan setelah jam sekolah selesai, mulai dari keolahragaan sampai akademik. Beberapa ekstrakurikuler yang disediakan:

- a. Bidang olahraga :Sepak bola, voli, bulu tangkis, silat, tapak suci, dll
- b. English club
- c. Arab club
- d. Math club
- e. Tahfidz yang dilakukan saat jam istirahat
- f. Pramuka

MI Muhammadiyah Aceh Barat daya ini menuntun siswanya harus bisa menguasai Bahasa Inggris dan Bahasa Arab serta lulusan harus bisa menguasai hafalan 2 juz Quran untuk syarat kelulusan yaitu Juz 29 dan 30.

Program pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam pemasaran pendidikan karena menjadi produk utama yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan kepada masyarakat. Semakin unik dan berkualitas program yang dimiliki

suatu sekolah, maka semakin besar peluang sekolah tersebut memperoleh kepercayaan dan minat masyarakat. Dalam konsep pemasaran pendidikan, program unggulan menjadi salah satu faktor yang membedakan suatu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya menerapkan dua kurikulum pendidikan, yaitu Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Pengembangan Diri. Penerapan dua kurikulum ini menjadi salah satu keunggulan madrasah dalam mengembangkan kemampuan akademik, spiritual, dan karakter peserta didik secara seimbang.

Kurikulum Merdeka yang diterapkan memuat mata pelajaran umum sebagaimana yang berlaku pada madrasah ibtidaiyah pada umumnya, seperti Pendidikan Agama Islam yang meliputi Aqidah Akhlak, Al-Qur'an Hadits, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), serta mata pelajaran umum seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Bahasa Arab, serta muatan lokal yang terdiri dari Bahasa Inggris, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Kemuhammadiyahan (ISMUBA). Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kompetensi akademik yang sesuai dengan standar pendidikan nasional sekaligus memperkuat identitas keislaman dan kemuhammadiyahan peserta didik.

Selain Kurikulum Merdeka, MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya juga menerapkan Kurikulum Pengembangan Diri yang dilaksanakan setara dengan dua jam pelajaran pada setiap jenjang kelas. Program ini meliputi hafalan Juz 'Amma, doa-doa pilihan, hadits pilihan, ayat-ayat pilihan, serta berbagai bentuk pembiasaan diri. Adapun pembiasaan yang diterapkan meliputi pembiasaan pengucapan kalimat *tayyibah*, kesopanan dan ketaatan, kedisiplinan dan tanggung jawab, kebersihan dan kerapian, kerajinan dan kesungguhan, kejujuran dan kemandirian, serta kepemimpinan dan kerja sama.

Program pengembangan diri tersebut menunjukkan bahwa MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan yang

berkualitas harus mampu mengembangkan tiga aspek utama peserta didik, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Oleh karena itu, pembiasaan nilai-nilai positif dan penguatan pendidikan karakter perlu menjadi bagian integral dari proses pendidikan di sekolah.

Program unggulan lainnya yang menjadi daya tarik MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya adalah penguasaan Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Tahfidz Al-Qur'an. Berdasarkan hasil wawancara, peserta didik ditargetkan mampu menguasai Bahasa Inggris dan Bahasa Arab sebagai bekal menghadapi perkembangan global sekaligus memahami sumber-sumber ajaran Islam. Selain itu, setiap peserta didik diwajibkan menghafal Al-Qur'an sebanyak dua juz, yaitu Juz 29 dan Juz 30, sebagai salah satu syarat kelulusan. Program ini menjadi ciri khas sekaligus nilai tambah yang membedakan MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya dengan sekolah dasar lainnya.

Untuk mendukung pengembangan potensi peserta didik, sekolah juga menyediakan berbagai program ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah jam pembelajaran berakhir. Program tersebut meliputi bidang olahraga seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis, silat, dan Tapak Suci, serta bidang akademik dan pengembangan bahasa seperti English Club, Arab Club, Math Club, Tahfidz Al-Qur'an, dan Pramuka. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, serta keterampilan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Sari dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa dalam pemasaran pendidikan, program unggulan merupakan bagian dari produk pendidikan (*educational product*) yang menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan. Sekolah yang memiliki program unggulan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat dibandingkan lembaga pendidikan yang tidak memiliki keunggulan khusus.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa program unggulan MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya terletak pada penerapan dua kurikulum secara terpadu, penguatan pendidikan karakter melalui kurikulum pengembangan diri, penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, serta program Tahfidz Al-Qur'an dengan target hafalan dua juz sebagai syarat kelulusan. Keunggulan program tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya sekaligus menjadi strategi pemasaran pendidikan yang efektif dalam menarik minat calon peserta didik baru.

KESIMPULAN

Strategi pemasaran pendidikan yang diterapkan oleh MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya dilakukan melalui berbagai pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menarik minat calon peserta didik. Strategi tersebut meliputi sosialisasi langsung kepada masyarakat, promosi dari mulut ke mulut (*word of mouth*), pemanfaatan media sosial khususnya Instagram sebagai media publikasi sekolah, pembangunan *branding* lembaga, serta peningkatan kualitas pelayanan dan pembelajaran. Keberhasilan strategi pemasaran tersebut terlihat dari tingginya kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan jumlah peserta didik yang mencapai 371 siswa dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, pengelolaan jumlah peserta didik dalam setiap kelas yang sesuai dengan standar pendidikan turut mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.

Program pendidikan yang menjadi keunggulan MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya terdiri atas penerapan dua kurikulum, yaitu Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Pengembangan Diri. Kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan kompetensi akademik peserta didik, sedangkan Kurikulum Pengembangan Diri diarahkan pada penguatan nilai-nilai keislaman dan pembentukan karakter melalui program hafalan Al-Qur'an, doa-doa pilihan, hadits pilihan, ayat pilihan, serta berbagai pembiasaan positif. Selain itu, madrasah memiliki program unggulan berupa penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab serta program Tahfidz Al-Qur'an dengan target hafalan Juz 29 dan Juz 30 sebagai syarat kelulusan. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler di bidang akademik, keagamaan, dan olahraga juga menjadi sarana pengembangan bakat dan minat peserta didik. Dengan demikian, kombinasi antara strategi pemasaran yang efektif dan program pendidikan yang unggul menjadi faktor utama yang mendukung eksistensi serta daya saing MI Muhammadiyah Aceh Barat Daya di tengah persaingan lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dachlian Nurdiana, D. (2025). *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Pendidikan*. STAIHA Press. ISBN 978-634-96268-3-5.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). California: Sage Publications.
- Miswari, Mufidah, & Alpaten, U.A.A. (2025). *Manajemen Pemasaran Pendidikan (Strategi dan Implementasi di Sekolah)*. CV Dunia Penerbitan Buku. ISBN 978-634-7475-39-8.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2023). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qurtubi, A. (2025). *Manajemen Pemasaran Pendidikan Islam*. Padang: CV Luminary Press Indonesia.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Ridwan, I.M., & Febriani, H. (2024). "Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di Pesantren Persis 84 Tingkat Mu'allimin/Aliyah." *Al-Ibanah*, 9(1), 19–30.
- Sari, W., Abidin, Z., Damanik, S., Aswan, & Hasibuan, R.I. (2025). *Manajemen Pemasaran Pendidikan Islam*. PT Sonpedia Publishing Indonesia. ISBN 978-623-514-632-4.
- Sarohmad. (2024). *Strategi Pemasaran Pendidikan Islam*. Tulungagung: Literasi Nusantara.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

PERKEMBANGAN MORAL DAN SPIRITUAL PESERTA DIDIK

Hermanita¹

¹ STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya

herma300386@gmail.com¹

Abstrak

Berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama sering sekali terjadi didalam masyarakat khususnya disekolah, perilaku yang menyimpang tersebut banyak sekali terlihat seperti pergaulan bebas, tindak kekerasan, dan rendahnya rasa hormat terhadap orang tua serta guru yang menjadi indikasi nyata bahwa perkembangan moral dan spiritual peserta didik belum berlangsung secara optimal. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari seluruh komponen pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan bukan sekadar sebagai makhluk biologis, melainkan sebagai makhluk yang memiliki dimensi rohani dan moral yang tinggi. Allah Swt menganugerahkan fitrah kepada setiap manusia, yakni potensi dasar untuk mengenal kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Perkembangan peserta didik merupakan kajian yang sangat fundamental dalam dunia pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Di antara berbagai aspek perkembangan manusia, perkembangan moral dan spiritual menempati posisi yang amat sentral. Hal ini dikarenakan kedua aspek tersebut menjadi pijakan utama dalam pembentukan karakter, kepribadian, dan orientasi hidup seseorang sebagai individu yang beriman dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *Perkembangan Moral dan Spiritual Peserta Didik*

PENDAHULUAN

Perkembangan moral merupakan salah satu aspek perkembangan yang paling penting untuk diperhatikan dalam proses pendidikan karena berhubungan langsung dengan pembentukan karakter peserta didik. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia dengan karakter yang sangat baik atau suci, namun sesuai perkembangan dari individu tersebut fitrah itu dirusak oleh berbagai macam faktor. Oleh karena itu tugas utama pendidikan Islam adalah mengoptimalkan potensi fitrah tersebut agar berkembang secara harmonis. Kajian tentang perkembangan moral telah banyak

dilakukan oleh para ahli psikologi perkembangan. Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg memberikan kontribusi besar dalam memahami bagaimana penalaran moral manusia berkembang sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Sementara itu, kajian tentang perkembangan spiritual dikembangkan oleh James W. Fowler melalui teori tahap- tahap iman. Santrock menegaskan bahwa perkembangan moral dan spiritual yang sehat pada masa anak dan remaja merupakan prediktor kuat bagi kesejahteraan psikologis di masa dewasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Moral

Moral berasal dari bahasa Latin *mores*, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam konteks perkembangan manusia, moral merujuk pada seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Perkembangan moral dengan demikian dapat dipahami sebagai proses perubahan dan pertumbuhan kapasitas individu dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai moral sepanjang rentang kehidupannya (Desmita, 2009: 148). Lawrence Kohlberg mendefinisikan moral sebagai seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam hubungannya dengan sesama. Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral bukan hanya persoalan perilaku, melainkan menyangkut dimensi kognitif, bagaimana seseorang berpikir dan menalar tentang isu-isu moral. Penalaran moral menurutnya, berkembang secara hierarkis dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman individu.

Jean Piaget, sebagai pelopor kajian psikologi moral anak menyatakan bahwa perkembangan moral anak berkaitan erat dengan perkembangan kognitifnya. Menurut Piaget, anak bergerak dari tahap moralitas yang bersifat heteronom di mana aturan dipandang sebagai sesuatu yang mutlak menuju moralitas yang bersifat otonom di mana aturan dipahami sebagai kesepakatan sosial yang dapat berubah. perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial anak dengan teman sebayanya (Piaget, 1965: 56). Dalam perspektif Islam, perkembangan moral tidak dapat dipisahkan dari konsep akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Abuddin Nata (2010:87) menegaskan bahwa akhlak mulia merupakan manifestasi

keimanan yang paling nyata, sehingga pendidikan moral dalam Islam sesungguhnya adalah pendidikan akhlak yang berorientasi pada pembentukan insan kamil. Dengan demikian, standar moral dalam Islam bersifat transendental, melampaui sekadar konformitas terhadap norma sosial.

1. Teori Piaget tentang Perkembangan Moral

Jean Piaget membagi perkembangan moral anak menjadi dua tahap utama. Tahap pertama adalah tahap *moralitas heteronomous* (sekitar usia 4–7 tahun). Pada tahap ini anak memandang aturan sebagai sesuatu yang sakral, kaku, dan tidak dapat diubah. Anak menilai tindakan berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan, bukan berdasarkan niat pelakunya. Tahap kedua adalah *moralitas autonomous* (sekitar usia 8–11 tahun ke atas). Anak mulai memahami bahwa aturan merupakan kesepakatan sosial yang dapat diubah melalui persetujuan bersama, dan mulai mempertimbangkan niat dalam menilai perilaku (Piaget, 1965: 84). Santrock (2012: 291) menambahkan bahwa transisi antara kedua tahap moral Piaget ini sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosial anak, terutama interaksi dengan teman sebaya. Anak yang memiliki banyak pengalaman bernegosiasi dan berkompromi dengan teman sebayanya cenderung lebih cepat mencapai tahap moralitas *autonomous* dibandingkan anak yang terisolasi secara sosial.

2. Teori Kohlberg tentang Perkembangan Moral

Lawrence Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang lebih sistematis. Kohlberg membagi perkembangan moral ke dalam tiga tingkatan, yang masing-masing terdiri atas dua tahap, sehingga terdapat enam tahap secara keseluruhan. Pada tingkat *prakonvensional* (tahap 1–2), individu berpikir tentang moral berdasarkan hukuman dan hadiah. Perilaku baik adalah yang menghindarkan diri dari hukuman atau mendatangkan keuntungan pribadi. Pada tingkat *konvensional* (tahap 3–4), individu menyesuaikan perilakunya dengan harapan kelompok dan masyarakat. Moral didefinisikan sebagai ketaatan terhadap peraturan dan pemenuhan peran sosial (Kohlberg, 1981: 41). Sementara pada tingkat *pascakonvensional* (tahap 5–6), individu memahami moralitas secara abstrak berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang bersifat universal. Menurut Desmita (2009: 157), hanya sedikit orang yang benar-benar mencapai tahap keenam ini dalam kehidupan nyata.

B. Perkembangan Spiritual

Perkembangan spiritual merujuk pada proses pertumbuhan dan pematangan dimensi kerohanian individu, yang mencakup hubungannya dengan Tuhan, pencarian makna hidup, penghayatan nilai-nilai transendental, serta kemampuan merasakan dan merespons hal-hal yang bersifat suci dan ilahi. Yusuf (2011: 136) mendefinisikan perkembangan spiritual sebagai proses berkembangnya kemampuan individu untuk memaknai kehidupan dalam relasi dengan Yang Mahakuasa, sehingga melahirkan orientasi hidup yang transendental dan bermakna. Zakiah Daradjat menyatakan bahwa perkembangan keagamaan pada anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan pengalaman-pengalaman keagamaan yang diperoleh sejak dini.³ Rasa keagamaan pada anak tumbuh dan berkembang melalui proses yang panjang seiring perkembangan usia. Pendidikan agama yang diberikan sejak dini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan identitas keagamaan anak di masa dewasa (Daradjat, 2005: 67).

James W. Fowler mendefinisikan iman atau spiritualitas bukan semata-mata sebagai keyakinan terhadap suatu agama tertentu, melainkan sebagai cara seseorang memaknai kehidupan dan menemukan makna di balik berbagai peristiwa yang dialaminya. Fowler menekankan bahwa spiritualitas merupakan kebutuhan universal manusia yang melampaui batas-batas agama formal. Setiap manusia memiliki kapasitas untuk berkembang secara spiritual dalam perjalanan hidupnya (Fowler, 1981: 101). Dalam konteks pendidikan Islam, perkembangan spiritual tidak dapat dilepaskan dari penanaman nilai-nilai tauhid sejak dini. Abuddin Nata (2010: 112) menegaskan bahwa tauhid—keyakinan akan keesaan Allah Swt. merupakan fondasi utama spiritualitas Islami yang menjadi sumber kekuatan moral dan motivasi amal saleh seorang Muslim. James W. Fowler mengembangkan teori tahapan iman (*stages of faith*) yang terdiri atas enam tahap. Teori ini memberikan kerangka yang sangat berguna dalam memahami perjalanan spiritual seseorang dari masa bayi hingga dewasa lanjut (Fowler, 1981: 117).

1. Undifferentiated Faith (Usia 0–2 tahun); Pada tahap ini bayi mulai mengembangkan rasa kepercayaan, keberanian, dan cinta melalui relasi dengan pengasuh utama. Pengalaman dasar rasa aman dan kasih sayang

dari orang tua menjadi cikal bakal kemampuan beriman kepada yang transenden.

2. Intuitive-Projective Faith (Usia 2–7 tahun); Anak mulai mengembangkan imajinasi spiritual berdasarkan pengalaman langsung dan cerita-cerita keagamaan. Menurut Yusuf (2011: 140), pada tahap ini simbol-simbol religius memiliki daya pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan iman anak.
3. Mythic-Literal Faith (Usia 7–12 tahun); Anak mulai mengambil alih cerita, kepercayaan, dan nilai-nilai komunitas keagamaannya secara literal. Konsep Tuhan terbentuk sebagai figur yang adil, membalas kebaikan dengan pahala dan keburukan dengan hukuman.
4. Synthetic-Conventional Faith (Usia Remaja); Remaja mulai mengintegrasikan berbagai pengalaman keagamaan ke dalam suatu sistem kepercayaan yang kohesif, meskipun belum bersifat kritis. Iman sangat dipengaruhi oleh kelompok sebaya dan figur otoritas (Santrock, 2012: 301).
5. Individuative-Reflective Faith (Dewasa Muda); Individu mulai secara kritis memeriksa keyakinan yang selama ini dipegang. Iman bukan lagi sekadar warisan kelompok, melainkan menjadi keyakinan pribadi yang dimiliki secara sadar dan bertanggung jawab.
6. Conjunctive Faith dan Universalizing Faith (Dewasa Lanjut); Pada tahap-tahap akhir ini individu mampu merangkul kompleksitas, paradoks, dan kedalaman tradisi spiritual. Individu pada tahap tertinggi mampu menghidupi nilai-nilai spiritual secara radikal demi kebaikan universal.

C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Moral dan Spiritual

Muhibbin Syah menyatakan bahwa perkembangan moral dan spiritual peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang saling berinteraksi dalam membentuk karakter individu. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting bagi para pendidik agar dapat merancang lingkungan belajar yang kondusif.

1. Faktor Internal

Kematangan kognitif merupakan faktor internal utama yang memengaruhi perkembangan moral. Seperti telah dibuktikan oleh Piaget (1965: 91) dan Kohlberg (1981: 29), kapasitas berpikir individu menjadi syarat mutlak bagi berkembangnya penalaran moral yang lebih tinggi. Individu yang belum mencapai tahap operasional formal tidak akan mampu memahami prinsip-prinsip moral yang bersifat abstrak dan universal. Faktor emosional juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Kecerdasan emosional—kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan mengelola emosi—sangat berkorelasi dengan perkembangan moral dan spiritual. Muhibbin Syah (2013: 79) menegaskan bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosional tinggi cenderung lebih mampu menunjukkan empati, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor Eksternal

Lingkungan keluarga merupakan faktor eksternal yang paling utama dan paling berpengaruh. Daradjat (2005: 72) menegaskan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama di mana anak pertama kali mengenal nilai-nilai moral dan agama. Orang tua yang memberikan teladan yang baik dan menciptakan suasana rumah yang religius akan sangat mendukung perkembangan moral dan spiritual anak. Lingkungan sekolah juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Guru, sebagai figur otoritas dan teladan bagi peserta didik, memegang peranan strategis dalam membentuk karakter moral dan spiritual siswa. Yusuf (2011: 153) menyatakan bahwa suasana sekolah yang menghargai nilai kejujuran, keadilan, dan religiusitas akan menjadi konteks yang kondusif bagi berkembangnya moralitas dan spiritualitas peserta didik.

Lingkungan masyarakat dan kelompok sebaya turut memberikan pengaruh yang tidak kecil, terutama pada masa remaja. Santrock (2012: 316) menjelaskan bahwa pada fase remaja, pengaruh teman sebaya sering kali lebih dominan dibandingkan pengaruh orang tua dalam membentuk nilai-nilai dan orientasi moral individu. Media massa dan teknologi digital juga semakin berpengaruh dalam membentuk nilai-nilai dan orientasi moral generasi muda di era kontemporer ini.

D. Implikasi Perkembangan Moral dan Spiritual dalam Pendidikan Islam

Pemahaman tentang perkembangan moral dan spiritual peserta didik memiliki implikasi yang sangat besar terhadap praktik pendidikan Islam. Abuddin Nata (2010: 95) menegaskan bahwa pendidikan Islam yang tidak memperhatikan tahap-tahap perkembangan moral dan spiritual peserta didik cenderung menghasilkan lulusan yang hafal pengetahuan agama tetapi lemah dalam penghayatan dan pengamalannya.

Pertama, pendidikan moral dan spiritual harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Materi dan metode pengajaran akhlak serta agama perlu disesuaikan dengan kapasitas kognitif dan psikologis siswa pada setiap jenjang usia.

Kedua, keteladanan (*uswatun hasanah*) merupakan metode yang paling efektif dalam pendidikan moral dan spiritual. Daradjat (2005: 80) menegaskan bahwa guru dan orang tua dituntut menjadi model nyata dari nilai-nilai yang diajarkan, karena anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dan rasakan.

Ketiga, penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif sangat penting. Sekolah Islam idealnya menciptakan atmosfer yang kaya dengan nilai-nilai Islami, di mana shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, dan pembiasaan akhlak mulia menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Keempat, dialog dan refleksi moral perlu difasilitasi dalam pembelajaran. Yusuf (2011: 158) menyatakan bahwa peserta didik perlu diberi ruang untuk mendiskusikan dilema-dilema moral dan mengeksplorasi nilai-nilai keagamaan secara kritis agar perkembangan moral dan spiritual yang terjadi bersifat otentik dan personal.

Kelima, kolaborasi antara sekolah dan keluarga merupakan faktor kunci keberhasilan pendidikan moral dan spiritual. Muhibbin Syah (2013: 83) menekankan pentingnya sinergi antara keduanya untuk memastikan konsistensi nilai-nilai moral dan spiritual yang ditanamkan kepada peserta didik.

KESIMPULAN

Perkembangan moral adalah proses pertumbuhan kapasitas individu dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral yang terjadi secara bertahap seiring perkembangan kognitif dan pengalaman sosialnya sedangkan perkembangan spiritual merupakan proses dinamis yang bersifat kontinu. Peserta didik mulai belajar memahami eksistensi diri, menghargai nilai-nilai non-materiil, mengembangkan keyakinan keagamaan/adat istiadat, serta merefleksikan makna hidup mereka di dunia. Perkembangan moral dan spiritual juga merupakan proses internalisasi nilai-nilai kebaikan, norma sosial, dan kesadaran hakikat hidup yang membentuk karakter peserta didik yang keduanya membekali siswa dengan kemampuan pengambilan keputusan yang etis, empati sosial, dan kesadaran dalam memahami tujuan hidup saat bermasyarakat. Pemahaman Moral dan spiritual anak akan berkembang seiring bertambahnya usia dan kapasitas kognitif mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Fowler, James W, *Stages of Faith: The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning*. New York: HarperOne, 1981.
- Kohlberg, Lawrence, *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. San Francisco: Harper & Row, 1981.
- Jean Piaget, *The Moral Judgment of the Child*. New York: Free Press, 1965.
- Santrock, John W, *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, Terj.
- Benedictine Widiasinta. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Muhibbin Syah., *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Pernikahan Jarak Jauh di Era Digital: Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Indonesia

Rizki Ananda Putri¹, Misrah Alaina², Tanzilul Autar³

^{1,2} STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya

riskianandaputri19@gmail.com¹,

misrahalaina262@gmail.com²

tanzilulauthar@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keabsahan pernikahan daring dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Secara fikih, nikah daring dapat dianggap sah bila memenuhi rukun dan syarat, termasuk kesinambungan ijab kabul dan kehadiran saksi. Namun, dalam hukum positif Indonesia, keabsahan nikah daring belum diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan maupun KHI, sehingga menimbulkan ketidakpastian pencatatan di KUA. KHI menekankan kesatuan majelis dan kehadiran saksi fisik, meski memberi ruang bagi perwakilan (taukil). Hal ini menunjukkan adanya dualisme antara norma syar'i dan administrasi negara, serta menekankan prinsip kehati-hatian demi menjaga tujuan syariat dan perlindungan keluarga.

Kata kunci: Islam, Positif, Nikah.

Abstract

This study examines the validity of online marriage in the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. In Islamic jurisprudence, online marriage may be valid if the essential pillars and conditions are fulfilled, including continuity of the contract and presence of witnesses. However, in Indonesian positive law, online marriage is not explicitly regulated in the Marriage Law or the Compilation of Islamic Law (KHI), creating uncertainty in official registration. KHI emphasizes unity of session and physical presence of witnesses, while allowing representation (taukil). This reflects a dualism between sharia norms and state administration, highlighting the principle of caution to preserve the objectives of sharia and family protection.

Keywords: Islam, Positive, Marriage

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menuntun perilaku masyarakat sesuai dengan ajarannya. Sebagai pedoman hidup, Islam memberikan arahan yang selaras dengan fitrah manusia yang memiliki dimensi beragam. Naluri seksual dan kebutuhan akan keturunan diatur melalui tuntunan yang berbudaya, yaitu penghormatan terhadap keluarga lewat ikatan pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, bahwa pembentukan keluarga harus ditempuh melalui perkawinan. Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersepakat membangun kehidupan bersama sebagai suami istri, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak serta dilandasi cinta dan kasih sayang (Sunny, 2017, sebagaimana dikutip dalam Sabir, 2021, p. 1).

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang merambah ke ranah privat, sakralitas pernikahan kini diperhadapkan pada fenomena baru, yaitu pernikahan secara daring atau online. Persoalan ini memicu perdebatan krusial mengenai syarat 'satu majelis' (ittihadul majlis) dalam ijab kabul, yang secara tradisional dipahami sebagai pertemuan fisik secara langsung. Jika Islam menuntun manusia untuk hidup berbudaya dan terhormat melalui pernikahan, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah esensi ikatan lahir batin dan ketentuan syariat tetap terpenuhi dalam ruang virtual? Hal inilah yang memicu urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai sah atau tidaknya nikah online dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dipandang melalui landasan ketaqwaan kepada Allah serta pengabdian terhadap sesama manusia demi tercapainya tujuan hidup yang hakiki. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yang diwujudkan dalam proses pra-nikah dan pengucapan ijab kabul pada akad nikah, serta ditampilkan pula dalam dimensi sosial melalui penyelenggaraan walimah sebagai bagian dari tradisi pernikahan (Saebani, 2021, pp. 5–10).

Esensi dari ijab kabul dan walimah sebagai 'front sosial' bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk persaksian atas ketaqwaan dan tanggung jawab manusia di hadapan Allah dan sesama. Namun, ketika ruang fisik tempat akad dilaksanakan beralih ke ruang digital (virtual), muncul tantangan teologis dan yuridis mengenai keabsahan persaksian tersebut. Jika ketaqwaan dan pengabdian menjadi

pondasi, apakah medium teknologi mampu menjamin integritas 'ikatan lahir batin' tersebut tanpa kehadiran fisik secara utuh? Hal inilah yang menempatkan praktik nikah online dalam diskursus yang kompleks: di satu sisi ia menawarkan solusi bagi hambatan jarak, namun di sisi lain ia mempertaruhkan syarat ittihadul majlis (kesatuan majelis) yang selama ini menjadi pilar utama keabsahan sebuah akad dalam Islam.

Hukum perkawinan di Indonesia dijamin serta diatur melalui Undang-Undang Perkawinan. Regulasi pokoknya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disertai aturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Prinsip-prinsip Islam mengenai perkawinan, perceraian, hibah, dan warisan berakar dari khazanah fikih klasik berbagai mazhab, yang kemudian dirangkum serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum ini diharapkan menjadi pijakan bagi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan maupun urusan keluarga. Meski demikian, dalam praktik sosial sering muncul persoalan baru yang bersifat ijtihadi, karena belum terdapat regulasi khusus yang mengatur secara rinci akibat dinamika dan konsekuensi logis dari arus globalisasi (Novita, 2018, pp. 43–52).

Karakter Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman menuntut adanya solusi atas beragam persoalan modern, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Dalam konteks Indonesia, keabsahan sebuah pernikahan tidak cukup hanya berlandaskan hukum agama (syariat), tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji serta membandingkan kedudukan pernikahan tersebut melalui perspektif hukum Islam dan perangkat hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur klasik maupun kontemporer yang relevan dengan isu pernikahan daring.

HASIL

1. Legitimasi Syariat dan Hukum Positif.

Pernikahan jarak jauh (daring) sah menurut syariat Islam apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, termasuk ijab kabul yang dilakukan secara sah meski melalui media elektronik. Namun, dari perspektif hukum positif Indonesia, keabsahan pernikahan daring masih menimbulkan perdebatan karena belum diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

2. Keterhubungan Fikih Klasik dengan Praktik Modern.

Fikih klasik tidak mengenal praktik pernikahan jarak jauh, tetapi prinsip ijtihad memungkinkan adaptasi terhadap teknologi komunikasi modern. Hal ini menunjukkan karakter Islam yang responsif terhadap perubahan zaman.

3. Kendala Regulasi Nasional.

Regulasi hukum positif Indonesia belum secara rinci mengakomodasi praktik pernikahan daring. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan jarak jauh di Kantor Urusan Agama (KUA).

4. Implikasi Sosial dan Budaya.

Walimah sebagai simbol sosial pernikahan tetap dapat dilaksanakan meski akad dilakukan secara daring, namun menimbulkan pergeseran makna tradisi dalam masyarakat.

Gambar 1. Skema Perbandingan Kedudukan Pernikahan Jarak Jauh dalam Fikih dan Hukum Positif Indonesia.

No.	Aspek yang Dikaji	Perspektif Fikih Islam	Perspektif Hukum Positif Indonesia
1.	Keabsahan Ijab Kabul	Sah jika memenuhi syarat rukun nikah	Belum diatur secara eksplisit dalam UU
2.	Pencatatan Perkawinan	Tidak diwajibkan dalam fikih klasik	Wajib dicatat di KUA sesuai UU
3.	Walimah Nikah	Sunnah sebagai simbol sosial	Tradisi sosial tetap dijalankan
4.	Penggunaan Teknologi	Dapat diterima melalui ijtihad	Belum ada regulasi khusus

PEMBAHASAN

A. Pro Kontra Pelaksanaan Nikah Melalui Daring atau Virtual.

Saat ini, telepon dapat dipandang sebagai kebutuhan pokok manusia sekaligus sarana komunikasi jarak jauh selain telegraf dan internet, yang berfungsi menghubungkan individu satu dengan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telepon adalah perangkat yang menggunakan listrik dan kabel untuk memungkinkan komunikasi serta pertukaran informasi antara dua orang yang berada di lokasi berbeda. Jenis telepon sendiri dapat dikategorikan, antara lain telepon genggam, telepon koin, dan telepon seluler. Meskipun sebagian jenis sudah jarang digunakan, terdapat satu yang paling populer, yakni telepon pintar (handphone) yang menawarkan layanan, fitur gambar, serta beragam aplikasi modern yang menarik dan canggih (Tim Penyusun Pusat Bahasa 2008, 1659).

Transformasi fungsi telepon dari sekadar alat bertukar suara menjadi perangkat pintar yang serba bisa telah mengubah pola interaksi manusia secara fundamental, termasuk dalam ranah hukum keluarga. Kecanggihan fitur audio-visual pada smartphone saat ini memungkinkan individu untuk melintasi batas ruang secara real-time, yang kemudian memicu lahirnya praktik pernikahan jarak jauh atau nikah online. Kehadiran teknologi ini tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu informasi, melainkan telah menjadi 'ruang pertemuan baru' yang menantang definisi tradisional mengenai kehadiran fisik dalam sebuah akad nikah yang sakral. Hal ini memunculkan urgensi untuk meninjau kembali, apakah kecanggihan aplikasi dan layanan visual tersebut sudah cukup untuk memenuhi standar keabsahan sebuah pernikahan di mata agama dan negara.

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat komunikasi daring maupun melalui telepon menjadi semakin canggih. Jika dahulu percakapan hanya sebatas mendengar suara, kini telepon telah dilengkapi dengan fitur gambar, aplikasi, serta fasilitas video dan layar sehingga pengguna dapat saling melihat wajah maupun tampilan visual. Di Indonesia, praktik pernikahan dengan memanfaatkan fasilitas video pertama kali tercatat pada tahun 2006 (Syarif Abdurrahman & Dewi Tarumawati, n.d.). Seiring waktu, pelaksanaan pernikahan melalui media telepon atau video tidak lagi semata-mata karena keadaan darurat, melainkan juga dipandang

lebih praktis dan efisien dibandingkan harus mempertemukan seluruh unsur pernikahan dalam satu lokasi.

Oleh karena itu, Nikah Internet atau Nikah Maya (daring maupun virtual) seperti telepon dalam konteks bahasa, yaitu akad nikah dilakukan melalui telekomunikasi melalui suara atau biasa disebut telepon. Secara umum nikah lewat telepon adalah nikah yang dilakukan oleh beberapa orang yang memungkinkan terjadinya pernikahan, dan mereka berada dalam situasi terpencil, beberapa di antaranya biasanya tidak dilakukan dalam hal syarat dan rukun pernikahan menurut hukum yang berlaku. Sehingga perlu adanya proses perkawinan atau proses ijab kabul melalui telekomunikasi suara.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, masalah pernikahan pada umumnya mencakup masalah-masalah sebelum menikah (*muqaddimat al-nikah*) hingga urusan berumah tangga. Di sini terlihat atensi ulama fikih terhadap masalah tersebut meskipun hal-hal dalam pernikahan tidak terlepas dari perdebatan atau ikhtilaf.

Apabila seluruh syarat dan rukun nikah terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah dan mengikat secara hukum. Mayoritas ulama (*jumhur*) berpendapat bahwa rukun nikah terdiri atas empat unsur, yaitu adanya ijab kabul atau *sighat*, keberadaan calon suami, calon istri, serta wali. Sementara itu, menurut mazhab Hanafiyah, rukun nikah hanya mencakup ijab dan kabul (al-Zuhaili, 2002, p. 6521).

Meski ahli hukum islam (ulama) tidak membahas pernikahan daring atau virtual melalui telepon, beberapa hal dapat ditentukan dari perspektif hukum, yaitu masalah persyaratan persetujuan dan kehadiran saksi.

1. Syarat Ijab dan Kabul

Adapun ketentuan ijab dan kabul meliputi:

- a. Calon mempelai pria maupun wanita harus sudah *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk).
- b. Prosesi ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis.
- c. Tidak terdapat kontradiksi makna antara ucapan ijab dan kabul.
- d. Lafaz yang digunakan harus memenuhi syarat, di antaranya memakai bentuk kata kerja lampau (*madi*), menggunakan istilah yang menunjukkan pernikahan seperti *al-tazwij* atau *al-nikah* (Hanafiyah,

n.d.), serta menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

- e. Ucapan ijab kabul harus terdengar jelas oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Sabiq, t.th, p. 22).

Dalam praktik pernikahan melalui telepon, salah satu isu yang menimbulkan perdebatan adalah mengenai kesatuan antara ijab dan kabul. Kesatuan majelis dimaknai sebagai tidak adanya jeda atau pemisahan oleh ucapan lain maupun aktivitas di luar akad nikah. Menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, meskipun pengucapan kabul tidak dilakukan segera setelah ijab—misalnya calon suami terdiam cukup lama sebelum menyatakan kabul—selama tidak terdapat interupsi berupa ucapan asing atau kegiatan lain, maka akad nikah tetap dianggap sah (Sabiq, n.d., p. 23).

Menurut pandangan Syafi'iyah dan Malikiyah, lafaz kabul wajib diucapkan segera setelah ijab selesai (al-Zuhaili, n.d., p. 6536). Artinya, tidak boleh ada jeda waktu di antara keduanya, karena adanya interval dianggap sebagai indikasi bahwa kedua mempelai tidak menyetujui akad yang telah dilaksanakan.

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa apabila jeda antara ijab dan kabul tidak berlangsung terlalu lama, maka sighat akad tetap dianggap sah (al-Zuhaili, n.d., p. 6536). Sebaliknya, mazhab Syafi'iyah lebih ketat dalam hal ini dan tidak menerima adanya jeda panjang, karena hal tersebut dapat diartikan sebagai tanda ketidaksetujuan dari pihak mempelai pria terhadap akad yang telah diucapkan.

Dari beberapa sudut pandang tersebut, kesatuan syarat ijab dan kabul menekankan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. sehingga kedua belah pihak dapat menunjukkan kesediaan dan pengakuan bersama dalam akad nikah. Oleh karena itu, meskipun perkawinan dengan menggunakan media telepon tidak mempertemukan kedua belah pihak, tetap dianggap sah jika memenuhi standar kesinambungan waktu Ijab dan Kabul. Jika ada masalah dalam proses Ijab dan Kabul, seperti operator telepon terputus koneksi antara Ijab dan Kabul atau tiba-tiba terputus, maka menandatangani kembali kontrak harus tetap berpegang pada pendapat Syafi'iyah dan lebih berhati-hati sangat ditekankan pada pandangan ini.

Pada masa Nabi, praktik perkawinan yang tidak mempertemukan pihak-pihak akad dalam satu tempat juga sudah dikenal dan berlangsung dari waktu ke waktu.

Perbedaannya, pada saat itu digunakan sistem perwakilan atau media tertulis yang dibawa oleh seorang utusan (al-mukātabah). Dalam praktik tersebut, salah satu pihak menuliskan pernyataan persetujuan dengan tangannya sendiri, lalu menyerahkannya kepada utusan untuk diberikan kepada calon mempelai wanita. Sebelum surat tersebut dikembalikan oleh utusan, pihak wanita atau walinya kemudian menuliskan pernyataan penerimaan sebagai bentuk persetujuan akad (Abu Zahrah, 1971, p. 81).

2. Kehadiran Saksi.

Para ulama fikih memiliki pandangan berbeda terkait kedudukan saksi dalam pernikahan. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal menempatkan saksi sebagai syarat sahnya nikah, sedangkan Imam Syafi'i menganggapnya sebagai salah satu rukun nikah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa menghadirkan saksi saat akad berlangsung hukumnya sunnah (al-Muhalli, 1995, p. 52). Dalam praktik pernikahan pada umumnya, kehadiran saksi menjadi keharusan agar akad nikah sah, baik sebagai bentuk tausi'q maupun ta'kid, sehingga saksi dapat memberikan keterangan bila muncul persoalan. Dalam konteks pernikahan melalui telepon, keberadaan saksi memberikan peran penting sebagai pengawas sekaligus penguat keabsahan akad.

Dalam kasus pernikahan telepon, pemisahan para pihak dalam akad atau kontrak akan menyebabkan ketidaksetaraan dalam kesaksian.

Sejumlah ulama fikih, seperti mazhab Hanafiyah, berpendapat bahwa dalam pernikahan yang dilakukan di lokasi berbeda—misalnya melalui surat—saksi wajib mengetahui isi surat sekaligus menyaksikan proses penerimaannya. Dalam praktik semacam ini, Hanafiyah tidak mensyaratkan kedua saksi berada di dua tempat sekaligus. Sebagai contoh, apabila pihak pertama mengirimkan utusan kepada pihak kedua di lokasi lain, maka keberadaan saksi di pihak kedua sudah dianggap cukup, yakni untuk mendengar ucapan ijab dari utusan dan menyaksikan penerimaan ijab oleh pihak wanita (al-Zuhaili, n.d., p. 6531).

Kewajiban menghadirkan dua orang saksi sebagai syarat sahnya pernikahan didasarkan pada sebuah hadis yang menegaskan hal tersebut (Ibnu Hibban, n.d., hadis Aisyah RA).:

عدل و شاهدي بولي إلا ذكاح لا

Mazhab Syafi'iyah menafsirkan bahwa penyebutan “dua saksi” menunjukkan keharusan adanya saksi sebagai syarat sahnya akad nikah. Jika ketentuan tersebut

tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal. Kehadiran saksi dimaksudkan agar mereka dapat menyaksikan secara langsung ucapan ijab dan kabul, serta memastikan adanya persetujuan kedua belah pihak, meskipun mereka tidak mendengar secara rinci jumlah mahar yang disebutkan (al-Syarbaini, n.d., p. 248).

Dalam perspektif hukum Islam, mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah menolak validitas kesaksian yang hanya bersumber dari pendengaran tanpa adanya penglihatan langsung terhadap prosesi ijab kabul. Kalangan Syafi'iyah secara spesifik menekankan urgensi metode al-mu'ayanah, di mana seorang saksi diwajibkan untuk menyaksikan akad secara fisik guna memastikan keselarasan antara suara dan identitas pelaku akad, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak hanya berpijak pada aspek audial namun juga wajib diperkuat secara visual (al-Syarbaini, n.d., p. 249)

Dalam perspektif hukum Islam, kehadiran saksi bukan hanya formalitas, melainkan instrumen penting untuk menjamin keabsahan akad nikah. Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah menolak kesaksian yang hanya berbasis pendengaran karena berpotensi menimbulkan keraguan terhadap identitas pihak yang berakad. Oleh sebab itu, Syafi'iyah menekankan metode al-mu'āyanah, yakni saksi harus menyaksikan secara langsung prosesi akad. Kehadiran fisik saksi memungkinkan verifikasi ganda:

- Audial: memastikan ucapan ijab dan kabul benar-benar diucapkan.
- Visual: memastikan identitas pihak yang berakad sesuai dengan ucapan yang terdengar.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian akad nikah tidak hanya bertumpu pada aspek suara, tetapi juga diperkuat oleh penglihatan langsung. Hal ini penting untuk mencegah manipulasi, kesalahan identitas, atau keraguan yang mungkin timbul dalam praktik pernikahan jarak jauh.

Guna menjamin keabsahan akad, selain penambahan saksi, dapat dilakukan mekanisme taukil (pemberian kuasa) kepada pihak lain untuk mewakili hak wali maupun mempelai pria. Apabila opsi tersebut tidak memungkinkan, penggunaan teknologi konferensi video menjadi solusi alternatif yang efektif. Melalui media virtual, seluruh pihak termasuk para saksi dapat memvalidasi proses ijab kabul secara langsung dan transparan. Legalitas pernikahan via panggilan video ini pun telah diakui oleh lembaga fatwa Mesir serta Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di

Indonesia (Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011, diakses 20 Maret 2021).

Para ulama menetapkan rukun nikah sebagai standar keabsahan secara syar'i, sementara UU Perkawinan di Indonesia lebih menekankan pada aspek administratif dan prosedural. Hal ini terlihat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatur kesepakatan mempelai serta batas usia minimal 19 tahun. Meskipun rincian rukun tidak termaktub secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang, negara tetap memvalidasi keabsahan pernikahan melalui Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, p. 76). Undang-Undang Perkawinan tidak menguraikan secara rinci mengenai rukun perkawinan seperti ijab kabul maupun kedudukan saksi sebagai syarat keabsahan nikah. Eksistensi saksi justru baru disinggung secara implisit dalam ranah pembatalan perkawinan; di mana ketiadaan dua orang saksi atau pelaksanaan di hadapan pejabat pencatat yang tidak berwenang dapat menjadi alasan hukum untuk membatalkan ikatan pernikahan tersebut (Tim Redaksi Nuansa Aulia, n.d., p. 83).

Bahwa perbedaan orientasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya dualisme dalam penentuan keabsahan perkawinan. Ulama menetapkan rukun nikah sebagai fondasi syar'i yang harus dipenuhi agar akad sah secara agama, sedangkan negara melalui UU Perkawinan lebih menekankan aspek administratif seperti kesepakatan mempelai dan batas usia minimal. Walaupun undang-undang tidak merinci rukun nikah, Pasal 2 ayat (1) tetap memberikan legitimasi dengan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa negara mengakui otoritas agama dalam menentukan keabsahan akad, sementara aspek administratif berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial dan pencatatan resmi untuk kepastian hukum.

Apabila terdapat kekosongan pengaturan mengenai syarat perkawinan dalam undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi standarisasi persyaratan tersebut dengan merujuk sepenuhnya pada khazanah fikih klasik. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan norma dalam KHI tetap mempertahankan konsistensi substansial dengan literatur hukum Islam tradisional dalam menetapkan kriteria sahnya sebuah perkawinan (Syarifuddin, 2007, p. 84).

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai jembatan antara hukum positif Indonesia dan tradisi fikih klasik. Ketika undang-undang perkawinan tidak secara rinci mengatur syarat-syarat sahnya akad, KHI hadir dengan mengadopsi standar dari khazanah fikih tradisional, sehingga tetap menjaga konsistensi substansial dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui KHI tidak menciptakan norma baru yang terlepas dari akar syar'i, melainkan meneguhkan otoritas fikih sebagai sumber utama dalam menetapkan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, KHI berperan penting dalam memastikan bahwa praktik perkawinan di Indonesia tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam ranah administratif.

Regulasi mengenai ijab dan kabul dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terakomodasi secara komprehensif pada Pasal 27, 28, dan 29. Khusus pada Pasal 27, KHI mengadopsi konsensus mayoritas fuqaha yang menekankan bahwa prosesi ijab dan kabul antara wali nikah dengan mempelai pria wajib dilaksanakan secara berkesinambungan atau tanpa adanya interupsi waktu (Tim Redaksi Nuansa Aulia, n.d., p. 9). Lebih lanjut, Pasal 28 dan Pasal 29 KHI memberikan ruang bagi mekanisme perwakilan (taukil) baik dalam hak perwalian maupun pemberian kuasa oleh mempelai pria apabila akad tidak dapat dihadiri secara langsung. Kendati terdapat fleksibilitas perwakilan tersebut, kerangka hukum ini tetap menghendaki adanya kesatuan majelis yang nyata. Implikasinya, praktik ijab dan kabul yang dilakukan pada lokasi yang berbeda—seperti melalui media telepon—dinilai tidak memenuhi kriteria tersebut dan tidak dapat dilegitimasi secara hukum (Alimuddin, 2011, p. 67).

Ternyata regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan pentingnya kesatuan majelis dalam prosesi ijab dan kabul sebagai syarat sahnya akad. Pasal 27 jelas mengadopsi pandangan mayoritas ulama yang menolak adanya jeda atau interupsi, sementara Pasal 28 dan 29 memang memberi ruang bagi mekanisme perwakilan. Namun, fleksibilitas tersebut tetap dibatasi oleh prinsip kesatuan majelis, sehingga praktik akad yang dilakukan di lokasi berbeda, seperti melalui media telepon, tidak memenuhi standar yang ditetapkan KHI. Hal ini menunjukkan bahwa KHI berusaha menjaga otentisitas hukum Islam klasik sekaligus memastikan keabsahan akad nikah tetap konsisten dengan syariat.

Diskursus mengenai pernikahan melalui media telepon di Indonesia sempat memicu perdebatan publik, khususnya pada kasus yang melibatkan keluarga Prof. Dr. Baharuddin Harahap. Meskipun kontroversial, Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 1751/P/1989 akhirnya menetapkan keabsahan akad tersebut. Legalitas pernikahan ini diambil setelah Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan koordinasi dan musyawarah mendalam dengan sejumlah pemuka agama serta otoritas dari Departemen Agama wilayah Jakarta (*Fakhria, 2009, p. 10, diakses dari hukumonline.com, 12 Mei 2021*).

Terkait aspek pembuktian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merefleksikan kecenderungan pada mazhab Syafi'i yang mensyaratkan kehadiran fisik saksi dalam prosesi akad. Kewajiban saksi bukan sekadar menyaksikan secara langsung (perceptual), melainkan juga melingkupi aspek administratif berupa penandatanganan akta nikah pada saat majelis akad berlangsung (Tim Redaksi Nuansa Aulia, n.d., p. 8).

Berarti putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait kasus pernikahan melalui telepon menunjukkan adanya fleksibilitas hukum dalam merespons fenomena sosial yang baru muncul. Meskipun praktik tersebut menimbulkan kontroversi, pengadilan tetap mengesahkan akad setelah melakukan musyawarah dengan tokoh agama dan otoritas terkait, sehingga keputusan memiliki legitimasi moral dan administratif. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap menegaskan pentingnya kehadiran saksi secara fisik, tidak hanya untuk menyaksikan prosesi ijab kabul secara langsung, tetapi juga untuk memastikan aspek administratif melalui penandatanganan akta nikah. Hal ini menegaskan bahwa meskipun pengadilan dapat memberikan ruang interpretasi, KHI tetap berpegang pada prinsip klasik Syafi'iyah demi menjaga keabsahan dan kekuatan pembuktian akad nikah.

B. Analisis Kaidah Hukum.

Mengingat syariat Islam sangat menitikberatkan pada perlindungan kehormatan (hifz al-'ird) dan keselamatan jiwa, maka prinsip kehati-hatian (ihtiyat) menjadi pilar utama dalam hukum perkawinan dibandingkan jenis perikatan lainnya dalam Al-Qur'an. Urgensi pernikahan harus selaras dengan misi kenabian dalam mewujudkan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), yakni menjaga martabat manusia agar tidak terjebak dalam eksploitasi nafsu serta melindungi institusi keluarga dari

praktik manipulasi atau penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Rofiq, 2001, p. 105).

Dengan demikian, hukum perkawinan dalam Islam memiliki posisi yang sangat istimewa dibandingkan bentuk perikatan lainnya karena menyangkut perlindungan kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan keselamatan jiwa. Prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) menjadi pilar utama agar akad nikah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga terjamin dari sisi moral dan sosial. Dengan menekankan kehati-hatian, syariat berusaha memastikan bahwa pernikahan benar-benar memenuhi tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yakni menjaga martabat manusia dan menghindarkan mereka dari eksploitasi hawa nafsu.

Selain itu, urgensi pernikahan juga harus dipahami sebagai bagian dari misi kenabian dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keluarga yang kokoh. Kehadiran prinsip kehati-hatian mencegah praktik manipulasi atau penipuan yang dapat merusak institusi keluarga. Dengan demikian, hukum perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan yang menjaga integritas individu dan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan privat, melainkan institusi yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan akad nikah dalam perspektif hukum Islam sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan ulama, khususnya terkait ijab kabul, kesatuan majelis, serta kehadiran saksi. Sementara itu, regulasi di Indonesia melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan adanya integrasi antara norma syar’i dan aspek administratif negara, sehingga pernikahan tidak hanya sah secara agama tetapi juga memiliki kepastian hukum. Diskursus mengenai praktik pernikahan jarak jauh, seperti melalui telepon, memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara fikih klasik dan regulasi modern, namun tetap menekankan prinsip kehati-hatian demi menjaga tujuan syariat dan perlindungan institusi keluarga.

Sebagai rekomendasi, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian komparatif antara praktik pernikahan jarak jauh di berbagai negara muslim dengan regulasi nasional, sehingga diperoleh gambaran lebih luas mengenai adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi komunikasi dalam konteks akad nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Sabir, Muhammad dkk. 2021. *Problematisa Isu-isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Kaaffah Learning Center. Hlm:1-16.

Ashsubli. Muhammad. "*Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama* (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum* 3.2 (2015).

Abu Zahrah. Muhammad. *Muhadarat fi aqd al-Zawaj wa Asaruhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.

Ahmad, Amrullah. dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. 11: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama Makassar*: Alauddin University Press, 2011

Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Assyaukanie, Luthfi. *Politik, Ham, dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung Pustaka Hidayah, 1998.

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. 2006

Fakhria, Ela Lacla. *Bukit Surat Elektronik dalam Pembuktian Perdata*. Bandung PT Alumni, 2009. Jiunduh dan e-book www.hukumonline.com pada tanggal 12 desember 2012

Figh Faizah, Niswatul. "PERKAWINAN ANTAR AGAMA ("Perbandingan dan Fikih Kontemporer")" *Jurnal Pro Justice:Kajian Hukum dan Sosial* 1.1 (2019): 91-100.

Febrianti, Ismaniasita Nur. Hari Yuliarso, and Leny Pramesti "PENERAPAN ARSITEKTUR KONTEMPORER DALAM PERANCANGAN PUSAT JASA PERNIKAHAN DI BEKASI. *Senthong* 1.1 (2018).

- Husain bin Muhammad al-Muhalli. *Al-Iḥṣāh fī Aqdi al-Nikah 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. Suriah: Dar al-Qalam al-'Arabi, 1995.
- LESTARI, Novita. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2018. 4.1. 43-52
- Muhaimin, Abd Wahab Abd. "PROBLEMATIKA KONTEMPORER PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DAN KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM." *Al Qalam* 27.2 (2010)
- Nuruddin. Amiar dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. III, Jakarta Kencana, 2006.
- Sabiq. Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2. Kairo: al-Fath li al-l'lam al-Arabi, t.th.
- Sain, Asrizal. "STATUS PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional Dan Fiqh Kontemporer." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.2 (2014): 181-190.
- SAEBANI, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Pustaka Setia, 2021.
- SUNY, Ismail. Hukum Islam dalam Hukum Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017, 17.4: 351-357.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. II: Jakarta: Kencana, 2007.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad. *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Mesir: Maktabah al-Taufiqiyyah, t.th.
- Al-Qurtubi, Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Cet. IV; Suriah: Dar al-Fikr. 2002.

PERANAN SISTEM INFORMASI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH BARAT DAYA

Zakie Abdillah¹

¹STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya

¹Zakieabdillah07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan system informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan langkah langkah penelitian diawali dengan observasi, perumusan masalah, penentuan sample, instrument, pengumpulan data dan analisis data untuk menentukan hasil dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa dengan adanya Sistem Informasi Manajemen dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan dalam hal ini dibuktikan dimana kehadiran SIM bisa menjadi sarana yang membantu pekerjaan baik dalam perihal tenaga, waktu, sarana, maupun biaya. Sehingga tujuan dan sasaran pekerjaan bisa terwujud sesuai dengan harapan dan waktu penyelesaian yang tepat. Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sampai dengan saat ini sudah sangat aktif dalam pemanfaatan Sistim Informasi Manajemen dan ini juga berdampak sangat baik dalam keberlangsungan pencapaian visi dan misi instansi / Lembaga

Kata kunci: Sistim Informasi Manajemen, Efisiensi dan Efektifitas kerja, Kinerja

Abstract

This research aims to determine the role of information systems in improving the efficiency and effectiveness of performance at the Regional Library and Archives Service of Southwest Aceh Regency. The type of research used is qualitative research by carrying out research steps starting with observation, problem formulation, determining samples, instruments, collecting data and data analysis to determine the results of the research. Based on the research results, it is stated that the existence of a Management Information System in carrying out work activities can increase the efficiency and effectiveness of work, in this case it is proven that the presence of a SIM can be a tool that helps work both in terms of

energy, time, facilities and costs. So that work goals and objectives can be realized according to expectations and the right completion time. Up to now, the Regional Library and Archives Service has been very active in utilizing the Management Information System and this has also had a very good impact on the continued achievement of the agency/institution's vision and mission.

Keywords: *Management Information Systems, Work Efficiency and Effectiveness, Performance*

PENDAHULUAN

Kantor merupakan tempat berinteraksi dan berkumpulnya orang-orang yang mempunyai visi, misi yang sama dan tujuan sehingga terbentuklah suatu organisasi. Suatu kantor akan ditata dan dikelola dengan memperhatikan bagian-bagian dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, setiap bagian akan mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan sistem informasi ikut berkembang menjadi lebih canggih dan berdampak positif bagi masyarakat luas termasuk instansi pemerintah negeri maupun swasta. Organisasi menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan mendasar dan telah menjadi sumber daya penting yang harus dikelola dengan baik. Dengan demikian, adanya teknologi dan sistem informasi akan memudahkan untuk memperoleh informasi dengan melakukan pengolahan data dengan lebih cepat, akurat, efektif dan efisien. Tegasnya informasi digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif.

Sistem Informasi Manajemen memiliki peran dan manfaat yang signifikan antara fasilitas pengolahan data dengan pegawai sebagai pengguna, dimana keterkaitan antara satu unit dengan unit lainnya akan saling terintegrasi dalam proses pengumpulan data, pemrosesan data, penyimpanan data, umpan balik data, serta pendistribusian data internal dan eksternal organisasi / Lembaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peranan sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat Daya. Penelitian

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi nyata pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung kinerja organisasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Daya. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian meliputi kepala dinas, pegawai, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penggunaan sistem informasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat Daya.

Adapun objek penelitian adalah sistem informasi yang digunakan serta peranannya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung penggunaan sistem informasi dalam aktivitas pelayanan dan administrasi.
2. Wawancara, dilakukan secara mendalam kepada informan kunci untuk memperoleh data terkait pemanfaatan sistem informasi, hambatan, serta dampaknya terhadap kinerja.
3. Dokumentasi, berupa pengumpulan data dari arsip, laporan, pedoman kerja, dan dokumen lain yang relevan dengan sistem informasi dan kinerja organisasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan:

1. Reduksi data, yaitu memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi agar mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian terkait peranan sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

HASIL

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat Daya, diketahui bahwa pemanfaatan sistem informasi telah diterapkan dalam berbagai aktivitas administrasi dan pelayanan. Sistem informasi yang digunakan berperan dalam membantu pengelolaan data arsip, pelayanan perpustakaan, penginputan data administrasi, serta penyusunan laporan kerja pegawai.

Penerapan sistem informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat Daya memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas kerja pegawai. Pegawai menjadi lebih mudah dalam melakukan pengelolaan data, pencarian arsip, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan sistem informasi juga membantu mempercepat proses pelayanan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih tepat waktu.

Hasil wawancara dengan beberapa pegawai menunjukkan bahwa sebelum adanya sistem informasi, pengelolaan data dan arsip masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan berisiko terjadinya kesalahan pencatatan. Namun setelah penggunaan sistem informasi, proses kerja menjadi lebih terstruktur dan akurat.

Adapun hasil penelitian mengenai peranan sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Peranan Sistem Informasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai

No	Uraian	Dampak yang Dirasakan	Keterangan
1	Pengolahan data administrasi	Proses lebih cepat dan akurat	Efisien
2	Pengelolaan arsip digital	Memudahkan pencarian dokumen	Efektif
3	Pelayanan perpustakaan	Pelayanan kepada masyarakat lebih baik	Efektif
4	Penyusunan laporan kerja	Menghemat waktu dan tenaga	Efisien
5	Penyimpanan data	Data lebih aman dan terorganisir	Efektif

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa sistem informasi juga membantu meningkatkan koordinasi antarpegawai karena data dapat diakses secara lebih mudah dan cepat. Pemanfaatan teknologi informasi menjadikan pekerjaan administrasi lebih tertata serta mengurangi penggunaan dokumen fisik yang berlebihan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapan sistem informasi, seperti keterbatasan kemampuan sebagian pegawai dalam mengoperasikan teknologi serta gangguan jaringan internet yang terkadang menghambat proses pelayanan. Namun hambatan tersebut dapat diatasi melalui pelatihan penggunaan sistem informasi serta peningkatan sarana dan prasarana teknologi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat Daya. Kehadiran sistem informasi mampu membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat, tepat, dan terorganisir. Hal ini sejalan dengan pendapat Azhar (2017) yang menyatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sarana yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi.

Pemanfaatan sistem informasi pada instansi ini terlihat dari penggunaan aplikasi administrasi dan pengelolaan arsip digital yang memudahkan pegawai dalam melakukan pencatatan data, penyimpanan dokumen, dan pencarian informasi. Sebelum penggunaan sistem informasi, sebagian besar pekerjaan dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Setelah penerapan sistem informasi, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien karena data tersimpan secara sistematis dan mudah diakses kembali.

Efisiensi kerja terlihat dari penghematan waktu, tenaga, dan biaya operasional. Pegawai tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk mencari arsip atau menyusun laporan karena semua data telah tersimpan dalam sistem. Selain itu,

penggunaan sistem informasi juga membantu mengurangi penggunaan kertas dalam proses administrasi sehingga lebih hemat dan tertata.

Efektivitas kerja juga mengalami peningkatan karena pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan akurat. Sistem informasi membantu pegawai dalam memberikan layanan perpustakaan dan pengarsipan secara lebih profesional. Informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diperoleh dengan mudah sehingga kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem informasi manajemen memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Menurut Kern (1990), pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas kerja karena proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, penerapan sistem informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat Daya telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pegawai.

Namun demikian, dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi serta gangguan jaringan internet. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan fasilitas yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem informasi secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi juga perlu dilakukan agar sistem informasi dapat berjalan secara optimal dan mendukung pencapaian visi dan misi instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Susanto. 2017. *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Pengembangannya*. Bandung: Lingga Jaya.
- Davis, Gordon B. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Jogiyanto. 2017. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Kern, Jerome. 1990. *Management Information Systems and Organizational Performance*. New York: McGraw Hill.

Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. 2018. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. New Jersey: Pearson Education.

Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Adi. 2011. *Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Sutabri, Tata. 2012. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusup, Pawit M. 2016. *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

PERAN EDUKATIF 'AISYAH R.A. SEBAGAI SUMBER ILMU PADA MASA KENABIAN: KAJIAN HISTORIS

Safran¹

¹STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya

¹safranmag230@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran edukatif 'Aisyah r.a. sebagai sumber ilmu pada masa kenabian melalui pendekatan historis. Sebagai istri Rasulullah SAW dan salah satu periwayat hadis terbanyak, 'Aisyah memiliki posisi strategis dalam pendidikan Islam awal, khususnya dalam penyampaian ajaran Nabi kepada umat. Kajian ini bertujuan untuk menelusuri kontribusi intelektual 'Aisyah dalam bidang hadis, fikih, dan pendidikan, serta perannya sebagai guru bagi para sahabat dan generasi setelahnya. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan sejarah pendidikan Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa 'Aisyah tidak hanya berperan sebagai pelaku sejarah, tetapi juga sebagai agen pendidikan yang aktif dalam membentuk tradisi keilmuan Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya sosok perempuan dalam peradaban ilmu pengetahuan Islam sejak masa kenabian.

Kata kunci: 'Aisyah r.a., pendidikan Islam, sejarah pendidikan, hadis, perempuan dalam Islam

PENDAHULUAN

Perempuan dalam Islam memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu (Wadud, 1999). Salah satu figur utama dalam sejarah Islam yang menonjol dalam bidang ini adalah 'Aisyah r.a. (Ibn Sa'd, t.th.), istri Rasulullah SAW. Sebagai istri Nabi, sahabat, dan perawi hadis, 'Aisyah memegang posisi yang sangat strategis dalam penyebaran ilmu keislaman, terutama pada masa kenabian. Kajian ini bertujuan untuk menggali peran edukatif 'Aisyah secara historis serta menyoroti kontribusinya dalam membentuk tradisi intelektual Islam awal.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang intelektual dan sosial 'Aisyah r.a.?
2. Apa saja bentuk kontribusi 'Aisyah r.a. dalam bidang pendidikan dan penyebaran ilmu pada masa Rasulullah SAW?
3. Bagaimana pandangan para ulama dan sejarawan terhadap peran edukatif 'Aisyah?

Beberapa kajian sebelumnya menyoroti peran perempuan dalam pendidikan Islam, namun belum banyak yang secara khusus mengulas 'Aisyah sebagai pusat keilmuan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengayaan literatur sejarah pendidikan Islam, khususnya yang berfokus pada tokoh perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian historis. Data diperoleh melalui studi pustaka dari literatur primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab hadis, tafsir, sejarah Islam klasik, serta kajian akademik kontemporer.

HASIL

Latar Belakang 'Aisyah r.a.

'Aisyah binti Abu Bakar r.a. adalah istri Rasulullah SAW yang terkenal dengan kecerdasan, daya ingat tajam, dan keaktifannya dalam berdiskusi dengan Nabi (Ibn Sa'd, t.th.). Ia menikah dengan Rasulullah pada usia muda dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat menjunjung tinggi ilmu (Shihab, 2007).

Peran sebagai Sumber Ilmu

1. Periwat Hadis: 'Aisyah meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis (Al-Bukhari, 2002), menjadikannya salah satu dari enam sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.
2. Rujukan Fikih: banyak sahabat besar seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Urwah bin Zubair belajar darinya (Al-Zurqani, 2003).
3. Konsultan Keilmuan: ia sering memberikan fatwa dan pendapat hukum dalam berbagai isu sosial dan agama.
4. Pendidikan Perempuan: 'Aisyah menjadi simbol penting bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas untuk berperan dalam dunia keilmuan (Barlas, 2002).

Setelah menikah dengan Rasulullah saw., Aisyah memperoleh kesempatan yang tidak dimiliki oleh para sahabat lainnya, yaitu mendampingi Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kedekatan tersebut menjadikan beliau sebagai saksi langsung terhadap berbagai peristiwa, ibadah, akhlak, dan kebiasaan Rasulullah saw., baik yang

dilakukan di hadapan para sahabat maupun di dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, Aisyah menjadi salah satu perawi hadis terbanyak dan sumber utama pengetahuan Islam, terutama mengenai kehidupan pribadi Rasulullah.

Karakteristik Metode Edukatif 'Aisyah

1. Dialogis dan Kritis: ia aktif berdialog dengan Rasulullah, bahkan sering mengajukan pertanyaan kritis.
2. Transformatif: ilmu yang ia sampaikan tidak hanya informatif, tetapi membentuk pola pikir umat.
3. Aksesibel: ilmunya dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan tanpa pembatasan, menunjukkan keterbukaan pendidikan Islam.

Kedudukan 'Aisyah sebagai Sumber Ilmu pada Masa Kenabian

Pada masa kenabian, Aisyah r.a. memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyebaran ilmu. Sebagai Ummul Mukminin, beliau tidak hanya menjadi pendamping Rasulullah, tetapi juga menjadi tempat bertanya bagi para sahabat mengenai berbagai persoalan agama. Setelah Rasulullah wafat, peran tersebut semakin tampak karena banyak sahabat senior maupun generasi tabi'in datang untuk meminta penjelasan mengenai hadis, hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, dan persoalan ibadah.

Allah Swt. memberikan penghormatan khusus kepada istri-istri Nabi melalui firman-Nya:

“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu berupa ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabi). Sungguh Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.”

(QS. Al-Ahzab [33]: 34)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa rumah Rasulullah merupakan pusat pendidikan Islam. Aisyah menjadi salah satu tokoh utama yang menerima, memahami, dan kemudian menyampaikan kembali ilmu yang diperolehnya kepada umat.

PEMBAHASAN

Para ulama sepakat bahwa Aisyah termasuk perempuan paling alim dalam sejarah Islam. Keilmuannya tidak terbatas pada periwayatan hadis, tetapi juga meliputi berbagai cabang ilmu, sebagaimana diuraikan berikut.

Ilmu Hadis

Aisyah meriwayatkan sekitar 2.210 hadis, sehingga beliau termasuk dalam kelompok sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis (al-Muktsirun). Hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak berkaitan dengan ibadah, akhlak, muamalah, kehidupan keluarga, serta berbagai persoalan hukum Islam.

“Seandainya ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh istri Nabi dan seluruh perempuan, niscaya ilmu Aisyah lebih utama.”

(Imam Az-Zuhri)

Pernyataan ini menunjukkan tingginya pengakuan para ulama terhadap kapasitas intelektual Aisyah.

Ilmu Fikih

Aisyah dikenal sebagai seorang mujtahidah dari kalangan sahabat. Banyak sahabat yang meminta fatwa kepadanya ketika menghadapi persoalan hukum yang belum mereka pahami.

“Tidaklah kami mengalami kesulitan dalam memahami suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah, melainkan kami mendapatkan penjelasan darinya.”

(Abu Musa Al-Asy'ari)

Beliau memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji, serta hukum keluarga berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.

Ilmu Tafsir

Aisyah juga memiliki kemampuan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan sebab turunnya ayat (asbabun nuzul) maupun konteks kehidupan Rasulullah. Karena kedekatannya dengan Nabi, beliau mengetahui banyak peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat Al-Qur'an.

Ilmu Akhlak dan Pendidikan

Aisyah menjadi teladan dalam pendidikan karakter. Beliau sering menjelaskan akhlak Rasulullah berdasarkan pengalaman langsung. Ketika Sa'ad bin Hisyam bertanya mengenai akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab:

“Akhlak beliau adalah Al-Qur'an.”

(HR. Muslim)

Jawaban tersebut menjadi dasar penting dalam konsep pendidikan Islam bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman utama pembentukan karakter seorang Muslim.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa 'Aisyah r.a. bukan hanya sekadar istri Nabi, tetapi juga seorang intelektual yang memainkan peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu Islam di masa kenabian. Kontribusinya menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam sejarah intelektual Islam. Jejak 'Aisyah menjadi warisan penting yang dapat menginspirasi penguatan peran perempuan dalam pendidikan Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. 2002. Sahih al-Bukhari, Kitab al-'Ilm, Bab Hifz al-'Ilm. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Zurqani. 2003. Sharh al-Muwatta', Jilid I. Kairo: Maktabah al-Thaqafah al-Diniyyah.
- Barlas, Asma. 2002. Believing Women in Islam. Austin: University of Texas Press.
- Ibn Sa'd. t.th. At-Tabaqat al-Kubra, Jilid VIII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Shihab, M. Quraish. 2007. Wawasan al-Qur'an. Bandung: Mizan.
- Wadud, Amina. 1999. Qur'an and Woman. New York: Oxford University Press.

TEORI BELAJAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM: KAJIAN KONSEPTUAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN

Zainal Abidin¹, Zahratul Muslimah²

^{1,2}STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya

zain.usm.82@gmail.com¹, zahratulmslmh@icloud.com²

Abstrak

Pendidikan Islam bertujuan tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis teori belajar dalam perspektif pendidikan Islam, karakteristiknya, serta relevansinya terhadap pembelajaran kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *library research* melalui penelaahan buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori belajar dalam pendidikan Islam mengintegrasikan aspek kognitif, spiritual, moral, emosional, dan sosial berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Sina. Teori tersebut tetap relevan dalam pendidikan modern karena mampu menyeimbangkan penguasaan ilmu pengetahuan dengan pembentukan karakter dan akhlak peserta didik.

Kata kunci: Teori Belajar; Pendidikan Islam; Pembelajaran.

Abstract

Islamic education aims not only to develop knowledge but also to cultivate learners with faith, noble character, and the ability to apply knowledge in daily life. This study analyzes learning theories from the perspective of Islamic education, their characteristics, and their relevance to contemporary educational practices. A qualitative approach using a library research design was employed through the review of books, scholarly journal articles, and relevant documents. Data were analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Islamic learning theories integrate cognitive, spiritual, moral, emotional, and social dimensions based on the Qur'an, Hadith, and the educational thoughts of Al-Ghazali, Ibn Khaldun, and Ibn Sina. These theories remain relevant in modern education by integrating knowledge acquisition with the development of learners' character and moral values.

Keywords: Learning Theory; Islamic Education; Learning.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia karena berperan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan,

sikap, dan nilai-nilai yang menjadi bekal individu dalam menjalani kehidupan. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya diarahkan pada pengembangan aspek intelektual, tetapi juga bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, proses pembelajaran dalam pendidikan Islam harus didasarkan pada teori belajar yang tidak hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi juga pembinaan karakter, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial peserta didik (Langgulang, 1980).

Konsep belajar dalam Islam memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar proses memperoleh pengetahuan. Belajar dipandang sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. sekaligus mengembangkan potensi manusia secara utuh. Pandangan tersebut tercermin dalam wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad saw., yaitu perintah membaca (*iqra'*) sebagaimana termuat dalam Q.S. Al-'Alaq [96]: 1–5. Ayat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas belajar merupakan fondasi utama dalam pembangunan peradaban Islam. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembentukan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman (Shihab, 2007).

Perkembangan ilmu pendidikan telah melahirkan berbagai teori belajar, seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Masing-masing teori memberikan penjelasan mengenai proses belajar dari sudut pandang yang berbeda. Namun, teori-teori tersebut umumnya berkembang dalam tradisi pemikiran Barat yang lebih menekankan dimensi psikologis, empiris, dan rasional. Dalam konteks pendidikan Islam, teori-teori tersebut tidak ditolak, melainkan perlu dikaji secara kritis dan diintegrasikan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis agar selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang bersifat holistik (Nata, 2016).

Al-Qur'an dan hadis menjadi landasan utama dalam membangun konsep belajar dalam Islam. Kedua sumber tersebut memberikan pedoman mengenai hakikat manusia, tujuan pendidikan, proses memperoleh ilmu, serta tanggung jawab moral dalam mengamalkan ilmu pengetahuan. Selain itu, para ulama dan cendekiawan Muslim telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori belajar. Al-Ghazali menekankan pentingnya penyucian hati, keteladanan pendidik, dan pembiasaan dalam pembentukan akhlak. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa

pembelajaran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, sedangkan Ibnu Sina menegaskan pentingnya penyesuaian metode pembelajaran dengan karakteristik dan potensi individu. Pemikiran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah memiliki landasan pedagogis yang komprehensif jauh sebelum berkembangnya teori pendidikan modern.

Di era globalisasi dan transformasi digital, dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan baru, seperti pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan karakteristik peserta didik, serta meningkatnya kebutuhan terhadap keterampilan abad ke-21. Kondisi tersebut menuntut proses pembelajaran yang tidak hanya menghasilkan peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki integritas, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, integrasi antara teori belajar modern dan nilai-nilai pendidikan Islam menjadi kebutuhan yang mendesak agar pembelajaran tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan orientasi spiritual dan etika (Muhaimin, 2009).

Meskipun kajian mengenai teori belajar telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada teori-teori belajar Barat atau hanya membahas pemikiran tokoh tertentu dalam pendidikan Islam. Kajian yang mengintegrasikan landasan normatif Al-Qur'an dan hadis, pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam, serta relevansinya terhadap praktik pembelajaran kontemporer masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kajian konseptual yang mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai teori belajar dalam perspektif pendidikan Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan sintesis konseptual mengenai teori belajar dalam pendidikan Islam dengan mengintegrasikan sumber-sumber normatif Islam, pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam klasik, serta relevansinya terhadap pembelajaran pada era modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam sekaligus menjadi referensi bagi pendidik dalam mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan kepribadian peserta didik secara utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *library research* (studi kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai teori belajar dalam perspektif pendidikan Islam berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya tokoh pendidikan Islam, seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Sina. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, prosiding, serta dokumen akademik yang berkaitan dengan teori belajar dan pendidikan Islam (Sugiyono, 2022; Zed, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan telaah kritis terhadap literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep utama, membandingkan berbagai pandangan para ahli, mengelompokkan temuan berdasarkan tema, serta menginterpretasikan hubungan antarkonsep untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis (Moleong, 2021). Untuk meningkatkan kredibilitas hasil kajian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian sehingga diperoleh sintesis yang lebih objektif dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa teori belajar dalam pendidikan Islam memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan teori belajar yang berkembang dalam tradisi pendidikan Barat. Perbedaan mendasar terletak pada orientasi pembelajaran. Teori belajar modern umumnya menekankan perubahan perilaku, pengembangan kemampuan berpikir, dan peningkatan kompetensi individu, sedangkan teori belajar dalam pendidikan Islam memandang proses belajar sebagai sarana memperoleh ilmu yang bermanfaat sekaligus membentuk kepribadian yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab kepada Allah Swt., diri sendiri, serta masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan belajar tidak hanya diukur melalui pencapaian akademik,

tetapi juga melalui perubahan sikap, karakter, dan kualitas moral peserta didik (Al-Attas, 1999).

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, penelitian ini mengidentifikasi empat temuan utama mengenai teori belajar dalam pendidikan Islam, yaitu: (1) hakikat belajar dalam Islam, (2) prinsip-prinsip teori belajar Islam, (3) kontribusi pemikiran tokoh pendidikan Islam, dan (4) relevansi teori belajar Islam terhadap pembelajaran kontemporer.

1. Hakikat Belajar dalam Pendidikan Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa belajar dalam Islam merupakan bagian dari ibadah yang bertujuan memperoleh ilmu yang bermanfaat serta mendekatkan diri kepada Allah Swt. Aktivitas belajar dipandang sebagai kewajiban setiap muslim tanpa dibatasi usia, jenis kelamin, maupun status sosial. Ilmu yang diperoleh tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, proses belajar dalam Islam berlangsung secara berkelanjutan (*lifelong learning*) dengan orientasi pada pembentukan insan yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia (Ibnu Khaldun, 2001).

2. Prinsip-Prinsip Teori Belajar dalam Pendidikan Islam

Analisis literatur menunjukkan bahwa teori belajar dalam pendidikan Islam dibangun atas beberapa prinsip utama, yaitu fitrah, keteladanan (*uswah hasanah*), pembiasaan (*ta'dib*), motivasi, pengembangan akal, dan pembentukan akhlak. Prinsip fitrah menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan potensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pengembangan aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, emosional, sosial, dan moral secara seimbang (Nata, 2016). Dengan demikian, pendidikan Islam menempatkan peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang secara utuh (*holistic education*).

3. Kontribusi Tokoh Pendidikan Islam terhadap Teori Belajar

Kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran para tokoh pendidikan Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori belajar. Al-Ghazali menekankan pentingnya penyucian hati, niat yang ikhlas, serta keteladanan pendidik sebagai fondasi keberhasilan proses belajar. Menurutnya, guru tidak hanya

berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing moral yang menjadi teladan bagi peserta didik (Al-Ghazali, 2011).

Sementara itu, Ibnu Sina berpendapat bahwa pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi psikologis, minat, bakat, dan tahap perkembangan peserta didik. Pemilihan metode pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik individu agar proses belajar berlangsung secara efektif dan mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik (Ibnu Sina, 1985).

Adapun Ibnu Khaldun menekankan bahwa pembelajaran hendaknya dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari materi yang sederhana menuju materi yang lebih kompleks. Menurutnya, penyampaian materi yang melampaui kemampuan peserta didik justru akan menghambat proses belajar dan menurunkan motivasi belajar. Oleh karena itu, kesiapan belajar menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran (Ibnu Khaldun, 2001).

4. Relevansi Teori Belajar Islam terhadap Pembelajaran Kontemporer

Hasil kajian memperlihatkan bahwa teori belajar dalam pendidikan Islam tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi perkembangan pendidikan modern. Beberapa konsep dalam teori belajar modern memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Misalnya, teori konstruktivisme yang menekankan keaktifan peserta didik dalam membangun pengetahuan sejalan dengan konsep *tafakkur* dan *tadabbur* dalam Islam. Demikian pula teori humanistik yang berorientasi pada pengembangan potensi individu memiliki kesamaan dengan konsep fitrah dalam pendidikan Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki orientasi yang lebih komprehensif karena tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Dengan demikian, teori belajar modern dapat diadopsi secara selektif selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis serta tetap mengarah pada tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, beramal saleh, dan berakhlak mulia (Muhaimin, 2009).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori belajar dalam pendidikan Islam memiliki karakteristik yang bersifat holistik karena tidak hanya berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, emosional, dan sosial peserta didik. Temuan ini menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam tidak berhenti pada transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan juga mencakup pembentukan kepribadian (*transfer of values*) yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur melalui capaian akademik, tetapi juga melalui perubahan sikap, akhlak, dan tanggung jawab peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Al-Attas (1999) yang menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan manusia yang beradab (*insān adabī*), yaitu individu yang mampu menempatkan ilmu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Perspektif ini memperlihatkan bahwa proses belajar dalam Islam memiliki dimensi ibadah sehingga aktivitas menuntut ilmu tidak hanya bertujuan memperoleh kompetensi akademik, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu, motivasi belajar dalam pendidikan Islam bersifat intrinsik dan transendental, berbeda dengan sebagian teori belajar modern yang lebih menekankan aspek psikologis maupun kebutuhan individual.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip fitrah menjadi salah satu fondasi utama dalam teori belajar Islam. Setiap peserta didik dipandang memiliki potensi, bakat, dan karakteristik yang berbeda sehingga proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tahap perkembangan masing-masing individu. Temuan ini memiliki relevansi dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi (*differentiated learning*) yang berkembang dalam pendidikan kontemporer. Perbedaannya terletak pada orientasi pendidikan Islam yang tidak hanya bertujuan mengembangkan kompetensi akademik, tetapi juga membina aspek spiritual dan moral peserta didik sebagai bagian dari pengembangan fitrah manusia.

Selain prinsip fitrah, keteladanan (*uswah hasanah*) merupakan komponen penting dalam teori belajar Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan teladan dalam pembentukan karakter peserta didik.

Temuan ini memperkuat pandangan Al-Ghazali yang menempatkan kualitas akhlak pendidik sebagai salah satu faktor utama keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pendidikan modern, peran tersebut tetap relevan karena keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi dan metode mengajar, tetapi juga oleh integritas, keteladanan, dan kompetensi sosial pendidik.

Strategi pembiasaan (*habituation*) yang menjadi bagian dari teori belajar Islam juga menunjukkan kesesuaian dengan konsep *habit formation* dalam psikologi pendidikan. Melalui pembiasaan, nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian sosial tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diinternalisasikan menjadi karakter yang melekat pada peserta didik. Perbedaannya, pendidikan Islam memberikan landasan spiritual sehingga setiap perilaku positif dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt., bukan sekadar kebiasaan sosial.

Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan pendidikan abad ke-21. Gagasan Ibnu Khaldun mengenai pembelajaran bertahap (*at-tadarruj fi at-ta'lim*) sejalan dengan prinsip penyusunan kurikulum modern yang memperhatikan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Demikian pula pandangan Ibnu Sina mengenai pentingnya menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik memiliki kesamaan dengan pendekatan *student-centered learning* yang saat ini banyak diterapkan dalam berbagai sistem pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemikiran pendidikan Islam memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori pembelajaran kontemporer.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa teori belajar modern tidak perlu diposisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pendidikan Islam. Sebaliknya, berbagai teori seperti konstruktivisme, humanisme, maupun kognitivisme dapat diadaptasi secara selektif selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis. Integrasi tersebut memungkinkan terciptanya proses pembelajaran yang inovatif, partisipatif, dan kontekstual tanpa mengabaikan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa teori belajar dalam pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual secara seimbang. Sementara itu, secara praktis hasil penelitian memberikan implikasi bahwa pendidik perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil belajar, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman, serta pengembangan kompetensi abad ke-21. Dengan demikian, teori belajar dalam pendidikan Islam tetap memiliki relevansi yang tinggi sebagai landasan pengembangan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman sekaligus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa teori belajar dalam perspektif pendidikan Islam memiliki karakteristik yang holistik karena mengintegrasikan aspek kognitif, spiritual, moral, emosional, dan sosial dalam proses pembelajaran. Berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, belajar dipahami tidak hanya sebagai proses memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemikiran para tokoh pendidikan Islam, seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun, masih relevan dalam pengembangan pembelajaran kontemporer. Konsep keteladanan pendidik, pengembangan fitrah, pembiasaan, serta pembelajaran yang dilakukan secara bertahap memiliki kesesuaian dengan berbagai pendekatan pembelajaran modern yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, teori-teori belajar modern, seperti konstruktivisme, humanisme, dan kognitivisme, dapat diintegrasikan secara selektif dengan nilai-nilai pendidikan Islam selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan memperlihatkan bahwa teori belajar dalam pendidikan Islam tidak hanya memiliki landasan normatif yang kuat, tetapi juga tetap relevan dalam menjawab tantangan pendidikan abad ke-21. Oleh karena itu, teori belajar dalam pendidikan Islam dapat dijadikan sebagai landasan dalam merancang pembelajaran yang mampu menyeimbangkan penguasaan

ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, serta penguatan nilai-nilai spiritual peserta didik. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris pada berbagai jenjang pendidikan untuk menguji implementasi teori belajar Islam dalam praktik pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1999). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Ghazali. (2011). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Terj.). Jakarta: Republika.
- Hadi, A., Anim, S., & Yasin, H. (2024). Integration of Islamic principles and modern educational theories in Islamic education. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 16(2), 1385–1398. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i2.6105>.
- Hermanto, M., & Jayana, T. A. (2024). John Dewey's constructivist learning theory and its implementation in Islamic Religious Education learning. *Bestari*, 20(1), 23–34. <https://doi.org/10.36667/bestari.v20i1.1494>.
- Ibnu Khaldun. (2001). *Muqaddimah* (Terj.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ibnu Sina. (1985). *As-Siyasah fi At-Tarbiyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Langgulang, H. (1980). *Beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi pendidikan Islam: Dari paradigma pengembangan, manajemen kelembagaan, kurikulum hingga strategi pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2016). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Putra, R. (2024). Teori belajar dalam Al-Qur'an. *Journal on Education*, 7(1), 2355–2364. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i1.6812>.
- Saleh, Y. Y. S., & Arifiani, B. F. (2024). Konsep dan teori belajar dalam perspektif pendidikan Islam. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 37–49. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v1i02.6125>.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 15). Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Umami, N. R., Affandi, A., Arifuddin, A., & Sofi, M. J. (2024). Trend in the learning model of Islamic education over a decade: A bibliometric review. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v10i1.18839>.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

DINAMIKA PERUBAHAN KURIKULUM DAN TANTANGAN GURU PAI DALAM MENYESUAIKAN PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI 1 SUSOH

Putri Hastuti¹, Ira Juraida²

^{1,2} STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya

putrihastuti133@gmail.com¹ ; Irajuraida92@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perubahan kurikulum serta tantangan yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menyesuaikan pembelajaran di SMP Negeri 1 Susoh. Perubahan kurikulum yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menuntut guru untuk mampu menyesuaikan perangkat pembelajaran, metode mengajar, serta materi yang diajarkan kepada peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta dokumentasi perangkat pembelajaran berupa Program Tahunan (PROTA), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Silabus, dan Analisis Alokasi Waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Susoh masih menerapkan dua kurikulum, yaitu Kurikulum 2013 pada kelas IX dan Kurikulum Merdeka pada kelas VII dan VIII. Dalam pelaksanaannya, guru menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Kurikulum 2013 dan Modul Ajar pada Kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum yang terjadi secara berulang menimbulkan berbagai kendala bagi guru, seperti pergantian buku pembelajaran yang terlalu cepat, kesulitan menyesuaikan perangkat pembelajaran, serta belum optimalnya evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Selain berdampak pada guru, perubahan kurikulum juga memengaruhi peserta didik karena materi pembelajaran dinilai belum sepenuhnya tersusun sesuai tingkat perkembangan usia mereka. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kurikulum yang lebih konsisten, evaluasi yang matang, dan penyesuaian secara bertahap agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif.

Kata kunci: Pembelajaran PAI, Kurikulum Merdeka, Tantangan Guru.

Abstract

This study aims to determine the dynamics of curriculum changes and the challenges faced by Islamic Religious Education (PAI) teachers in adapting learning at SMP Negeri 1 Susoh. Curriculum changes require teachers to adjust learning tools, teaching methods, and learning materials according to students' needs. This research used a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with school representatives and Islamic Religious Education teachers, as well as documentation of learning tools. The results showed that SMP Negeri 1 Susoh still

implements two curricula, namely the 2013 Curriculum for grade IX and the Merdeka Curriculum for grades VII and VIII. Teachers use lesson plans in the 2013 Curriculum and teaching modules in the Merdeka Curriculum. Frequent curriculum changes create challenges for teachers, including rapid textbook replacement, difficulties in adapting learning tools, and limited evaluation of curriculum effectiveness. These changes also affect students because learning materials are not always arranged according to their developmental stages. Therefore, curriculum implementation should be carried out consistently and supported by comprehensive evaluation to ensure effective learning outcomes.

Keywords: *Islamic Education learning, independent curriculum, teacher challenges*

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan salah satu komponen dan pedoman penting dalam dunia pendidikan yang berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan pendidikan mencapai tujuan yang diinginkan, guna mengatur semua proses pendidikan mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi. Adapun perubahan kurikulum dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dari KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) atau Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013, diganti lagi ke Kurikulum Merdeka, yang saat ini masih dipakai (Amalina, 2024).

Perubahan kurikulum tentu membawa dampak terhadap proses pembelajaran, terutama bagi guru sebagai pelaksana utama di lapangan. Guru dituntut untuk mampu menyesuaikan perangkat pembelajaran, metode mengajar, strategi pembelajaran, serta materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Namun, dalam praktiknya perubahan kurikulum sering menimbulkan berbagai tantangan. (Balqis & Ananda, 2024)

Guru di SMP tersebut menyampaikan bahwa perubahan kurikulum yang terjadi berulang-ulang membuat guru kewalahan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Buku pembelajaran yang belum selesai diterapkan sering kali diganti lagi dengan buku baru. Selain itu, kurikulum yang diterapkan belum sepenuhnya dianalisis dengan baik apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau belum, namun sudah kembali mengalami perubahan lagi.

Dampak perubahan kurikulum juga dirasakan oleh peserta didik. Materi pembelajaran kadang dianggap belum tersusun secara teratur sesuai tingkat perkembangan usia peserta didik. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas

proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai tantangan guru dalam menyesuaikan pembelajaran PAI terhadap perubahan kurikulum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kurikulum di SMP Negeri 1 Susoh, tantangan yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam dalam menghadapi perubahan kurikulum, dampak perubahan kurikulum terhadap peserta didik, serta strategi guru dalam menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Secara konseptual, kurikulum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan mata pelajaran, tetapi juga mencakup empat komponen utama yang saling berkaitan, yaitu tujuan, isi atau materi, proses atau strategi pembelajaran, dan evaluasi. Keempat komponen tersebut harus dirancang secara konsisten agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman yang utuh dalam mengarahkan proses pendidikan. Ketika salah satu komponen mengalami perubahan, misalnya perubahan pada standar isi atau capaian pembelajaran, maka komponen lain seperti metode dan sistem evaluasi juga perlu disesuaikan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006, Kurikulum 2013 (K13), hingga yang terbaru adalah Kurikulum Merdeka (Kurniaman et al., 2013). Setiap perubahan kurikulum umumnya dilatarbelakangi oleh evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya serta upaya untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum Merdeka misalnya, dirancang dengan pendekatan yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta menekankan penguatan profil pelajar Pancasila dibandingkan Kurikulum 2013 yang cenderung lebih terstruktur dan berbasis kompetensi inti serta kompetensi dasar yang telah ditetapkan secara baku (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020).

Perbedaan filosofi dan struktur antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka inilah yang menjadi salah satu sumber tantangan tersendiri bagi sekolah yang menerapkan kedua kurikulum tersebut secara bersamaan, seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 Susoh. Guru dituntut untuk memahami dua kerangka berpikir kurikulum yang

berbeda sekaligus, yaitu kerangka yang lebih preskriptif pada K13 dan kerangka yang lebih terbuka pada Kurikulum Merdeka, sehingga kesiapan konseptual guru menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kurikulum di lapangan.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena PAI tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan agama secara kognitif, tetapi juga pada penanaman nilai, sikap, dan pembentukan karakter peserta didik yang bersifat jangka panjang (Al-Quran, 2019). Perubahan kurikulum yang terlalu cepat dikhawatirkan dapat mengganggu kesinambungan proses penanaman nilai tersebut, karena guru harus membagi perhatian antara penyesuaian format administrasi pembelajaran dengan upaya menjaga kualitas substansi pembelajaran PAI itu sendiri. Oleh karena itu, kajian mengenai dinamika perubahan kurikulum dan tantangan guru PAI menjadi relevan untuk dilakukan, khususnya pada satuan pendidikan yang masih berada pada masa transisi antara dua kurikulum seperti SMP Negeri 1 Susoh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan apa adanya mengenai fenomena penerapan kurikulum, tantangan guru, serta dampaknya terhadap peserta didik, tanpa bermaksud melakukan pengujian hipotesis atau generalisasi statistik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Susoh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut masih menerapkan dua kurikulum secara bersamaan, yaitu Kurikulum 2013 pada kelas IX dan Kurikulum Merdeka pada kelas VII dan VIII, sehingga dianggap representatif untuk mengkaji dinamika perubahan kurikulum serta tantangan yang menyertainya, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan pokok sebagai panduan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara lebih mendalam dan fleksibel. Wawancara difokuskan pada penerapan

kurikulum, kendala yang dihadapi, serta strategi yang telah dilakukan guru dalam menyesuaikan pembelajaran.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen perangkat pembelajaran yang digunakan guru, seperti Program Tahunan (PROTA), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Modul Ajar, serta Analisis Alokasi Waktu (Dokumentasi Program Tahunan, ATP/Silabus, dan Analisis Alokasi Waktu Mata Pelajaran PAI SMP Negeri 1 Susoh, 2024). Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga gambaran mengenai penerapan kurikulum di sekolah menjadi lebih utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan menyederhanakan data hasil wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi maupun tabel agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses memaknai data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai penerapan kurikulum, tantangan guru, dan dampaknya terhadap peserta didik.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Kurniati, S.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah (Hasil Wawancara dengan Dian Kurniati, 2026) dan Ibu Salmi, S.Ag. selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI) (Hasil Wawancara dengan Salmi, 2026), diperoleh beberapa temuan terkait penerapan kurikulum di SMP Negeri 1 Susoh. Sekolah masih menerapkan dua kurikulum yang berbeda, yaitu Kurikulum 2013 pada kelas IX dan Kurikulum Merdeka pada kelas VII dan VIII. Dalam pelaksanaannya, guru menggunakan RPP pada Kurikulum 2013 dan Modul Ajar pada Kurikulum Merdeka.

Selain itu, guru juga menjelaskan bahwa perubahan kurikulum yang terlalu cepat membuat guru mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Buku pembelajaran yang belum selesai diterapkan sudah kembali diganti dengan buku baru sehingga guru belum sempat mengevaluasi apakah materi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan

peserta didik atau belum. Perubahan kurikulum juga berdampak pada peserta didik karena materi pembelajaran dinilai belum tersusun secara teratur sesuai tingkat perkembangan usia peserta didik.

Temuan lain yang diperoleh dari dokumentasi menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran pada Kurikulum Merdeka telah disusun secara lebih rinci, mencakup Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang menguraikan capaian pembelajaran per fase, serta Modul Ajar yang memuat langkah-langkah pembelajaran, media, dan asesmen secara terintegrasi (Dokumentasi Program Tahunan, ATP/Silabus, dan Analisis Alokasi Waktu Mata Pelajaran PAI SMP Negeri 1 Susoh, 2024). Sementara itu, perangkat pembelajaran pada Kurikulum 2013 masih mengikuti format RPP yang lebih baku, dengan komponen kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, serta langkah-langkah pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya (Kurniaman et al., 2013).

Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa proses evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik belum dilakukan secara optimal. Guru menyampaikan bahwa keterbatasan waktu antar pergantian kurikulum membuat pihak sekolah lebih berfokus pada pemenuhan aspek administratif, seperti penyesuaian format dokumen dan pengadaan buku, dibandingkan pada evaluasi substantif terhadap efektivitas pembelajaran itu sendiri (Hasil Wawancara dengan Salmi, 2026).



Gambar 1. SMP N 1 Susoh



Gambar 2. Kegiatan wawancara dengan Guru PAI SMP Negeri 1 Susoh

Tabel 1.
Ringkasan Hasil Wawancara

No	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Kelas IX masih menggunakan K13	Menggunakan RPP
2	Kelas VII dan VIII menggunakan Kurikulum Merdeka	Menggunakan Modul Ajar
3	Guru kewalahan saat kurikulum berganti	Buku cepat berganti
4	Materi belum tersusun sesuai tingkat usia peserta didik	Pembelajaran kurang maksimal

Tabel 1 di atas merangkum temuan pokok mengenai penerapan kurikulum di SMP Negeri 1 Susoh beserta kendala yang menyertainya. Selain temuan tersebut, dokumentasi perangkat pembelajaran juga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang cukup mendasar antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Perbandingan Karakteristik Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Susoh

No	Aspek	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka
1	Perangkat pembelajaran	RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)	Modul Ajar
2	Acuan penyusunan	Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran
3	Fokus pembelajaran	Penguasaan materi sesuai KD	Pengembangan profil pelajar Pancasila
4	Sifat kurikulum	Terstruktur dan baku	Fleksibel dan kontekstual
5	Kelas penerapan	Kelas IX	Kelas VII dan VIII

Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa perbedaan mendasar antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Susoh tidak hanya terletak pada jenis perangkat pembelajaran yang digunakan, tetapi juga pada orientasi dan sifat kurikulum secara keseluruhan. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan secara baku, sedangkan Kurikulum Merdeka memberi ruang yang lebih besar bagi guru untuk

mengembangkan pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik, sekaligus menguatkan pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Kurikulum di SMP Negeri 1 Susoh

Berdasarkan hasil wawancara, SMP N 1 Susoh masih menerapkan dua jenis kurikulum, yaitu Kurikulum 2013 (K13) pada kelas IX dan Kurikulum Merdeka di kelas VII dan VIII. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menggunakan perangkat pembelajaran yang berbeda sesuai kurikulum yang diterapkan. Pada kelas yang menggunakan K13, guru masih menggunakan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), sedangkan pada Kurikulum Merdeka guru menggunakan Modul Ajar.

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, perangkat pembelajaran pada Kurikulum Merdeka telah memuat Program Tahunan (PROTA), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Silabus, serta Analisis Alokasi Waktu. Materi pembelajaran juga telah disusun berdasarkan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila.

Kondisi diberlakukannya dua kurikulum secara bersamaan ini menunjukkan bahwa proses transisi kurikulum di Indonesia tidak berjalan serentak pada seluruh jenjang kelas, melainkan bertahap sesuai kebijakan pemerintah. Bagi SMP Negeri 1 Susoh, hal ini berarti guru PAI dituntut untuk menguasai dua sistem administrasi pembelajaran sekaligus, yaitu format RPP yang lebih terstruktur dan linear pada Kurikulum 2013, serta Modul Ajar yang lebih fleksibel dan berbasis capaian pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Perbedaan filosofi antara kedua kurikulum ini turut memengaruhi cara guru merancang tujuan pembelajaran, memilih metode, dan menyusun asesmen bagi peserta didik di kelas yang berbeda.

Penerapan dua kurikulum secara bersamaan juga menuntut kesiapan manajerial sekolah, khususnya dalam pengaturan jadwal, koordinasi antar guru, dan penyediaan sumber belajar yang sesuai untuk masing-masing kurikulum. Tanpa dukungan manajemen yang baik, kondisi ini berpotensi menambah beban administratif guru dan memperlambat proses adaptasi terhadap kurikulum baru. (Lamangga & Kartini, 2024)

2. Tantangan Guru dalam Menghadapi Perubahan Kurikulum

Perubahan kurikulum yang terjadi secara berulang menimbulkan berbagai tantangan bagi guru. Berdasarkan hasil wawancara, guru merasa kewalahan ketika

harus menyesuaikan pembelajaran dengan perubahan kurikulum yang terus berganti. Salah satu kendala utama adalah pergantian buku pembelajaran yang terlalu cepat. Buku yang belum selesai diterapkan dalam pembelajaran sudah diganti kembali dengan buku baru. Akibatnya, guru belum sempat mengevaluasi apakah materi yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau belum.

Guru juga menyampaikan bahwa penerapan kurikulum seharusnya dilakukan secara maksimal terlebih dahulu sebelum dilakukan perubahan kembali. Menurut guru, kurikulum perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui apakah kurikulum tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, perubahan kurikulum membuat guru harus terus menyesuaikan metode pembelajaran dan perangkat pembelajaran baru dalam waktu yang relatif singkat. (Balqis & Ananda, 2024)

Hal ini sejalan dengan penelitian *Curriculum Development* yang dilakukan oleh Otang Kurniawan dan Eddy Noviana yang menyatakan bahwa implementasi Kurikulum 2013 memiliki berbagai kendala, seperti metode pembelajaran yang belum efektif dan sistem penilaian yang lebih rumit dibandingkan kurikulum sebelumnya. Kondisi tersebut juga ditemukan di SMP Negeri 1 Susoh, di mana guru mengalami kesulitan karena pergantian buku dan perangkat pembelajaran yang terlalu cepat.

Tantangan tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan guru dalam menghadapi perubahan kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam menyusun perangkat pembelajaran, tetapi juga oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk beradaptasi. Pergantian kebijakan yang terlalu cepat membuat guru cenderung berada pada posisi reaktif, yaitu menyesuaikan diri seadanya agar proses belajar mengajar tetap berjalan, tanpa sempat melakukan refleksi mendalam terhadap efektivitas metode yang digunakan. Situasi ini berisiko menurunkan kualitas pembelajaran meskipun secara administratif kurikulum tetap terlaksana.

Selain faktor waktu, minimnya pelatihan atau pendampingan yang berkelanjutan bagi guru PAI di SMP Negeri 1 Susoh turut memperberat tantangan tersebut. Guru sering kali harus mempelajari sendiri format dan substansi kurikulum baru tanpa bimbingan teknis yang memadai dari pihak terkait, sehingga proses penyesuaian menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan interpretasi terhadap tuntutan kurikulum yang berlaku.

3. Dampak Perubahan Kurikulum terhadap Peserta Didik

Perubahan kurikulum tidak hanya berdampak pada guru, tetapi juga pada peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara, susunan materi pembelajaran terkadang dianggap belum sesuai dengan tingkat perkembangan usia peserta didik. Selain itu, pergantian buku yang terlalu cepat membuat peserta didik harus kembali menyesuaikan diri dengan materi dan sistem pembelajaran yang baru.

Hal ini sejalan dengan penelitian Azkia Amalina yang menyatakan bahwa perubahan kurikulum yang terlalu cepat dapat menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan struktur pembelajaran yang baru. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kurikulum yang belum matang dalam persiapannya dapat memengaruhi efektivitas proses pembelajaran.

Berdasarkan kondisi di SMP Negeri 1 Susoh, peserta didik terkadang mengalami kesulitan memahami materi karena materi pembelajaran belum tersusun secara teratur sesuai tingkat perkembangan usia mereka. Oleh karena itu, perubahan kurikulum perlu diterapkan secara bertahap dan melalui evaluasi yang matang agar pembelajaran dapat berjalan lebih efektif.

Dampak ini menjadi penting untuk diperhatikan karena peserta didik merupakan pihak yang secara langsung merasakan konsekuensi dari setiap kebijakan perubahan kurikulum, meskipun mereka tidak dilibatkan dalam proses perumusannya. Ketidaksesuaian antara materi ajar dengan tingkat perkembangan usia peserta didik dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menuntut internalisasi nilai secara bertahap, bukan sekadar penguasaan materi secara kognitif semata.

Selain itu, seringkali pergantian buku dan pendekatan pembelajaran juga dapat memengaruhi motivasi belajar peserta didik, karena mereka harus berulang kali menyesuaikan diri dengan cara belajar yang baru sebelum benar-benar terbiasa dengan pola sebelumnya. Kondisi ini menegaskan pentingnya masa transisi yang cukup panjang serta sosialisasi yang jelas kepada peserta didik setiap kali terjadi perubahan kurikulum, agar proses belajar tetap berlangsung secara berkesinambungan.

4. Strategi Guru dalam Menyesuaikan Pembelajaran

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, guru tetap berusaha menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku. Guru melaksanakan pembelajaran

sesuai arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan sekolah maupun pemerintah. Berdasarkan dokumentasi perangkat pembelajaran, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti *inquiry*, *discovery learning*, tutor sebaya, jigsaw, dan diskusi. Guru berusaha menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman melalui penggunaan Modul Ajar dan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel pada Kurikulum Merdeka.

Strategi ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan kurikulum, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif mencari solusi praktis di tingkat kelas agar tujuan pembelajaran tetap tercapai di tengah keterbatasan waktu dan sumber daya. Pemilihan metode yang bervariasi, seperti tutor sebaya dan jigsaw, mengindikasikan upaya guru untuk tetap menghadirkan pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi peserta didik, sekalipun perangkat pembelajaran yang tersedia belum sepenuhnya stabil akibat pergantian kurikulum yang terus berlangsung. (Rahman et al., 2024).

Ke depan, strategi adaptasi semacam ini akan lebih optimal apabila didukung oleh pelatihan berkelanjutan, forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) yang aktif, serta pendampingan dari pengawas sekolah. Dukungan tersebut diperlukan agar penyesuaian yang dilakukan guru tidak hanya bersifat individual dan reaktif, tetapi juga terarah dan berkelanjutan sejalan dengan tujuan kurikulum yang ditetapkan.

5. Implikasi Perubahan Kurikulum terhadap Mutu Pembelajaran PAI

Perubahan kurikulum yang terjadi secara berulang di SMP Negeri 1 Susoh memiliki implikasi yang cukup luas terhadap mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Di satu sisi, kehadiran Kurikulum Merdeka membuka peluang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran PAI secara lebih kontekstual dan bermakna, misalnya dengan mengaitkan materi keagamaan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik melalui proyek profil pelajar Pancasila. Di sisi lain, keterbatasan waktu adaptasi yang dialami guru berisiko menghambat optimalisasi peluang tersebut, karena energi guru lebih banyak tercurah untuk menyesuaikan format administratif dibandingkan untuk memperkaya strategi dan media pembelajaran.

Implikasi lain yang perlu dicermati adalah potensi terjadinya inkonsistensi mutu pembelajaran antar kelas yang menerapkan kurikulum berbeda dalam satu sekolah. Peserta didik kelas IX yang masih berada pada Kurikulum 2013 mengalami pola

pembelajaran yang relatif lebih terstruktur, sementara peserta didik kelas VII dan VIII pada Kurikulum Merdeka mengalami pola pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis proyek. Apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan pola ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pengalaman belajar antar angkatan, khususnya dalam hal penguatan nilai-nilai keagamaan yang seharusnya dibangun secara berkesinambungan dari satu jenjang ke jenjang berikutnya (Rahman et al., 2024).

Oleh karena itu, mutu pembelajaran PAI di tengah masa transisi kurikulum sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menjaga esensi nilai keagamaan yang diajarkan, terlepas dari format kurikulum yang digunakan. Konsistensi pada substansi pembelajaran, seperti penanaman akhlak, ibadah, dan pemahaman keislaman, perlu tetap dijaga meskipun perangkat administratif pembelajaran mengalami perubahan mengikuti kurikulum yang berlaku.

6. Rekomendasi bagi Sekolah dan Pemangku Kebijakan

Berdasarkan berbagai tantangan dan dampak yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan bagi sekolah maupun pemangku kebijakan pendidikan. Pertama, pihak sekolah perlu menyusun rencana transisi kurikulum yang lebih terjadwal, sehingga guru memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menginternalisasi kurikulum baru sebelum benar-benar diterapkan secara penuh di kelas. Kedua, perlu adanya program pendampingan atau pelatihan berkala bagi guru PAI, baik yang diselenggarakan oleh sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), maupun dinas pendidikan setempat, agar penyesuaian terhadap kurikulum baru tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh masing-masing guru.

Ketiga, evaluasi terhadap efektivitas kurikulum yang diterapkan perlu dilakukan secara berkala dan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administratif semata, tetapi juga pada dampaknya terhadap pemahaman dan pembentukan karakter peserta didik. Keempat, bagi pemangku kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, kebijakan perubahan kurikulum sebaiknya mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan di lapangan, termasuk ketersediaan buku ajar, pelatihan guru, dan dukungan sarana pembelajaran, agar perubahan kurikulum tidak semata-mata menjadi beban administratif bagi guru, melainkan benar-benar membawa perbaikan pada kualitas proses dan hasil pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SMP N 1 Susoh masih menerapkan dua kurikulum yang berbeda, yaitu Kurikulum 2013 (K13) pada kelas IX dan Kurikulum Merdeka di kelas VII dan VIII. Dalam pelaksanaannya, guru menerapkan RPP pada K13 dan Modul Ajar pada Kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum yang terjadi secara berulang menimbulkan berbagai tantangan bagi guru, seperti pergantian buku pembelajaran yang terlalu cepat, belum maksimalnya penerapan kurikulum, serta kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Selain berdampak pada guru, perubahan kurikulum juga memengaruhi peserta didik karena materi pembelajaran terkadang belum tersusun secara teratur sesuai tingkat perkembangan usia mereka. Oleh karena itu, perubahan kurikulum sebaiknya dilakukan secara bertahap dan melalui evaluasi yang matang agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum, baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka, sangat bergantung pada kesiapan guru, dukungan manajemen sekolah, serta ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan transisi secara bertahap. Tanpa dukungan tersebut, perubahan kurikulum berpotensi menjadi beban administratif semata, alih-alih menjadi sarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Susoh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran, T. (2019). *Terjemahan Al-Quran_v161122*.

Amalina, A. A. (2024). Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. *JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.17977/um027v7i12024p113>

Balqis, A. F., & Ananda, E. R. (2024). Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(4), 1675. <https://doi.org/10.35931/am.v8i4.3754>

Dokumentasi Program Tahunan, ATP/Silabus, dan Analisis Alokasi Waktu Mata Pelajaran PAI SMP Negeri 1 Susoh Tahun 2024.

Kurniaman, O., Noviana, E., & Dasar, S. (2013). Penerapan Kurikulum 2013 Dalam

Meningkatkan Keterampilan, Sikap, Dan Pengetahuan. *Universitas Riau* |, 6, 389–396.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Jakarta: Kemdikbud RI.

Lamangga, M., & Kartini, N. H. (2024). Analisis Transisi Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Bustanul Ulum. *Jurnal Perspektif Penelitian Pendidikan*, 2(2), 38–45. <https://doi.org/10.33084/jppp.v2i2.10138>

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2020. Qur'an Kemenag. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Rahman, R. H., Rukajad, A., & Ramdhani, K. (2024). PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER: Kajian Literatur Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 11(3), 309–320. <https://doi.org/10.31102/alulum.11.3.2024.309-320>

Zarkasyi, Dachlan Salim. 2017. *Pelajaran Ilmu Tajwid Praktis*. Semarang: Yayasan Pendidikan Raudhatul Mujawwidin.

KONSEP SISTEM PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DALAM MENINGKATKAN LIFE SKILL SANTRI

Nursalami¹

¹STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya

¹ nursalami528@gmail.com

Abstrak

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk kepribadian dan moral generasi muslim. Di tengah perkembangan zaman, pesantren dituntut tidak hanya mencetak santri yang unggul dalam ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki kecakapan hidup (life skill) sebagai bekal menghadapi persoalan kehidupan nyata setelah menyelesaikan pendidikan. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep sistem pendidikan pondok pesantren dan menganalisis bagaimana sistem tersebut dapat berperan dalam meningkatkan life skill santri. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (documentary research), yaitu menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai literatur berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem pendidikan pesantren dan konsep life skill. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pendidikan pondok pesantren dibangun atas unsur kiai, santri, masjid, asrama, dan pengajaran kitab kuning, serta ditopang oleh prinsip-prinsip seperti keikhlasan, kesederhanaan, kolektivitas, dan kemandirian. Prinsip dan pola kehidupan tersebut secara alami menjadi wahana bagi tumbuhnya empat kategori life skill, yaitu kecakapan personal, sosial, akademik, dan vokasional, melalui jalur kurikuler maupun ekstrakurikuler seperti muhadharah, organisasi santri, dan unit usaha ekonomi pesantren. Namun demikian, penguatan life skill santri masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan belum terintegrasinya program kecakapan hidup secara sistematis ke dalam kurikulum inti pesantren.

Kata kunci: sistem pendidikan pesantren, life skill, santri.

Abstract

Islamic boarding schools (pondok pesantren) are among the oldest Islamic educational institutions in Indonesia, playing a vital role in shaping the moral character of Muslim generations. Amid contemporary demands, pesantren are expected not only to produce santri who excel in religious knowledge but also to possess life skills to face real-life challenges after completing their education. This article aims to examine the concept of the pesantren education system and analyze how it can enhance the life skills of santri. A descriptive-qualitative approach with a library research method was employed, drawing on books, journal articles, and prior studies relevant to the pesantren education system and the concept of life skills. The

findings show that the pesantren education system is built upon the elements of kiai, santri, mosque, dormitory, and classical text instruction, supported by principles such as sincerity, simplicity, collectivity, and independence. These principles naturally foster four categories of life skills, personal, social, academic, and vocational, through curricular and extracurricular activities such as public speaking practice, student organizations, and pesantren-based economic units. Nevertheless, strengthening santri life skills still faces challenges, including limited facilities, limited teaching staff, and the absence of a systematic integration of life skill programs into the core pesantren curriculum.

Keywords: *pesantren education system, life skill, santri.*

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan pesantren tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi yang jauh lebih penting adalah menanamkan nilai-nilai moral dan agama, dengan filosofi pendidikan yang didasarkan pada hubungan bermakna antara manusia, alam, dan Sang Pencipta (Thoha, 2006). Kurikulum pesantren yang berpusat pada pengajaran kitab kuning berfungsi sebagai marji' (rujukan) nilai universal dalam menyikapi tantangan kehidupan. Selain ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, pesantren sejak lama mendasarkan pendidikannya pada tiga ranah utama, yaitu faqohah (kedalaman pemahaman agama), tabi'ah (karakter), dan kafaah (kecakapan operasional) (Dian Nafi', 2007). Prinsip ini menunjukkan bahwa pesantren, secara filosofis, sesungguhnya telah memiliki fondasi bagi pembentukan kecakapan hidup santri, tidak semata-mata transfer ilmu keagamaan.

Meskipun demikian, sejumlah pesantren masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan orientasi tersebut secara optimal. Salah satu problem yang dihadapi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren adalah minimnya keterhubungan antara kurikulum yang diajarkan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga sebagian lulusan pesantren belum sepenuhnya siap bersaing maupun berwirausaha secara mandiri di tengah masyarakat. Kondisi ini turut berkontribusi pada tingginya angka pengangguran terdidik, sehingga pesantren perlu mendekatkan dunia pendidikannya dengan dunia kerja agar lulusannya siap bersaing di berbagai bidang, termasuk sebagai tenaga terampil maupun wirausahawan mandiri. Tantangan pendidikan dewasa ini berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Oleh karena itu, pendidikan Islam, termasuk

pondok pesantren, perlu merestrukturisasi orientasi tujuan pendidikannya, salah satunya dengan mengarahkan pendidikan pada penguatan kecakapan hidup (life skill), sehingga santri memiliki bekal yang memadai ketika kelak terjun di tengah masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema kecakapan hidup pada lembaga pendidikan. Syafiq (2016) menemukan bahwa kebijakan pendidikan kecakapan hidup di sekolah kejuruan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui penyesuaian kurikulum. Pradana (2017) menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi mandiri melalui koperasi pelajar di pesantren modern turut berdampak pada penguatan life skill, khususnya kecakapan personal, berpikir rasional, dan sosial. Amalia (2011) menjelaskan bahwa manajemen program life skill di madrasah aliyah mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sementara itu, Fauzi dkk. (2017) menemukan bahwa pengelolaan pendidikan life skill di pesantren dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan kurikulum yang mencakup penunjang akademik, keagamaan, keterampilan vokasional, dan pengabdian masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang umumnya bersifat studi kasus pada satu lembaga tertentu, artikel ini disusun untuk mengkaji secara konseptual keterkaitan antara sistem pendidikan pondok pesantren secara umum dan penguatan life skill santri, melalui telaah kritis terhadap berbagai sumber literatur. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana konsep sistem pendidikan pondok pesantren serta bagaimana sistem tersebut dapat dioptimalkan dalam meningkatkan life skill santri. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi pengelola pesantren dalam merancang program pendidikan yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan santri di masa depan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (documentary research/library research). Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengungkapkan fakta-fakta yang ada berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap subjek kajian, bukan sekadar menguji hubungan antarvariabel. Pendekatan ini dipilih karena penulis bermaksud mengungkapkan fakta, konsep, dan gagasan tentang sistem pendidikan pondok

pesantren dan konsep life skill secara komprehensif. Sumber data dalam kajian ini adalah data sekunder yang bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta regulasi terkait yang membahas sistem pendidikan pondok pesantren dan pendidikan kecakapan hidup. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, membaca, dan mencatat bagian-bagian penting dari sumber-sumber tersebut yang relevan dengan fokus kajian.

Adapun analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (memilih dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan tema kajian), penyajian data (mengorganisasikan data hasil reduksi ke dalam pola-pola konseptual yang sistematis), dan penarikan kesimpulan (menyusun sintesis pemikiran berdasarkan keterkaitan antarkonsep yang ditemukan). Sumber-sumber yang telah dikumpulkan dibandingkan dan dianalisis secara kritis untuk menemukan benang merah antara konsep sistem pendidikan pesantren dan pengembangan life skill santri.

HASIL

1. Konsep dan Unsur Sistem Pendidikan Pondok Pesantren

Kata 'pondok' berasal dari bahasa Arab funduq yang berarti ruang tidur, asrama, atau wisma sederhana, sebagai tempat penampungan santri yang datang dari luar daerah (Dhofier, 2008). Mastuhu (2008) menjelaskan bahwa pesantren adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok merujuk pada tempat tinggal sederhana. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam berfungsi untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Secara struktural, unsur-unsur pokok yang terdapat pada hampir setiap pondok pesantren adalah kiai, santri, pondok (asrama), masjid, dan pengajaran kitab kuning; sedangkan pesantren yang telah modern turut memiliki madrasah atau sekolah umum. Kelima unsur tersebut saling terkait secara fungsional dan membentuk satu kesatuan sistem pendidikan yang tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter melalui pengasuhan dan keteladanan (Dhofier, 2008).

Umiarso dan Nur Zazin (2011) menjelaskan bahwa pesantren mengemban tiga fungsi utama, yaitu sebagai pusat pengkaderan pemikir agama (center of excellence), lembaga pencetak sumber daya manusia (human resource), dan lembaga pemberdayaan masyarakat (agent of development). Ketiga fungsi ini menegaskan

bahwa peran pesantren tidak terbatas pada ranah keagamaan semata, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia secara luas, termasuk penguatan kemandirian dan jiwa kewirausahaan santri. Sebagai lembaga yang mengiringi dakwah Islamiah, sistem pendidikan pesantren ditopang oleh sejumlah prinsip, di antaranya theocentric (berorientasi pada kebenaran Tuhan), sukarela dan mengabdikan, kearifan, kolektivitas, kebebasan terpimpin, pengamalan ajaran agama, tanpa ijazah formal, serta restu kiai (Ma'unah, 2009; Masyud, 2005). Prinsip kolektivitas, misalnya, tampak pada budaya hidup bersama di asrama yang menuntut santri mengutamakan kepentingan bersama, sementara prinsip kebebasan terpimpin memungkinkan pesantren mengombinasikan kurikulum keagamaan dengan kurikulum umum sesuai ketentuan pendidikan nasional.

2. Tujuan dan Tipologi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren

Tujuan umum pondok pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pribadi yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Secara khusus, Syawaludin (2010) merumuskan tujuan pesantren meliputi: mendidik santri menjadi muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil; mencetak kader ulama dan mubaligh yang ikhlas dan tangguh; menumbuhkan semangat kebangsaan; mendidik tenaga penyuluh pembangunan; membentuk tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan; serta mendorong kontribusi santri bagi kesejahteraan sosial masyarakat.

Mastuhu (2008) menjelaskan bahwa tujuan utama pesantren adalah mencapai hikmah (wisdom) berdasarkan ajaran Islam, sehingga santri diharapkan menjadi pribadi yang 'alim (menguasai ilmu), shalih (berakhlak baik), dan nasyir al-'ilm (penyebar ilmu). Secara lebih rinci, kompetensi santri dirumuskan dalam empat tingkatan tujuan, yaitu wasail (tujuan-tujuan awal berupa penguatan ilmu agama dan penunjangnya), ahdaf (tujuan antara sesuai jenjang pendidikan), maqashid (tujuan pokok berupa kemampuan mengelola urusan kepesantrenan), dan ghayah (tujuan akhir berupa keridaan Allah) (Indra, 2016).

Dari sisi kurikulum, pesantren tidak memiliki standar kurikulum yang seragam; setiap pesantren mengajarkan kombinasi kitab yang berbeda sesuai kompetensi kiaiinya, dengan tingkatan dasar, menengah, dan lanjut. Metode pengajaran utama yang digunakan adalah sistem bandongan, yaitu sekelompok santri

mendengarkan kiai membaca, menerjemahkan, dan mengulas kitab dengan kelompok belajar yang disebut halaqah (Masjkur, 2007).

3. Konsep dan Kategori Life Skill

Secara harfiah, life skill berarti kecakapan hidup, yaitu suatu kepandaian, kemahiran, kesanggupan, atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menempuh dan menjalani kehidupan (Ilahi, 2012). World Health Organization (WHO) mendefinisikan life skill sebagai keterampilan atau kemampuan untuk beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan kehidupan secara lebih efektif (Anwar, 2011). Adapun Asmani (2015) menjelaskan life skill sebagai kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan seseorang agar menjadi pribadi yang mandiri dalam kehidupan.

Departemen Pendidikan Nasional membagi life skill ke dalam empat kategori utama, yaitu kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional (dalam AB Syamsuddin, 2017). Ringkasan keempat kategori tersebut beserta cakupannya disajikan pada tabel berikut.

No	Kategori Life Skill	Cakupan
1	Kecakapan Personal (Personal Skill)	Kecakapan mengenal diri (self awareness) dan kecakapan berpikir rasional (thinking skill) sebagai modal individu menghadapi perubahan kehidupan yang cepat.
2	Kecakapan Sosial (Social Skill)	Kemampuan berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, berbagi, berpartisipasi, dan beradaptasi dengan norma yang berlaku di masyarakat (Anwar, 2012).
3	Kecakapan Akademik (Academic Skill)	Kecakapan berpikir ilmiah, meliputi identifikasi variabel, perumusan hipotesis, serta perancangan dan pelaksanaan penelitian secara sistematis (Suranto, 2013).
4	Kecakapan Vokasional (Vocational Skill)	Keterampilan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu, mencakup kecakapan vokasional dasar dan kecakapan vokasional khusus (Sutrisno, 2003).

Tabel 1. Kategori Life Skill dalam Pendidikan

Depdiknas (2014) merumuskan beberapa ciri pembelajaran pendidikan kecakapan hidup, antara lain: terjadinya proses identifikasi kebutuhan belajar, penyadaran untuk belajar bersama, penguasaan kecakapan personal-sosial-vokasional-akademik-manajerial secara terintegrasi, pemberian pengalaman kerja yang menghasilkan produk bermutu, serta pendampingan teknis untuk bekerja atau

membentuk usaha bersama. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup idealnya juga berpijak pada empat pilar pendidikan UNESCO, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* (Slamet PH, 2002).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat dianalisis bahwa sistem pendidikan pondok pesantren pada dasarnya merupakan sistem pendidikan total yang tidak memisahkan antara pembelajaran formal dan kehidupan sehari-hari santri. Pola hidup berasrama yang menyatukan seluruh aktivitas santri dalam satu lingkungan menjadikan setiap momen sebagai bagian dari proses pendidikan, sehingga secara alami menumbuhkan kecakapan personal santri, seperti kemandirian, kedisiplinan, dan kemampuan mengelola diri, sebagaimana tercermin dalam prinsip *sukarela-mengabdikan* dan kearifan yang dianut pesantren.

Prinsip kolektivitas yang menjadi ciri khas kehidupan pesantren turut menjadi wahana efektif bagi tumbuhnya kecakapan sosial santri. Interaksi intensif antarsantri dari berbagai latar belakang, keterlibatan dalam kegiatan bersama, serta budaya saling mendahulukan kewajiban di atas hak, secara langsung melatih santri untuk bekerja sama, bermusyawarah, dan menyelesaikan persoalan secara dewasa. Keteladanan kiai sebagai figur sentral turut memperkuat proses ini, karena kiai berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai rujukan moral dan sosial bagi seluruh warga pesantren.

Pada aspek kecakapan akademik, konsep *faqohah* (kedalaman pemahaman agama) yang menjadi salah satu ranah utama pendidikan pesantren sesungguhnya sejalan dengan hakikat kecakapan akademik itu sendiri, yaitu kemampuan berpikir sistematis, analitis, dan mendalam. Proses pengajaran kitab kuning melalui metode *bandongan* dan *halaqah*, yang menuntut santri menerjemahkan, mengulas, dan mendiskusikan teks secara kritis, pada dasarnya melatih kecakapan berpikir ilmiah santri, meskipun objek kajiannya berbeda dari disiplin ilmu umum. Sementara itu, kecakapan vokasional santri banyak ditumbuhkan melalui jalur ekstrakurikuler dan kegiatan penunjang di luar kurikulum inti, seperti kegiatan *muhadharah* (latihan berpidato), organisasi santri, serta unit-unit usaha ekonomi pesantren yang melatih jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi. Pengembangan ekonomi pesantren melalui unit usaha mandiri, sebagaimana ditemukan pula oleh Pradana (2017) pada

konteks pesantren modern, menunjukkan bahwa koperasi dan unit usaha santri berfungsi ganda, yakni sebagai penunjang pendanaan pesantren sekaligus sebagai medium pendidikan kecakapan hidup yang konkret bagi santri.

Integrasi life skill ke dalam sistem pendidikan pesantren secara umum berlangsung melalui dua jalur, yaitu jalur kurikuler dan jalur ekstrakurikuler. Jalur kurikuler diwujudkan melalui pengajaran kitab-kitab yang memuat nilai kemandirian, etika sosial, dan tanggung jawab, sedangkan jalur ekstrakurikuler diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan praktis. Sejalan dengan temuan Fauzi dkk. (2017) dan Amalia (2011), pengelolaan pendidikan life skill yang efektif memerlukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang jelas, mencakup kurikulum penunjang akademik, keagamaan, vokasional, dan pengabdian masyarakat.

Meskipun sistem pendidikan pesantren memiliki modal kuat bagi penguatan life skill, kajian ini juga menemukan sejumlah faktor yang dapat menghambat optimalisasinya. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang keterampilan praktis, seperti fasilitas pelatihan vokasional dan sumber belajar yang memadai. Kedua, keterbatasan jumlah dan variasi tenaga pendidik, yang berdampak pada kurang beragamnya metode maupun perspektif pembelajaran yang diterima santri. Ketiga, orientasi kurikulum yang di banyak pesantren masih dominan pada kajian kitab kuning tanpa disertai penguatan kecakapan hidup secara terstruktur dalam kurikulum inti, sehingga program life skill lebih banyak bersifat insidental melalui kegiatan ekstrakurikuler ketimbang menjadi bagian integral dari desain pendidikan pesantren.

Faktor pendukungnya, sebagaimana ditemukan dalam berbagai kajian terdahulu, meliputi dukungan pimpinan dan dewan guru dalam memberikan motivasi, pengarahan, serta program-program kompetitif seperti lomba cerdas cermat, muhadharah, dan kegiatan sosial-keagamaan lain yang melatih keberanian dan wawasan santri untuk tampil di hadapan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip broad based education yang dikembangkan Depdiknas (2014), yaitu pendekatan pendidikan berbasis luas yang tidak semata memfokuskan santri pada satu bidang, melainkan turut mengembangkan bakat sosial dan keterampilan hidup secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem pendidikan pondok pesantren dalam meningkatkan life skill santri sangat ditentukan oleh sejauh mana pesantren mampu mengelola dan mengintegrasikan potensi-potensi yang telah

dimilikinya secara alami, pola asrama, keteladanan kiai, dan kurikulum keagamaan, dengan program-program penguatan kecakapan hidup yang lebih terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sistem pendidikan pondok pesantren, yang dibangun atas keterpaduan unsur kiai, santri, masjid, asrama, dan pengajaran kitab kuning, serta ditopang prinsip-prinsip seperti kesukarelaan, kearifan, dan kolektivitas, memiliki potensi besar sebagai medium penguatan life skill santri. Pola kehidupan asrama yang menuntut kemandirian dan interaksi sosial yang intensif secara alami menumbuhkan kecakapan personal dan sosial santri, sementara pengajaran kitab kuning melalui metode bandongan dan halaqah turut melatih kecakapan berpikir yang menjadi dasar kecakapan akademik. Kecakapan vokasional, di sisi lain, banyak ditumbuhkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan unit usaha ekonomi pesantren.

Meskipun demikian, penguatan life skill santri masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan tenaga pendidik, dan belum terintegrasinya program kecakapan hidup secara sistematis ke dalam kurikulum inti pesantren. Oleh karena itu, penguatan life skill santri akan lebih optimal apabila pesantren mampu merumuskan kurikulum kecakapan hidup secara terstruktur dan berkelanjutan, tidak sekadar mengandalkan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat tambahan. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris pada berbagai tipologi pesantren disarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh implementasi konsep ini, guna memperoleh gambaran praktik terbaik penguatan life skill santri di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Syamsuddin. 2017. *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*. Ponorogo: Wade.
- Amalia, Rizki. 2011. *Manajemen Program Life Skills di MAN Purwokerto*. Skripsi. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Anwar. 2011. *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education): Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2015. *Sekolah Life Skill: Lulus Siap Kerja*. Yogyakarta: Diva Press.

- Astuti, D., & Irene, Siti. 2003. "Pengembangan Kecakapan Hidup (Life Skill) melalui Penanaman Etos Kerja dan Membangun Kreativitas Anak". *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1(2).
- Depdiknas. 2014. *Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*. Jakarta: Depdiknas.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2008. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Dian Nafi', M., dkk. 2007. *Praksis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: El-Kis.
- Fauzi, Ahmad, dkk. 2017. "Pengelolaan Pendidikan Life Skills di Pondok Pesantren Kabupaten Pandeglang". *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2).
- Ilahi, Muhammad Takdir. 2012. *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Indra, Hasbi. 2016. *Pesantren dan Transformasi Sosial: Studi atas Pemikiran KH. Abdullah Syafi'ie dalam Bidang Pendidikan Islam*. Jakarta: Penamadani.
- Ma'unah, Binti. 2009. *Tradisi Intelektual Santri: Tantangan dan Hambatan Pesantren di Masa Depan*. Yogyakarta: Teras.
- Masjkur, Anhari. 2007. *Integrasi Sekolah ke dalam Sistem Pendidikan Pesantren (Tinjauan Filosofis dalam Perspektif Islam)*. Surabaya: Diantama.
- Mastuhu. 2008. *Dinamika Model Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Pustaka Press.
- Masyud, Sulthon. 2005. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Dipa Pustaka.
- Pradana, Satria. 2017. *Implementasi Ekonomi Mandiri dalam Pengembangan Life Skill dan Dampaknya pada Mutu Pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Slamet PH. 2002. "Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsep Dasar". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suranto S. Siswaya. 2013. *Konsep Pendidikan Berbasis Life Skill (Pentingnya Life Skill dan Pendidikan Vokasi)*. Semarang: Alprin.
- Sutrisno, Joko. 2003. *Pengembangan Pendidikan Berwawasan Kewirausahaan Sejak Usia Dini*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Syawaludin. 2010. *Peranan Pengasuh Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai di Provinsi Gorontalo*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Syafiq, Rizqi. 2016. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) di SMK Negeri 1 Trucuk Klaten". Jurnal Kebijakan Pendidikan, 5(5).

Thoha, Habib. 2006. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Umiarso, & Zazin, Nur. 2011. Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan: Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren. Semarang: RaSAIL Media Group.

DESAIN PENELITIAN SURVEI DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN: KONSEP, KARAKTERISTIK, DAN IMPLEMENTASI

T. Fachrul Razie¹

¹STIT Muhammadiyah Aceh Barat Daya

¹ fachrulrazie93@gmail.com

Abstrak

Desain penelitian survei merupakan salah satu desain penelitian kuantitatif yang paling banyak digunakan dalam penelitian pendidikan karena kemampuannya memperoleh data empiris dari populasi atau sampel secara sistematis untuk menggambarkan karakteristik, persepsi, sikap, perilaku, maupun hubungan antarvariabel. Meskipun demikian, implementasinya masih sering dipahami secara terbatas sebagai kegiatan penyebaran kuesioner, sehingga mengabaikan aspek-aspek metodologis yang menjadi karakteristik utama desain penelitian survei. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep, karakteristik, dan implementasi desain penelitian survei dalam penelitian pendidikan melalui pendekatan kajian pustaka (*literature review*). Sumber data diperoleh dari buku metodologi penelitian yang otoritatif serta artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian survei dalam bidang pendidikan. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui proses identifikasi, klasifikasi, sintesis, dan interpretasi berbagai konsep dan temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa desain penelitian survei tidak hanya berfungsi sebagai teknik pengumpulan data, tetapi merupakan kerangka metodologis yang mengintegrasikan perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, penyusunan instrumen, teknik sampling, prosedur pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Penerapan desain penelitian survei yang tepat berkontribusi terhadap peningkatan validitas, reliabilitas, objektivitas, dan daya generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan implementasi desain penelitian survei menjadi kompetensi yang penting bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam menghasilkan penelitian pendidikan yang berkualitas.

Kata Kunci: desain penelitian survei, penelitian pendidikan, penelitian kuantitatif.

Abstract

Survey research design is one of the most widely used quantitative research designs in educational research due to its ability to systematically collect empirical data from a population or sample to describe characteristics, perceptions, attitudes, behaviors, and relationships among variables. However, its implementation is often narrowly understood as merely distributing questionnaires, overlooking the methodological principles that constitute the essence of survey research design. This article aims to

comprehensively examine the concepts, characteristics, and implementation of survey research design in educational research through an integrative literature review approach. The data sources consisted of authoritative research methodology books and relevant national and international scholarly articles on survey research in education. The data were analyzed using content analysis through the processes of literature identification, classification, synthesis, and interpretation. The findings indicate that survey research design is not merely a data collection technique but a comprehensive methodological framework that integrates problem formulation, research objectives, instrument development, sampling techniques, data collection procedures, data analysis, and interpretation of findings. The appropriate implementation of survey research design contributes to improving the validity, reliability, objectivity, and generalizability of research findings. Therefore, a comprehensive understanding of the concepts and implementation of survey research design is essential for students, researchers, and academics to produce high-quality educational research.

Keywords: *survey research design; educational research; quantitative research.*

PENDAHULUAN

Penelitian merupakan instrumen utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi dasar bagi peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam bidang pendidikan, penelitian tidak hanya berfungsi menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga memberikan landasan bagi perumusan kebijakan, pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, serta evaluasi berbagai program pendidikan. Creswell dan Guetterman (2019) menjelaskan bahwa penelitian pendidikan merupakan proses ilmiah yang sistematis untuk memahami berbagai permasalahan pendidikan melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data sehingga menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat. Senada dengan itu, Cohen, Manion, dan Morrison (2018) menegaskan bahwa kualitas keputusan dalam dunia pendidikan sangat bergantung pada kualitas bukti ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian. Oleh karena itu, penelitian yang berkualitas menjadi prasyarat penting dalam mendukung pengembangan pendidikan yang berbasis bukti (*evidence-based education*).

Kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh pentingnya masalah yang dikaji, tetapi juga oleh ketepatan metodologi yang digunakan. Metodologi penelitian menyediakan kerangka ilmiah yang mengarahkan seluruh tahapan penelitian, mulai dari perumusan masalah, penentuan tujuan, pemilihan desain penelitian, penyusunan instrumen, pengumpulan data, hingga analisis dan interpretasi hasil penelitian. Di antara berbagai komponen metodologi tersebut, desain penelitian menempati posisi

yang sangat strategis karena berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) yang memastikan setiap tahapan penelitian tersusun secara logis dan saling berkaitan. Creswell dan Creswell (2018) menyatakan bahwa desain penelitian merupakan rencana menyeluruh yang memandu peneliti dalam memilih pendekatan dan prosedur yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Fraenkel, Wallen, dan Hyun (2019) menambahkan bahwa ketepatan desain penelitian akan menentukan kualitas data, validitas temuan, serta tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan demikian, pemilihan desain penelitian tidak dapat dilakukan secara intuitif, melainkan harus didasarkan pada kesesuaian antara permasalahan penelitian, tujuan, karakteristik data, dan prosedur analisis yang digunakan.

Di antara berbagai desain dalam pendekatan kuantitatif, desain penelitian survei merupakan salah satu yang paling banyak digunakan dalam penelitian pendidikan karena mampu menggambarkan kondisi, karakteristik, persepsi, sikap, perilaku, maupun hubungan antarvariabel pada suatu populasi secara sistematis. Desain ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris dari sampel yang representatif sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas (Creswell & Creswell, 2018). Babbie (2020) juga menegaskan bahwa penelitian survei merupakan strategi yang efektif untuk memperoleh informasi faktual dari responden dalam jumlah besar melalui prosedur yang sistematis dan efisien. Dalam praktiknya, penelitian survei telah banyak diterapkan untuk mengkaji berbagai isu pendidikan, seperti motivasi belajar, kompetensi guru, kepuasan peserta didik, efektivitas pembelajaran, hingga evaluasi kebijakan pendidikan.

Meskipun desain penelitian survei telah lama digunakan dalam berbagai penelitian pendidikan, perkembangan publikasi ilmiah menunjukkan bahwa pembahasannya masih didominasi oleh aspek-aspek teknis, seperti penyusunan kuesioner, teknik sampling, validitas instrumen, atau analisis data statistik secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan aspek konseptual, karakteristik metodologis, dan implementasi desain penelitian survei dalam satu kerangka pembahasan masih relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan sebagian peneliti masih memandang penelitian survei sebatas penggunaan angket sebagai instrumen pengumpulan data, padahal desain penelitian survei mencakup keseluruhan proses penelitian mulai dari perumusan masalah, penentuan variabel, pemilihan sampel, penyusunan instrumen, hingga analisis dan interpretasi data. Fenomena tersebut juga tercermin dalam berbagai

publikasi yang lebih banyak menitikberatkan pada prosedur teknis dibandingkan sintesis konseptual mengenai desain penelitian survei sebagai suatu kerangka metodologis yang utuh.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menyajikan kajian konseptual melalui pendekatan *integrative literature review* untuk mengintegrasikan berbagai perspektif mengenai desain penelitian survei dalam penelitian pendidikan. Berbeda dengan kajian terdahulu yang cenderung membahas komponen tertentu secara parsial, artikel ini mensintesis konsep, karakteristik, implementasi, serta keterkaitan antarkomponen desain penelitian survei sehingga menghasilkan suatu kerangka pemahaman yang lebih komprehensif. Kontribusi konseptual yang ditawarkan adalah penegasan bahwa desain penelitian survei merupakan suatu sistem metodologis yang mengintegrasikan dimensi konseptual, dimensi operasional, dan dimensi penjaminan kualitas penelitian. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam merancang penelitian survei yang sistematis, valid, reliabel, dan sesuai dengan kaidah metodologi penelitian pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *integrative literature review (ILR)*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengintegrasikan berbagai konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai desain penelitian survei dalam konteks penelitian pendidikan. Metode *integrative literature review* banyak digunakan untuk mengembangkan sintesis konseptual dan memperluas pemahaman terhadap suatu fenomena melalui integrasi berbagai jenis literatur (Whittemore & Knafl, 2005; Torraco, 2005; Snyder, 2019). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengintegrasikan berbagai konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai desain penelitian survei dalam konteks penelitian pendidikan. Berbeda dengan *systematic literature review* yang berorientasi pada sintesis bukti empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik, *integrative literature review* memberikan ruang untuk menggabungkan berbagai jenis literatur, baik yang bersifat konseptual maupun empiris, sehingga mampu menghasilkan kerangka konseptual baru

dan memperluas pemahaman terhadap suatu topik penelitian (Torraco, 2005; Snyder, 2019).

Sumber data penelitian berupa literatur yang relevan dengan desain penelitian survei, meliputi buku metodologi penelitian, artikel ilmiah internasional, dan artikel jurnal nasional yang membahas konsep, karakteristik, implementasi, serta perkembangan desain penelitian survei dalam bidang pendidikan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap pembahasan mengenai desain penelitian survei. Prioritas diberikan kepada publikasi yang berasal dari jurnal bereputasi, buku metodologi yang menjadi rujukan utama dalam penelitian pendidikan, dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tanpa mengesampingkan karya-karya klasik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan metodologi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber pustaka yang diperoleh dari basis data ilmiah, seperti Scopus, Google Scholar, ERIC, dan portal jurnal nasional terakreditasi SINTA. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus kajian, yaitu desain penelitian survei dalam penelitian pendidikan. Proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa setiap referensi yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan mensintesis berbagai konsep serta temuan yang terdapat dalam literatur terpilih. Hasil analisis selanjutnya diorganisasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: (1) konsep desain penelitian survei, (2) karakteristik desain penelitian survei, (3) implementasi desain penelitian survei dalam penelitian pendidikan, (4) kelebihan dan keterbatasan desain penelitian survei, serta (5) sintesis konseptual sebagai kerangka pemahaman integratif. Melalui proses tersebut, penelitian ini menghasilkan sintesis konseptual yang diharapkan dapat memperkaya kajian metodologi penelitian pendidikan sekaligus memberikan landasan teoritis bagi peneliti dalam merancang penelitian survei yang sistematis dan berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Desain Penelitian Survei

Desain penelitian survei merupakan salah satu desain dalam pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk memperoleh informasi empiris mengenai karakteristik suatu populasi melalui pengumpulan data dari sampel yang representatif. Data umumnya dikumpulkan menggunakan instrumen terstruktur, seperti kuesioner atau angket, sehingga memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi populasi, mengidentifikasi hubungan antarvariabel, serta menguji kecenderungan suatu fenomena secara objektif. Karakteristik tersebut menjadikan desain penelitian survei sebagai salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam penelitian pendidikan, khususnya ketika peneliti ingin memperoleh gambaran mengenai sikap, persepsi, perilaku, kompetensi, maupun kepuasan responden (Creswell & Creswell, 2018; Babbie, 2020).

Berbagai ahli memberikan penekanan yang berbeda mengenai konsep desain penelitian survei. Creswell dan Creswell (2018) memandang penelitian survei sebagai desain penelitian kuantitatif yang bertujuan mendeskripsikan kecenderungan, sikap, atau karakteristik suatu populasi melalui data yang diperoleh dari sampel. Sementara itu, Babbie (2020) menekankan bahwa penelitian survei merupakan pendekatan yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang dapat digeneralisasikan kepada populasi dengan menerapkan prosedur sampling yang tepat. Fowler (2014) menambahkan bahwa kekuatan utama penelitian survei terletak pada penggunaan instrumen yang terstandar sehingga setiap responden memperoleh perlakuan pengukuran yang sama dan hasil penelitian memiliki tingkat konsistensi yang tinggi.

Perkembangan penelitian pendidikan menunjukkan bahwa desain penelitian survei tidak lagi dipahami hanya sebagai prosedur pengumpulan data menggunakan kuesioner. Berbagai kajian menegaskan bahwa kualitas penelitian survei sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara perumusan masalah, penentuan variabel, teknik sampling, pengembangan instrumen, proses pengumpulan data, serta strategi analisis yang digunakan. Artino et al. (2014), misalnya, menekankan bahwa penyusunan instrumen survei yang baik harus diawali dengan kejelasan konstruk yang diukur, pengembangan indikator yang tepat, serta pengujian validitas dan reliabilitas sebelum instrumen digunakan. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan penelitian survei tidak hanya ditentukan oleh instrumen, tetapi juga oleh keseluruhan rancangan metodologis yang mendasarinya.

Dalam konteks penelitian pendidikan, desain penelitian survei memiliki ruang lingkup yang luas karena dapat diterapkan untuk mengkaji berbagai fenomena, seperti motivasi belajar peserta didik, kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi sekolah, kepuasan mahasiswa, maupun evaluasi layanan pendidikan. Fleksibilitas tersebut menjadikan desain penelitian survei sebagai pendekatan yang efektif untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Oleh karena itu, desain penelitian survei tidak hanya berfungsi sebagai strategi pengumpulan data, tetapi juga sebagai kerangka metodologis yang menghubungkan tujuan penelitian, populasi, instrumen, analisis data, dan proses penarikan kesimpulan secara terpadu.

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, artikel ini mendefinisikan desain penelitian survei sebagai kerangka metodologis dalam penelitian kuantitatif yang mengintegrasikan proses konseptual, prosedural, dan analitis untuk memperoleh informasi empiris mengenai karakteristik populasi melalui data yang dikumpulkan dari sampel yang representatif, sehingga menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan memiliki daya generalisasi dalam konteks penelitian pendidikan. Definisi ini menegaskan bahwa desain penelitian survei merupakan suatu sistem penelitian yang tidak hanya berorientasi pada teknik pengumpulan data, tetapi juga pada keterpaduan seluruh komponen metodologis yang membentuk kualitas penelitian.

Tabel 1. Sintesis Definisi Desain Penelitian Survei Menurut Para Ahli

Sumber	Fokus Definisi	Sintesis
Creswell & Creswell (2018)	Mendeskripsikan karakteristik populasi melalui sampel	Menekankan fungsi deskriptif dan inferensial penelitian survei.
Babbie (2020)	Generalisasi hasil penelitian	Menekankan pentingnya representativitas sampel.
Fowler (2014)	Instrumen survei yang terstandar	Menekankan kualitas pengukuran dalam penelitian survei.
Artino et al. (2014)	Pengembangan instrumen yang sistematis	Menunjukkan bahwa kualitas survei bergantung pada desain metodologis secara keseluruhan.
Sintesis Penulis	Integrasi aspek konseptual, prosedural, dan analitis	Desain penelitian survei dipahami sebagai kerangka metodologis yang menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat digeneralisasikan.

Karakteristik Desain Penelitian Survei

Desain penelitian survei memiliki karakteristik yang membedakannya dari desain penelitian kuantitatif lainnya. Karakteristik tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknik pengumpulan data, tetapi juga mencakup orientasi penelitian, prosedur pemilihan responden, kualitas instrumen, jenis data yang dihasilkan, hingga kemampuan menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan. Dengan karakteristik tersebut, penelitian survei menjadi salah satu desain yang paling banyak digunakan dalam penelitian pendidikan karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai fenomena yang terjadi pada populasi secara sistematis dan objektif (Creswell & Creswell, 2018; Babbie, 2020).

Karakteristik pertama adalah berorientasi pada populasi (*population-oriented research*). Meskipun data dikumpulkan dari sampel, tujuan utama penelitian survei adalah memperoleh informasi yang dapat menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemilihan sampel menjadi tahap yang sangat menentukan kualitas penelitian. Penggunaan teknik *probability sampling* memungkinkan setiap anggota populasi memiliki peluang yang terukur untuk menjadi responden sehingga hasil penelitian memiliki tingkat representativitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, penggunaan *non-probability sampling* harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan disertai penjelasan mengenai keterbatasan generalisasi hasil penelitian (Groves et al., 2009).

Karakteristik kedua adalah penggunaan instrumen yang terstandar. Dalam penelitian survei, instrumen umumnya berupa kuesioner atau angket yang disusun berdasarkan indikator variabel yang jelas dan diuji melalui proses validitas serta reliabilitas sebelum digunakan dalam pengumpulan data. Artino et al. (2014) menegaskan bahwa kualitas data survei sangat dipengaruhi oleh kualitas instrumen yang digunakan. Instrumen yang tidak dirancang secara sistematis berpotensi menimbulkan *measurement error*, sehingga mengurangi ketepatan interpretasi hasil penelitian. Oleh karena itu, penyusunan instrumen merupakan bagian integral dari desain penelitian survei, bukan sekadar tahap administratif dalam pengumpulan data.

Karakteristik ketiga adalah menghasilkan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Data yang diperoleh melalui penelitian survei memungkinkan peneliti melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden maupun analisis inferensial untuk menguji hubungan, pengaruh, atau perbedaan antarvariabel.

Fleksibilitas analisis tersebut menjadikan penelitian survei tidak hanya berfungsi sebagai alat deskripsi fenomena, tetapi juga sebagai pendekatan yang mampu memberikan dasar empiris bagi pengembangan teori dan pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan (Fraenkel et al., 2019).

Karakteristik keempat adalah kemampuan menghasilkan generalisasi. Generalisasi merupakan salah satu tujuan utama penelitian survei, tetapi hanya dapat dicapai apabila penelitian dirancang dengan prosedur metodologis yang tepat. Groves et al. (2009) menjelaskan bahwa kualitas generalisasi dipengaruhi oleh berbagai sumber kesalahan, seperti *coverage error*, *sampling error*, *nonresponse error*, dan *measurement error*. Oleh karena itu, keberhasilan penelitian survei tidak hanya ditentukan oleh jumlah responden, tetapi juga oleh kemampuan peneliti dalam mengendalikan berbagai potensi bias selama proses penelitian berlangsung.

Selain karakteristik tersebut, penelitian survei juga memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap berbagai konteks penelitian pendidikan. Desain ini dapat digunakan untuk mengkaji fenomena pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, serta pada berbagai kelompok responden, seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, dosen, tenaga kependidikan, maupun orang tua. Fleksibilitas tersebut memungkinkan penelitian survei menjadi salah satu pendekatan yang paling relevan dalam menghasilkan informasi empiris yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) di bidang pendidikan.

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, karakteristik desain penelitian survei dalam penelitian pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi konseptual, dimensi operasional, dan dimensi analitis. Dimensi konseptual berkaitan dengan tujuan penelitian dan orientasinya terhadap populasi. Dimensi operasional mencakup penentuan sampel, penyusunan instrumen, serta prosedur pengumpulan data. Sementara itu, dimensi analitis berhubungan dengan proses analisis statistik, interpretasi hasil, dan kemampuan menghasilkan generalisasi. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dan membentuk suatu sistem metodologis yang menjadi ciri utama desain penelitian survei.

Tabel 2. Sintesis Karakteristik Desain Penelitian Survei

Dimensi	Karakteristik	Implikasi dalam Penelitian Pendidikan
---------	---------------	---------------------------------------

Konseptual	Berorientasi pada populasi dan tujuan penelitian	Menghasilkan gambaran empiris yang mewakili populasi sasaran.
Operasional	Menggunakan sampel yang representatif, instrumen terstandar, dan prosedur pengumpulan data yang sistematis	Menjamin kualitas data dan konsistensi proses penelitian.
Analitis	Menghasilkan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik dan digeneralisasikan	Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta pengembangan teori pendidikan.

Implementasi Desain Penelitian Survei dalam Penelitian Pendidikan

Implementasi desain penelitian survei dalam penelitian pendidikan merupakan proses penerapan prinsip-prinsip metodologis penelitian survei untuk memperoleh informasi empiris mengenai berbagai fenomena pendidikan secara sistematis. Berbeda dengan penelitian eksperimen yang berorientasi pada pengujian hubungan sebab-akibat melalui manipulasi variabel, penelitian survei berfokus pada pengumpulan data yang merepresentasikan kondisi aktual populasi sehingga mampu memberikan gambaran objektif mengenai karakteristik, persepsi, sikap, maupun perilaku responden. Oleh karena itu, desain penelitian survei menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam penelitian pendidikan karena mampu menghasilkan informasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan, evaluasi program, maupun pengambilan keputusan berbasis bukti (Creswell & Guetterman, 2019; Cohen et al., 2018).

Implementasi desain penelitian survei diawali dengan identifikasi masalah penelitian yang dirumuskan berdasarkan fenomena pendidikan yang memerlukan data empiris. Tahap ini menjadi dasar dalam menentukan tujuan penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian, serta menetapkan variabel yang akan diukur. Kejelasan rumusan masalah akan memengaruhi ketepatan penyusunan instrumen, pemilihan teknik sampling, hingga strategi analisis data. Dengan demikian, implementasi desain penelitian survei tidak dimulai pada saat penyebaran kuesioner, tetapi sejak proses perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis.

Tahap berikutnya adalah penentuan populasi dan teknik sampling. Dalam penelitian pendidikan, populasi dapat berupa peserta didik, guru, kepala sekolah, dosen, tenaga kependidikan, maupun orang tua, bergantung pada fokus penelitian. Pemilihan teknik sampling harus mempertimbangkan karakteristik populasi, tujuan

penelitian, serta tingkat representativitas yang diharapkan. Penggunaan teknik *probability sampling* lebih dianjurkan apabila penelitian bertujuan menghasilkan generalisasi terhadap populasi, sedangkan *non-probability sampling* dapat digunakan pada kondisi tertentu dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan interpretasi hasil (Groves et al., 2009).

Tahap selanjutnya adalah pengembangan instrumen penelitian. Instrumen survei harus disusun berdasarkan indikator yang diturunkan dari konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian. Selain memperhatikan kesesuaian indikator, instrumen juga harus melalui proses uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan dalam pengumpulan data. Artino et al. (2014) menjelaskan bahwa kualitas instrumen merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan, karena kesalahan dalam penyusunan butir pertanyaan dapat meningkatkan *measurement error* dan menurunkan validitas hasil penelitian.

Setelah instrumen dinyatakan layak, peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan berbagai media pengumpulan data, baik secara langsung (*paper-based survey*) maupun secara daring (*online survey*). Pemanfaatan platform digital memberikan keuntungan dari segi efisiensi waktu, biaya, dan jangkauan responden, tetapi juga menuntut perhatian terhadap tingkat respons, kejelasan instrumen, serta etika penelitian, termasuk perlindungan data pribadi responden.

Tahap terakhir adalah analisis dan interpretasi data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian, mulai dari statistik deskriptif hingga statistik inferensial. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada teori yang digunakan serta konteks penelitian pendidikan. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menyajikan hasil analisis statistik, tetapi juga menjelaskan makna temuan penelitian serta implikasinya bagi pengembangan kebijakan, praktik pembelajaran, maupun penelitian lanjutan.

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, implementasi desain penelitian survei dalam penelitian pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang mengintegrasikan perencanaan penelitian, pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis statistik, dan interpretasi hasil secara berkesinambungan. Keterpaduan setiap tahapan tersebut menjadi prasyarat utama untuk menghasilkan penelitian survei yang valid, reliabel, objektif, dan memiliki daya generalisasi yang memadai.

Tabel 3. Tahapan Implementasi Desain Penelitian Survei dalam Penelitian Pendidikan

Tahapan	Aktivitas Utama	Luaran
Identifikasi masalah	Menentukan fenomena dan merumuskan tujuan penelitian	Rumusan masalah dan tujuan penelitian
Penentuan populasi dan sampel	Menetapkan populasi serta teknik sampling	Sampel yang representatif
Pengembangan instrumen	Menyusun indikator, kuesioner, serta menguji validitas dan reliabilitas	Instrumen yang valid dan reliabel
Pengumpulan data	Penyebaran instrumen secara luring atau daring	Data penelitian
Analisis data	Analisis deskriptif dan/atau inferensial	Temuan penelitian
Interpretasi	Mengaitkan hasil analisis dengan teori dan konteks pendidikan	Kesimpulan dan rekomendasi

Sintesis Konseptual Desain Penelitian Survei dalam Penelitian Pendidikan

Desain penelitian survei merupakan salah satu desain penelitian kuantitatif yang memiliki tingkat penggunaan yang tinggi dalam penelitian pendidikan. Popularitas tersebut tidak terlepas dari kemampuannya menghasilkan data empiris dari populasi yang relatif besar dengan prosedur yang sistematis dan efisien. Meskipun demikian, seperti desain penelitian lainnya, penelitian survei memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan yang perlu dipahami agar penggunaannya sesuai dengan tujuan penelitian. Pemahaman terhadap kedua aspek tersebut penting untuk memastikan bahwa pemilihan desain penelitian didasarkan pada pertimbangan metodologis, bukan semata-mata karena kemudahan pelaksanaannya.

Salah satu keunggulan utama desain penelitian survei adalah kemampuannya menggambarkan karakteristik populasi melalui sampel yang representatif. Dengan penerapan teknik sampling yang tepat, hasil penelitian dapat digeneralisasikan kepada populasi sasaran sehingga memberikan dasar empiris yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Selain itu, penelitian survei relatif efisien dari sisi waktu, biaya, dan tenaga dibandingkan dengan penelitian eksperimen atau penelitian longitudinal, terutama ketika melibatkan responden dalam jumlah besar (Babbie, 2020; Creswell & Guetterman, 2019).

Keunggulan lain terletak pada fleksibilitasnya dalam mengukur berbagai konstruk pendidikan yang bersifat abstrak, seperti motivasi belajar, kepuasan peserta didik, kompetensi guru, budaya organisasi sekolah, maupun persepsi terhadap kebijakan pendidikan. Melalui instrumen yang terstandar, peneliti dapat mengubah konstruk-konstruk tersebut menjadi indikator yang terukur sehingga memungkinkan analisis statistik dilakukan secara objektif. Fleksibilitas ini menjadikan desain penelitian survei sebagai salah satu pendekatan yang paling sesuai untuk penelitian pendidikan yang berorientasi pada pengambilan keputusan berbasis data.

Di sisi lain, penelitian survei juga memiliki sejumlah keterbatasan metodologis. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan terhadap kualitas instrumen penelitian. Instrumen yang tidak memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai berpotensi menghasilkan *measurement error* sehingga menurunkan akurasi hasil penelitian. Artino et al. (2014) menegaskan bahwa kualitas instrumen merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas data survei, sehingga proses penyusunan dan pengujian instrumen harus menjadi bagian integral dari desain penelitian.

Keterbatasan berikutnya berkaitan dengan potensi munculnya berbagai bentuk bias, seperti *coverage error*, *sampling error*, *nonresponse error*, dan *measurement error* (Groves et al., 2009). Selain itu, responden dapat memberikan jawaban yang dipengaruhi oleh kecenderungan sosial (*social desirability bias*) atau kurang memahami butir pertanyaan yang diajukan. Dalam survei daring, tantangan lain berupa rendahnya tingkat respons (*response rate*) juga dapat memengaruhi representativitas data apabila tidak diantisipasi melalui strategi pengumpulan data yang tepat.

Dari perspektif analisis, penelitian survei pada umumnya menghasilkan bukti mengenai hubungan atau kecenderungan antarvariabel, tetapi tidak secara langsung membuktikan hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian harus disesuaikan dengan karakteristik desain yang digunakan. Temuan survei lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris, mengidentifikasi pola hubungan, serta memberikan dasar bagi penelitian lanjutan yang menggunakan desain eksperimental atau longitudinal untuk menguji hubungan kausal.

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, dapat dipahami bahwa kelebihan dan keterbatasan desain penelitian survei bukanlah dua aspek yang saling bertentangan, melainkan dua dimensi metodologis yang harus dipertimbangkan secara seimbang. Keunggulan penelitian survei akan memberikan manfaat yang optimal apabila

didukung oleh perencanaan penelitian yang matang, teknik sampling yang tepat, instrumen yang berkualitas, serta prosedur analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, kualitas penelitian survei tidak hanya ditentukan oleh desain yang dipilih, tetapi juga oleh ketepatan implementasi setiap tahapan metodologisnya.

Tabel 4. Analisis Kelebihan dan Keterbatasan Desain Penelitian Survei

Aspek	Keunggulan	Tantangan Metodologis
Populasi	Dapat menghasilkan gambaran populasi melalui sampel yang representatif	Representativitas dipengaruhi oleh teknik sampling
Efisiensi	Relatif hemat waktu, biaya, dan tenaga	Membutuhkan perencanaan pengumpulan data yang baik
Instrumen	Memungkinkan pengukuran berbagai konstruk pendidikan secara terstandar	Memerlukan uji validitas dan reliabilitas yang memadai
Analisis	Mendukung analisis statistik deskriptif maupun inferensial	Tidak secara langsung menjelaskan hubungan sebab-akibat

KESIMPULAN

Desain penelitian survei merupakan salah satu desain penelitian kuantitatif yang memiliki peran strategis dalam menghasilkan informasi empiris mengenai berbagai fenomena pendidikan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa desain penelitian survei tidak dapat dipahami hanya sebagai teknik pengumpulan data melalui kuesioner, melainkan sebagai suatu kerangka metodologis yang mengintegrasikan perumusan masalah, penetapan tujuan penelitian, penentuan populasi dan teknik sampling, pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis statistik, hingga interpretasi hasil penelitian. Keterpaduan antarkomponen tersebut menjadi faktor utama yang menentukan validitas, reliabilitas, objektivitas, serta daya generalisasi temuan penelitian.

Kajian ini juga mengidentifikasi bahwa karakteristik utama desain penelitian survei meliputi orientasi pada populasi, penggunaan instrumen yang terstandar, pemanfaatan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik, serta kemampuan menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan. Dalam implementasinya pada penelitian pendidikan, desain penelitian survei terbukti relevan untuk mengkaji

berbagai aspek, seperti motivasi belajar, kompetensi guru, kepemimpinan pendidikan, budaya organisasi sekolah, kepuasan peserta didik, maupun evaluasi program pendidikan. Namun demikian, keberhasilan implementasi desain ini sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan sampel, kualitas instrumen, serta kemampuan peneliti mengendalikan berbagai potensi bias selama proses penelitian.

Kontribusi konseptual artikel ini terletak pada penyusunan kerangka integratif desain penelitian survei dalam penelitian pendidikan, yang menempatkan desain penelitian survei sebagai suatu sistem metodologis yang menghubungkan dimensi konseptual, operasional, dan analitis secara terpadu. Kerangka tersebut memperluas pemahaman bahwa kualitas penelitian survei tidak hanya ditentukan oleh teknik pengumpulan data, tetapi oleh keterpaduan seluruh tahapan penelitian dalam menghasilkan temuan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka konseptual yang ditawarkan melalui studi empiris pada berbagai jenjang dan konteks pendidikan. Selain itu, pengembangan desain penelitian survei yang memanfaatkan teknologi digital, integrasi learning analytics, serta pendekatan mixed methods menjadi peluang penelitian yang penting untuk memperkaya metodologi penelitian pendidikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Artino, A. R., La Rochelle, J. S., Dezee, K. J., & Gehlbach, H. (2014). Developing questionnaires for educational research: AMEE Guide No. 87. *Medical Teacher*, 36(6), 463–474. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2014.889814>
- Babbie, E. R. (2020). *The practice of social research* (15th ed.). Cengage Learning.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8th ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2019). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (6th ed.). Pearson.

- Fowler, F. J. (2014). *Survey research methods* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2019). *How to design and evaluate research in education* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey methodology* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356–367.
<https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
- Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>

E-ISSN 3047-9487

P-ISSN 2302-8327

VOLUME 16 NOMOR 2

JULI 2026



DITERBITKAN OLEH :

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)
Muhammadiyah Aceh Barat Daya

ISSN 3047-9487

